



***MONEY POLITICS* DAN RESPON GENERASI
MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA
PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN
PETUKANGAN UTARA KECAMATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)**

Disusun Oleh :

BUDI KURNIAWAN

NPM: 222070286

PROGRAM STUDI: ILMU POLITIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
TAHUN 2026**

***MONEY POLITICS* DAN RESPON GENERASI
MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA
PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN
PETUKANGAN UTARA KECAMATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)**

BUDI KURNIAWAN
222070286

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik

Diperiksa dan disetujui oleh :

Dr. Wahyudi Pramono, M.Si
Dosen Pembimbing
Tanggal :

Arlis Prayugo, S.IP., M.Pd
Ketua Program Studi
Tanggal :

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Ketua,

Dr. Sumarsono, MDM
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Kurniawan

NPM : 222070286

Program Studi : S1 Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila benar terbukti melakukan Tindakan plagiat (penjiplakan)

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 16 Januari 2026

Budi Kurniawan

222070286

ABSTRAK

"*MONEY POLITICS* DAN RESPON GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN)".

Oleh :

Budi Kurniawan

NPM 222070286

Pembimbing:

Dr. Wahyudi Pramono, M.Si

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (*money politics*) dan respon partisipasi politik generasi milenial pada Pilpres 2024 di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi tingkat partisipasi milenial, mengidentifikasi pola praktik politik uang, serta dampaknya terhadap keputusan politik mereka. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi milenial secara kuantitas tergolong tinggi namun terfragmentasi secara kualitas antara idealisme dan pragmatisme ekonomi. Praktik politik uang telah bertransformasi dari cara konvensional ke instrumen digital dan manipulasi program bantuan sosial melalui jaringan perantara lokal. Respon milenial terbagi dalam empat pola: pragmatis (menerima karena kebutuhan), strategis (menerima namun tetap memilih sesuai hati nurani), idealis (menolak keras), dan apatis/golput (menarik diri sebagai bentuk protes). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi memerlukan sinergi antara literasi politik, kemandirian ekonomi generasi muda, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Money Politics, Partisipasi Politik, Generasi Milenial, Pilpres

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"*Money politics* Dan Respon Generasi Milenial (Studi Kasus: Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN). Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memotret realitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya mengenai bagaimana pemilih muda bersikap di tengah kepungan praktik politik transaksional.

Dalam perjalanan panjang penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Politik Abdi Negara (STIP-AN), Bapak Dr. Sumarsono, MDM. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan skripsi ini dan terus berusaha untuk membuat STIP-AN lebih maju.
2. Bapak Arlis Prayugo, S.IP, M.Pd. selaku Kaprodi Ilmu Politik, STIP-AN yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Wahyudi Pramono, M.Si., Dosen pembimbing penulis selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta, Saudara-saudara saya , khususnya orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
5. Seluruh dosen dan staf akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh teman-teman Angkatan IX kelas A1 yang menjadi semangat penulis untuk terus menyelesaikan perkuliahan ini sampai wisuda bersama.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu politik, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2026

Penulis

Budi Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
1.2.1. Fokus Penelitian.....	12
1.2.2. Subfokus Penelitian.....	12
1.3. Perumusan Masalah.....	13
1.4. Tujuan Penelitian.....	13
1.5. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Kerangka Teoritis.....	15
2.1.1. Teori Politik.....	15
2.1.2. Teori Partisipasi Politik.....	18
2.1.3. Teori Perilaku Pemilih.....	20
2.1.4. Teori Money Politics.....	23

2.1.5.	Generasi Milenial dan Karakteristik Politiknya.....	26
2.1.6.	Pemilihan Umum di Indonesia.....	31
2.1.7.	Pemilihan Umum Presiden (PILPRES).....	34
2.2.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
2.3.	Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep	39
2.3.1.	Kerangka Pemikiran.....	40
2.3.2.	Operasional Konsep.....	41
2.4.	Hipotesis.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		44
3.1.	Desain Penelitian.....	44
3.2.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	44
3.2.1.	Lokasi Penelitian.....	44
3.2.2.	Jadwal Penelitian.....	45
3.3.	Latar/Setting Penelitian.....	45
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4.1.	Teknik Observasi.....	46
3.4.2.	Teknik Wawancara.....	48
3.4.3.	Teknik Studi Dokumentasi.....	48
3.5.	Teknik Analisis Data.....	51
3.6.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1.	Gambaran Umum Lokasi/Lokus.....	56
4.1.1.	Profil Administratif dan Geografis.....	56
4.1.2.	Kondisi Demografi dan Struktur Penduduk.....	57

4.1.3.	Kondisi Sosial Ekonomi.....	58
4.1.4.	Konteks Politik Lokal.....	58
4.2.	Hasil Penelitian.....	59
4.2.1.	Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.....	59
4.2.1.1.	Perspektif Akademis, Tipologi Partisipasi Milenial sebagai Gladiator Digital.....	59
4.2.1.2.	Kualitas Partisipasi, Pandangan Anggota DPRD dan Otoritas Legislatif.....	60
4.2.1.3.	Pengawasan Pemilu, Data Lapangan Kehadiran dan Kemandirian Pemilih.....	61
4.2.1.4.	Tipologi Motivasi Milenial, Antara Harapan Ekonomi dan Idealisme.....	63
4.2.1.5.	Peran Tokoh Masyarakat dan Agama dalam Mobilisasi Milenial.....	67
4.2.1.6.	Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Partisipasi Politik.....	68
4.2.2.	Bentuk-bentuk dan pola <i>Money politics</i> yang terjadi dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.....	70
4.2.3.	Fenomena <i>Money politics</i> dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.....	81
4.3.	Pembahasan Temuan penelitian.....	92

4.3.1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.....	93
4.3.2. Analisis Bentuk-bentuk dan Pola Money Politics, Infiltrasi Transaksional dalam Struktur Urban Kelurahan Petukangan Utara.....	96
4.3.3. Fenomena <i>Money politics</i> dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial, Rasionalitas Pragmatis dalam Bayang-bayang Krisis Integritas	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....112

5.1. Kesimpulan.....	112
5.1.1. Interpretasi Dan Verifikasi Fenomena <i>Money politics</i> Serta Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial.....	112
5.1.2. Interpretasi Temuan Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial: Verifikasi Teori Partisipasi dan Karakteristik Generasi	112
5.1.3. Verifikasi Temuan Bentuk Dan Pola Praktik Money Politics: Dari Konvensional Hingga Digitalisasi Transaksional.....	116
5.1.4. Analisis Respon Dan Keputusan Politik Generasi Milenial, Verifikasi Teori Pilihan Rasional Dan Perilaku Pemilih.....	119
5.1.5. Sintesis Teoretis, Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi Dan Kepemimpinan Nasional.....	121
5.1.6. Kesimpulan Akhir, Jawaban Konkret Terhadap Rumusan Masalah.....	124
5.2. Saran.....	126
5.2.1. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).....	126

5.2.2. Pemerintah dan Lembaga Eksekutif.....	127
5.2.3. Masyarakat dan Generasi Milenial.....	128
5.2.4. Parpol (Partai Politik)	129
5.2.5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	137
1. Pedoman Observasi	139
2. Pedoman Wawancara	141
3. Catatan Lapangan Hasil Observasi	150
4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip)	153
5. Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)	213
6. Dokumen Ijin Penelitian	220
RIWAYAT HIDUP	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Gambaran Kasus Politik Uang Berdasarkan Beberapa Sumber.....	4
Tabel 2. 1. Hasil penelitian yang relevan	37
Tabel 2. 2. Operasional Konsep.....	41
Tabel 3. 1. Rencana Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 3. 2. Daftar Narasumber Usulan Penelitian	53
Tabel 4. 1. Aspek pengawasan dan implikasinya berdasarkan temuan	62
Tabel 4. 2. Motivasi responden, status partisipasi dan sumber informasi.....	66
Tabel 4. 3. Matriks Bentuk Instrumen <i>Money politics</i> di Petukangan Utara.....	72
Tabel 4. 4. Pola Distribusi <i>Money politics</i> di Wilayah Urban Petukangan Utara.	78
Tabel 4. 5. Perbandingan Respon Milenial Berdasarkan Latar Belakang.....	88
Tabel 4. 6. Relevansi Konsep/Teori dari hasil temuan terhadap dimensi partisipasi politik.....	94
Tabel 4. 7. Kategori, instrument dan pola distribusi sesuai teori pada Bab II.....	97
Tabel 4. 8. Karakteristik Responden/Narasumber.....	100
Tabel 4. 9. Atribut Strauss & Howe, Manifestasi & dampak Keputusan politik.	105
Tabel Lampiran Pedoman Observasi.....	138
Tabel Lampiran Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	40
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	59
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	61
Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	157
Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip)	160
Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen).....	222
Dokumen Ijin Penelitian.....	226

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah momen penting yang tidak hanya menentukan pemimpin negara, tetapi juga mencerminkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik *Money politics* atau politik uang.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan kepada rakyat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Elemen penting dalam demokrasi adalah pemilu yang menjadi salah satu indikator kualitas berjalannya demokrasi. Indonesia menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali. Demokrasi memiliki kaitan yang begitu erat dengan pemilu, namun pengkaitan pemilu dengan demokrasi tersebut hanya dapat dilakukan saat pemilu yang akan dilakukan dapat mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sebuah sirkulasi di dalam kekuasaan.¹ Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

¹ Sri H. Puspitasari, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu," *Ius Quia Iustum Law Journal* 11, no. 25 (Januari 2004), hlm.135-148

Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik”.²

Politik uang merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan imbalan materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini merupakan tantangan serius dalam menerapkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Realitas ini tidak hanya merusak etika politik, tetapi juga menciptakan iklim politik yang transaksional dan merugikan demokrasi. *Money politics* yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu dan hampir di semua daerah di Indonesia. Berbagai penelitian dan laporan media telah mengungkapkan adanya praktik *Money politics* di berbagai daerah, sehingga mempengaruhi proses demokrasi dan legitimasi pemilu. Salah satu kelompok pemilih yang sangat strategis dan berpotensi dalam menentukan arah demokrasi adalah generasi milenial, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Dalam pemilu 2024, generasi milenial dan generasi Z menyumbang hampir 60% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan jumlah yang besar tersebut, pandangan, sikap, dan partisipasi generasi milenial terhadap praktik *Money politics* menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Meskipun generasi

² Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang* (Jakarta: Maarif Institute, 2011), hlm 45.

milennial dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka, kritis, dan melek teknologi, kenyataannya mereka tidak sepenuhnya imun terhadap pengaruh politik uang. Beberapa dari mereka memilih untuk tetap berpartisipasi dengan menerima imbalan, sementara yang lain justru merasa kecewa dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap korup. Rangkuman dari laporan media dan akademis mengenai kasus-kasus politik uang di Indonesia:

- **Pilkada dan Pileg:** Studi dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan laporan lembaga seperti ICW, menunjukkan bahwa praktik politik uang marak terjadi baik pada pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Contohnya, dalam laporan ICW, ditemukan 313 kasus politik uang pada Pileg 2014, dengan Banten menjadi provinsi dengan pelanggaran terbanyak.
- **Bentuk Praktik:** Bentuk *Money politics* sangat beragam, tidak hanya sebatas pemberian uang, tetapi juga barang (sembako), serta janji-janji proyek pembangunan infrastruktur atau subsidi. Praktik ini sering dilakukan menjelang hari H pemilu, yang dikenal dengan istilah “serangan fajar.”
- **Target dan Dampak:** Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah seringkali menjadi target utama. Namun, praktik ini juga menyasar pelajar dan pemilih muda. Laporan dari ICW menyebutkan bahwa banyak pelajar di Banten mengaku menerima amplop berisi uang dengan jumlah bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu menjadi penghalang bagi praktik politik uang. Laporan lain dari Universitas Andalas mencatat

bahwa 35% responden di Pemilu 2024 mengakui bahwa uang memengaruhi pilihan mereka.

- Respon Lembaga: Lembaga seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berupaya menindak dan mencegah praktik ini. KPK bahkan meluncurkan kampanye "Hajar Serangan Fajar" menjelang Pemilu 2024 sebagai respon terhadap tingginya praktik politik uang. Namun, penegakan hukum dan sanksi masih menjadi tantangan.

Laporan & Temuan Terkait Pilpres 2024

- Pengaruh terhadap Pemilih: Laporan dari Universitas Andalas mencatat bahwa 35% responden di Pemilu 2024 mengakui bahwa uang memengaruhi pilihan mereka. Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari praktik politik uang terhadap preferensi pemilih.
- Target Utama: Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah seringkali menjadi sasaran empuk. Namun, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan bahwa praktik ini menyasar pelajar dan pemilih muda. Beberapa pelajar di Banten bahkan mengaku menerima amplop berisi uang dengan jumlah bervariasi.

Tabel 1.1. Gambaran Kasus Politik Uang Berdasarkan Beberapa Sumber

Pemilihan Umum	Temuan Kasus	Lembaga Pengawas Pemilu/Survei
Pemilu Legislatif 2014	313 kasus politik uang yang ditemukan dalam Pemilu Legislatif 2014. Angka ini disebutkan naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009.	Indonesia Corruption Watch (ICW)

Pilkada 2018	Bawaslu memproses 35 kasus dugaan politik uang dalam Pilkada 2018, dengan kasus terbanyak di Sulawesi Selatan.	Bawaslu
Pemilu Serentak 2019	Bawaslu mencatat adanya 6.649 temuan pelanggaran pemilu secara keseluruhan, di mana 548 di antaranya merupakan pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Dari pelanggaran pidana tersebut, politik uang disebut sebagai pelanggaran tertinggi. Laporan dari berbagai lembaga survei, termasuk yang dikutip dalam jurnal-jurnal ilmiah, menyebutkan bahwa tingkat keterpaparan <i>Money politics</i> berkisar antara 19,4% hingga 33,1% dari pemilih.	Bawaslu dan Indikator Politik Indonesia
Pemilu Serentak 2024	Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 35% responden di Pemilu 2024 menyatakan bahwa pilihan mereka ditentukan oleh pemberian uang.	Indikator Politik Indonesia

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Aspek lainnya yang paling penting dalam negara demokrasi yaitu adanya partisipasi politik. Jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah partisipasi politik, partisipasi politik merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam demokrasi (*cornerstone of democracy*), akan tetapi adanya partisipasi masyarakat secara langsung di dalam proses politik masih memiliki ambivalensi.³ Peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi dalam partisipasi politik, adalah Pilpres.

³ Tia Subekti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)," 2014, <https://www.neliti.com/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe>.

Beberapa alasan mengapa partisipasi politik, khususnya dalam pemilu, sangat penting adalah terciptanya pemerintahan yang sah, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan cara utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara. Partisipasi politik memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sah dan demokratis, dengan pemimpin yang terpilih berasal dari kehendak rakyat. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu pilar utama dari demokrasi. Ketika rakyat berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin, mereka turut memastikan bahwa sistem politik tetap terbuka, akuntabel, dan representatif. Ini membantu menjaga kepercayaan terhadap institusi negara dan mencegah otoritarianisme. Partisipasi politik masyarakat pada saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi dan sistem politik yang sedang berjalan di negara tersebut. Hingga saat ini sistem politik di Indonesia telah berulang-kali mengalami perubahan, yang dimulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini.

Banyak masyarakat yang beranggapan mengenai reformasi yang dirasakan sebagai masa yang lebih demokratis. Pemilu menjadi bagian dari penataan struktur kekuasaan negara dalam wujudnya menciptakan mekanisme kontrol dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemilu merupakan salah satu komponen terpenting dalam masyarakat demokratis. Menurut Sobolim, Perilaku Politik (*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.⁴

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.⁵ Dengan berpartisipasi dalam pemilu, warga negara tidak hanya menjalankan hak pilih mereka, tetapi juga dapat mengungkapkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap arah negara. Partisipasi ini memberi suara pada isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, dari ekonomi hingga kebijakan sosial. Partisipasi dalam pemilu juga berperan dalam mencegah ketegangan sosial dan politik. Ketika warga negara merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih puas dengan hasil pemilu, mengurangi potensi protes atau konflik.

Partisipasi dalam pemilu adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam masyarakat demokratis. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih, yang merupakan ekspresi dari kebebasan individu dalam menentukan nasib bangsa. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu, kandidat dan partai politik akan lebih mendengarkan dan merespon kebutuhan serta harapan rakyat. Ini mengarah pada

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, IX (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

proses politik yang lebih terbuka, dengan kandidat yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipasi Pilpres adalah bagian integral dari kehidupan demokrasi yang memastikan bahwa negara dikelola oleh pemimpin yang dipilih secara bebas dan adil oleh rakyat. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk aktif berpartisipasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang menjadi sarana bagi rakyat untuk secara langsung menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil rakyat maupun kepala negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting dari berjalannya proses demokratisasi di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, partisipasi politik masyarakat terus menjadi perhatian, terutama dalam melihat keterlibatan kelompok-kelompok tertentu, salah satunya adalah pemilih pemula.

Generasi milenial, yang umumnya merujuk pada mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996⁶, memiliki sejumlah karakteristik tertentu dalam berpolitik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Beberapa karakteristik tersebut meliputi: Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial: Milenial sangat terhubung dengan teknologi dan media sosial. Mereka cenderung lebih mudah mendapatkan informasi politik melalui platform digital, seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, serta terlibat dalam diskusi politik secara online.

⁶ Pew Research Center, "Generations Defined," diakses 20 april 2025, <https://www.pewresearch.org/topic/generations-and-age/>

Media sosial juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan mengorganisir aksi-aksi politik. Anak muda generasi milenial di pemilu kali ini terlihat memiliki pandangan yang lebih luas, sikap yang antusias, dan ketertarikan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, apakah tingginya antusiasme dan ketertarikan tersebut berarti para anak muda benar-benar aware dengan pentingnya politik, pemilu, para calon, serta visi dan misi mereka?

Kesadaran politik didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang mengetahui tentang hal-hal, institusi, dan gagasan penting yang berhubungan dengan sistem politik.⁷ Generasi muda dengan perkembangan teknologi terkenal adaptif dengan perkembangan-perkembangan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelopor perubahan. Salah satu perubahan paling menonjol yang dapat dikaji pada pemilu kali ini adalah cara berkampanye untuk menarik suara generasi muda melalui media sosial.

Begitu pula dalam keterlibatan dalam Gerakan Sosial Milenial lebih cenderung terlibat dalam gerakan sosial atau protes yang berfokus pada isu-isu keadilan sosial, lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka lebih mendukung perubahan sosial yang mencakup aspek keberagaman, inklusivitas, dan hak-hak minoritas. Banyak milenial yang merasa skeptis terhadap partai politik tradisional dan institusi pemerintah. Mereka lebih tertarik pada politik berbasis isu daripada politik yang terikat pada ideologi atau partai tertentu. Sikap

⁷ Verba, Sidney, and Norman H. Nie. *Participation in America: Political Equality and the People*. New York: Harper & Row, 1972, hlm. 201-205.

ini membuat mereka lebih memilih untuk mendukung kandidat atau gerakan yang dianggap autentik dan pro-rakyat, meski tidak selalu berasal dari kalangan politik mainstream.

Generasi milenial lebih mengutamakan fleksibilitas, keterbukaan, dan pendekatan praktis untuk menyelesaikan isu-isu politik dan sosial. Media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi pendapat masyarakat dimanfaatkan oleh para politikus sebagai media kampanye. Selain biaya operasional yang lebih rendah, kampanye melalui media sosial memudahkan politikus menjangkau lebih banyak masyarakat dengan cepat. Melihat keberhasilan kampanye dengan menggunakan media sosial pada Pemilu 2024, strategi komunikasi politik ini mungkin akan kembali digunakan di pemilu berikutnya. Meskipun begitu, gaya kampanye tradisional yang lebih nyata dan dekat dengan masyarakat juga masih terbukti efektif menggaet massa sehingga strategi ini mungkin juga akan diterapkan di pemilu berikutnya.⁸

Sebagai usulan penelitian terkait partisipasi politik generasi milenial, penulis memilih Kelurahan Petukangan Utara, sebagai locus untuk diteliti. Kelurahan Petukangan Utara terletak di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah administratif Jakarta yang lebih besar. Petukangan Utara dikenal dengan perpaduan antara area pemukiman, komersial, dan industri, dengan komunitas yang terus berkembang dan beragam layanan lokal. Kelurahan petukangan utara,

⁸ LM Psikologi UGM, "Partisipasi Anak Muda Dalam Pemilu 2024: Kajian Psikologis Mengenai Kesadaran Politik Pemuda Indonesia," 2024

kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan, merupakan salah satu wilayah urban yang mengalami pertumbuhan penduduk muda cukup pesat. Dinamika sosial dan politik di wilayah ini menjadi representasi menarik untuk mengkaji partisipasi politik generasi milenial dalam konteks lokal. Selain itu, keberagaman latar belakang sosial, pendidikan, serta akses terhadap informasi di wilayah ini memberikan warna tersendiri terhadap pola partisipasi politik masyarakatnya. Petukangan Utara terletak di bagian selatan Jakarta, dan berbatasan dengan area lain seperti Pesanggrahan, Petukangan Selatan, dan distrik lain di Jakarta Selatan. Area ini memiliki akses ke jalan utama dan rute transportasi yang menghubungkan ke bagian lain Jakarta, menjadikannya area yang terhubung dengan baik bagi penduduk dan bisnis. Petukangan Utara dilengkapi dengan infrastruktur lokal, termasuk sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tempat rekreasi. Populasi yang beragam, dengan campuran penduduk kelas menengah ke bawah. Ada juga bisnis lokal dan pedagang kaki lima yang melayani masyarakat. Kelurahan ini merupakan salah satu kawasan berkembang di Jakarta, yang diuntungkan oleh pembangunan perkotaan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai fenomena politik uang (*money politics*) dan respon partisipasi politik generasi milenial, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, penulis mengajukan usulan penelitian yang berjudul **"*Money politics* Dan Respon Generasi Milenial (Studi Kasus: Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)"**.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Money politics Dan Respon Generasi Milenial, Studi Kasus Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

1.2.2. Subfokus Penelitian

Untuk menguraikan fokus utama penelitian, penulis menetapkan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini berfokus pada tingkat dan cara partisipasi politik dari generasi milenial. Meneliti seberapa besar keterlibatan mereka dalam pemilu, apakah mereka memilih untuk berpartisipasi (misalnya dengan mencoblos) atau justru memilih untuk tidak berpartisipasi, dan mengapa mereka membuat keputusan tersebut.
2. Bentuk-bentuk dan pola *Money politics* yang terjadi dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini akan mengidentifikasi berbagai macam bentuk praktik *Money politics* yang terjadi di lapangan, serta pola-pola penyalurannya di kalangan pemilih milenial.
3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Subfokus ini bertujuan untuk

mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena politik uang itu sendiri terjadi dan bagaimana pemilih milenial meresponnya.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?
2. Bagaimana bentuk-bentuk dan pola praktik *Money politics* dikalangan generasi milineal yang terjadi selama masa Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?
3. Bagaimana *Money politics* mempengaruhi respon dan keputusan politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
2. Menganalisis bentuk praktik *Money politics* dikalangan generasi milineal yang terjadi di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Pilpres Tahun 2024

3. Menganalisis Respon dan keputusan politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan adanya fenomena *Money politics* pada Pilpres Tahun 2024

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang ilmu politik, khususnya terkait kajian mengenai praktik politik uang (*money politics*) dan respon pemilih generasi milenial dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu serta lembaga pengawas (seperti KPU dan Bawaslu) mengenai pola dampak *Money politics* terhadap partisipasi politik Masyarakat di Indonesia khususnya generasi milenial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Politik

Teori politik adalah studi tentang konsep, prinsip, dan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Berbagai ahli telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang teori politik, masing-masing dengan fokus dan perspektif yang unik. Dalam studi ilmu politik, konsep kekuasaan merupakan elemen sentral yang terus dikaji, dan Miriam Budiardjo memberikan penekanan khusus pada pemahaman mendalam mengenai kekuasaan. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan kehendaknya, bahkan jika orang lain tersebut menentangnya⁹. Kekuasaan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti kepemilikan sumber daya, kekuatan fisik, pengetahuan, atau pengaruh sosial. Dalam konteks politik, kekuasaan seringkali diwujudkan melalui institusi negara dan proses pengambilan keputusan kolektif.

Berkaitan erat dengan kekuasaan adalah konsep otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang diterima atau dianggap sah oleh orang-orang yang tunduk padanya. Berbeda dengan kekuasaan yang bisa dipaksakan, otoritas didasarkan pada persetujuan atau pengakuan. Seseorang atau institusi dianggap memiliki otoritas jika orang lain mengakui haknya untuk memerintah atau membuat

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.26.

keputusan. Miriam Budiardjo menggarisbawahi bahwa otoritas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang stabil dan efektif .

Legitimasi merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah atau penguasa. Sebuah rezim atau pemerintahan dianggap memiliki legitimasi jika mayoritas masyarakat mempercayai dan menerima haknya untuk berkuasa. Legitimasi dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum yang demokratis, tradisi, atau karisma pemimpin. Tanpa legitimasi, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung tidak stabil dan rentan terhadap oposisi atau pemberontakan. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa legitimasi adalah fondasi penting bagi kelangsungan suatu sistem politik, karena ia menciptakan kepatuhan sukarela dari warga negara¹⁰. Ketiga konsep ini – kekuasaan, otoritas, dan legitimasi – saling terkait dan membentuk dasar pemahaman mengenai bagaimana politik beroperasi dalam suatu masyarakat.

Ilmu politik tidak hanya berhenti pada studi tentang struktur negara dan pemerintahan, tetapi juga mencakup analisis mendalam mengenai perilaku politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Miriam Budiardjo menekankan bahwa memahami bagaimana warga negara berinteraksi dengan sistem politik, termasuk dalam hal partisipasi, adalah esensial untuk mengerti cara kerja politik secara keseluruhan. Perilaku politik merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan oleh warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.35.

Machiavelli mendekati politik dengan pandangan yang sangat realistis dan pragmatis, seringkali disebut sebagai "realpolitik." Inti dari pandangan politik Machiavelli adalah bahwa politik adalah tentang kekuasaan. Tujuannya bukanlah untuk mencapai keadilan moral atau masyarakat ideal, melainkan untuk memperoleh, menjaga, dan memperluas kekuasaan negara. Bagi Machiavelli, seorang penguasa (atau "pangeran") yang efektif adalah dia yang mampu menjaga stabilitas dan kekuatan negaranya.¹¹

Aspek paling radikal dan terkenal dari pemikiran Machiavelli. Ia berpendapat bahwa dalam dunia politik yang kejam dan tidak pasti, seorang penguasa tidak bisa selalu bertindak sesuai dengan standar moralitas Kristen atau etika tradisional (seperti kebaikan, kemurahan hati, kejujuran)¹².

- "Tujuan Menghalalkan Cara", meskipun Machiavelli tidak pernah secara eksplisit menulis frasa ini, gagasan tersebut merangkum esensi pemikirannya. Ia percaya bahwa seorang penguasa harus siap melakukan tindakan yang secara moral buruk seperti menipu, kejam, atau tidak setia jika itu diperlukan untuk menjaga negara dan kesejahteraan rakyat.
- Kebutuhan versus Moral, bagi Machiavelli, ada perbedaan besar antara bagaimana politik seharusnya berjalan (ideal) dan bagaimana politik benar-benar berjalan (realitas). Dalam politik, yang penting adalah efektivitas dan hasil.

¹¹ Niccolò Machiavelli, *The Prince*, trans. Harvey C. Mansfield (Chicago: University of Chicago Press, 1998), hlm.92.

¹² Ibid., hlm. 61.

- "Baik" dan "Buruk" dalam Politik: Tindakan "baik" dalam politik adalah tindakan yang berhasil menjaga kekuasaan dan negara. Tindakan "buruk" adalah tindakan yang menyebabkan kelemahan atau kehancuran negara, terlepas dari niat moralnya.

2.1.2. Teori Partisipasi Politik

Menurut Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung¹³. Bentuk partisipasi ini bisa berupa pemberian suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, atau menjadi anggota partai politik. Dalam konteks generasi milenial, partisipasi politik dapat dimanifestasikan dalam bentuk voting, kampanye digital, serta pengawasan proses pemilu melalui media sosial.

David Held mengungkapkan bahwa perkembangan demokrasi pada era klasik (khususnya Athena) telah menjelma menjadi sumber penting dari inspirasi pemikiran politik sampai pada periode kontemporer ini. Prinsip utama model demokrasi klasik adalah bahwa semua warga negara harus menikmati kesetaraan, kemerdekaan dan keadilan di bidang politik agar mereka bebas untuk memerintah dan juga diperintah secara bergiliran. Demokrasi di era Athena ditandai dengan komitmen masyarakat pada prinsip kebajikan sipil, yaitu dedikasi pada negara kota yang berbentuk republik dan mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak dari kepentingan pribadi. Di samping itu, warga negara memegang

¹³ Samuel P Huntington and Joan M Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm.3.

kekuasaan tertinggi untuk mengatur legislasi dan fungsi-fungsi yudisial. Selain itu, secara konseptual menganjurkan bahkan mengharuskan warga negara memiliki peran dalam fungsi-fungsi tersebut dengan berpartisipasi langsung dalam urusan negara¹⁴.

Prinsip utama model demokrasi pluralis adalah terciptanya jaminan terhadap kelompok minoritas dan ada kebebasan berpolitik bagi warga negaranya. Robert A. Dahl adalah salah satu ilmuwan kunci yang menjadi acuan dalam membincang model demokrasi pluralis ini. Secara sederhana, Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas organisasi-organisasi) yang relatif otonom di dalam sebuah negara, negara dapat disebut demokratis jika di dalamnya menjamin kehadiran organisasi-organisasi yang bersifat otonom dari dan/atau terhadap negara. Maka dari itu, Dahl mengharuskan pada setiap negara demokratis mengejawantahkan praktek demokrasi pluralis tersebut di negara masing-masing¹⁵.

Dahl menyarankan bahwa untuk mencapai demokrasi yang efektif, suatu negara harus memenuhi delapan kondisi dasar, yang dikenal dengan kriteria *polyarchy*:¹⁶

- Kebebasan untuk mengkritik pemerintah.
- Kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

¹⁴ David Held, *Models of Democracy* (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007), hlm.270.

¹⁵ Robert A Dahl and Sahat (Translator) Simamora, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi Dan Kontrol* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm.8.

¹⁶ Robert A Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm.233

- Kebebasan berbicara dan kebebasan pers.
- Pemilu yang bebas dan adil.
- Hak memilih yang universal.
- Partai politik yang kompetitif.
- Akses terhadap informasi yang memadai bagi publik.
- Pemilihan yang bebas dan tidak terkooptasi oleh kekuatan ekonomi atau politik.

2.1.3. Teori Perilaku Pemilih

Teori perilaku pemilih (*Voter Behavior Theory*) adalah kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa individu memilih, berpartisipasi, atau abstain dalam pemilu. Teori ini sering digunakan dalam studi politik untuk menganalisis pengaruh faktor internal seperti sikap pribadi) dan eksternal seperti *Money politics* terhadap perilaku pemilih. Dalam penelitian ini, teori ini relevan karena dapat membantu menjelaskan bagaimana *Money politics* memengaruhi motivasi generasi milenial untuk berpartisipasi, berdasarkan indikator operasional yang penulis sebutkan sebelumnya (misalnya, persepsi terhadap praktik politik uang dan alasan memilih/tidak memilih).

Miriam Budiardjo mendefinisikan *voting behavior*¹⁷ sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.26.

mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnnya, dan sebagainya¹⁸.

Menurut Mahendra, perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu¹⁹. Kemudian, Kristiadi mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*²⁰. Teori ini biasanya bersifat eksploratif, yang cocok untuk pendekatan kualitatif, di mana penulis dapat menganalisis data wawancara atau observasi untuk memahami nuansa perilaku pemilih di Kelurahan Petukangan Utara.

Dalam teori politik, "Teori Pilihan Rasional" mengusulkan agar individu dan kelompok membuat keputusan dengan mengevaluasi biaya dan manfaat secara rasional, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan diri atau utilitas mereka sendiri. Ini adalah pendekatan mendasar untuk memahami perilaku dan hasil politik. Berikut penjelasan yang lebih rinci:²¹

a. Aktor Rasional

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.27.

¹⁹ A A Oka Mahendra, *Pemilu Pilkada 2005: Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal* (Jakarta: Milenium Publisher, 2005), hlm.45.

²⁰ Joseph Kristiadi, "Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih Di Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 1987-1992" (Universitas Gajah Mada, 1994), hlm.76.

²¹ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper & Brothers, 1957), hlm.27.

Asumsi intinya adalah bahwa individu adalah aktor rasional yang berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan mempertimbangkan pilihan yang tersedia dan memilih yang menawarkan manfaat bersih terbesar.

b. Kepentingan Diri

Pilihan politik sering kali didorong oleh kepentingan diri, yang dapat mengambil berbagai bentuk, seperti keuntungan ekonomi, kekuasaan, atau status sosial.

c. Analisis Biaya Manfaat

Individu dan kelompok diasumsikan terlibat dalam analisis biaya-manfaat sebelum membuat keputusan, dengan mempertimbangkan potensi konsekuensi dari tindakan mereka.

d. Teori Permainan

Teori ini sering menggunakan teori permainan untuk memodelkan interaksi antara banyak aktor, di mana hasilnya bergantung pada strategi semua yang terlibat.

e. Aplikasi

Ini digunakan untuk menjelaskan perilaku pemungutan suara, pilihan kebijakan, dan konflik politik, antara lain.

f. Keterbatasan

Teori ini dikritik karena menganggap bahwa individu selalu rasional dan berpotensi mengabaikan faktor-faktor seperti emosi, nilai, dan norma sosial. Intinya, Teori Pilihan Rasional menyediakan kerangka kerja untuk memahami perilaku politik

dengan menganggap bahwa individu bertindak secara strategis untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, dalam batasan lingkungan mereka.

Berdasarkan pengaruh *Money politics* dan karakteristik generasi milenial (seperti sensitivitas terhadap etika dan akses informasi digital). Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) menurut Anthony Downs²², pemilih bertindak secara rasional berdasarkan manfaat dan biaya, di mana mereka memilih kandidat yang memberikan imbalan maksimal. Faktor eksternal seperti *Money politics* dapat memengaruhi perhitungan rasional ini. *Money politics* dapat dilihat sebagai "insentif" yang memengaruhi keputusan generasi milenial. Misalnya, jika pemilih merasa praktik ini mengurangi legitimasi pemilu, mereka mungkin memilih abstain. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis indikator seperti motif pemberian uang dan alasan pemilih tidak berpartisipasi di Kelurahan Petukangan Utara.

2.1.4. Teori Money Politics

Money politics yang umum kita kenal merupakan praktik pemberian uang atau bentuk imbalan lainnya untuk memperoleh dukungan politik, dengan berbagai bentuknya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas pemilu yang jujur dan adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *money politic* adalah sama hal dengan suap, arti kata suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sogok²³. Jadi Politik uang ialah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/

²² Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper & Brothers, 1957), hlm.27

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), s.v. "money politic" dan "suap."

keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Indikator operasional²⁴. Sementara menurut Ismawan politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan Tingkat desa²⁵.

Secara umum, *Money politics* sering diartikan sebagai tindakan jual beli suara (*vote buying*) pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Ini adalah upaya untuk mempengaruhi perilaku pemilih dengan menggunakan imbalan tertentu, baik berupa uang tunai, barang, jasa, atau janji keuntungan ekonomi lainnya. Konsep ini menyoroti bahwa kedaulatan rakyat yang seharusnya murni, bisa "dibeli" demi kepentingan politisi atau partai. Menurut Juliansyah, *Money politics* adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi atau dapat diartikan sebagai "jual beli suara" pada proses politik.²⁶ Tindakan ini bisa berupa pembagian uang dari politisi atau partai kepada pemilih untuk memengaruhi suara mereka saat hari pemilihan.

Pengalaman atau paparan terhadap pemberian uang/barang pada sebelum pemilu dan sudah berlangsung dari pemilu ke pemilu, menjadi sebuah persepsi terhadap pemberian tersebut (apakah dianggap biasa, salah, atau sebagai

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), s.v. "politik uang."

²⁵ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hlm.42.

²⁶ Juliansyah, Elvi. 2007. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

bentuk "bantuan"). Bentuk-Bentuk *Money politics* menurut Ahmad, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk Money Politics, sebagai berikut:²⁷

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudarakembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacanastrategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga sebagai bagian "berkah". Politik pencitraan dan tebar pesona melalui "jariyah politis" ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana

²⁷ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai & Budaya Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), hlm.78.

umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Dalam penelitian ini bentuk *money politic* berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain yang ditujukan kepada generasi milenial.

2.1.5. Generasi Milenial dan Karakteristik Politiknya

Menurut Mannheim, generasi adalah kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia dan pengalaman dalam mengikuti sebuah atau berbagai peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama. Dan selanjutnya individu ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena mereka melewati masa sosio-sejarah yang sama²⁸.

Menurut Strauss dan Howe²⁹, Milenial secara umum didefinisikan sebagai mereka yang lahir setelah tahun 1980 dan lulus SMA setelah tahun 2000. Meskipun demikian, rentang tahun kelahiran spesifik sedikit bervariasi di berbagai sumber yang mengacu pada karya mereka, namun secara konsisten menempatkan mereka antara awal 1980-an hingga awal 2000-an. Beberapa sumber menyebutkan rentang 1981-2000, sementara yang lain mencantumkan 1982-2004, atau 1982-2001. Anggota tertua dari generasi ini digambarkan sebagai angkatan SMA tahun 2000. Penting untuk dicatat bahwa Strauss dan Howe sendiri menyatakan bahwa "tidak ada batasan generasi yang pasti" dan "kecepatan perkembangan mereka tidak

²⁸ Karl Mannheim, "The Problem of Generations," dalam *Essays on the Sociology of Knowledge* (New York: Routledge & Kegan Paul, 1952), hlm.291.

²⁹ Strauss, William, and Neil Howe. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow and Company, 1991, hlm.335

dapat diprediksi," menunjukkan adanya tingkat fleksibilitas dalam definisi tahun kelahiran mereka. Keragaman dalam rentang tahun ini juga tercermin dalam diskusi publik, di mana beberapa individu Milenial merasa kurang terhubung dengan definisi yang luas.

- Karakteristik Inti Generasi Milenial

Karakteristik Milenial ini sebagian besar diuraikan dalam karya Strauss dan Howe *Millennials Rising*, yang memberikan gambaran mendalam tentang kepribadian kolektif mereka:

- Special (Istimewa), Milenial secara konsisten diperlakukan sebagai individu yang istimewa dan penting sejak kecil, seringkali menjadi generasi anak-anak yang paling diinginkan. Setiap tonggak sejarah mereka ditandai dengan perayaan dan pujian, yang mungkin menanamkan rasa berhak dan harapan akan umpan balik positif yang sering. Fenomena ini terkait erat dengan munculnya "budaya pro-anak" yang dipicu oleh meluasnya penggunaan alat kontrasepsi, yang berarti semakin sedikit bayi yang "tidak diinginkan" lahir, sehingga setiap anak yang lahir menjadi lebih "diinginkan" oleh orang tuanya. Mereka percaya bahwa mereka vital bagi bangsa dan tujuan orang tua mereka, serta merasa ditakdirkan untuk memecahkan masalah dunia yang gagal dipecahkan oleh generasi sebelumnya. Meskipun mengklaim menginginkan privasi, mereka mendambakan perhatian.

- Sheltered (Terlindungi), Milenial tumbuh besar dengan tingkat perlindungan yang sangat tinggi, mengalami era peningkatan langkah-langkah keamanan yang signifikan, seperti penggunaan kursi mobil yang ketat, tanda "bayi di dalam mobil," dan prosedur penguncian sekolah. Mereka jarang dibiarkan tanpa pengawasan, dan orang tua sering membela mereka, melindungi mereka dari konflik dan pengalaman tidak menyenangkan. Sebagai mahasiswa, karakteristik ini mungkin bermanifestasi sebagai harapan agar fakultas dan staf terus melindungi, mengasuh, dan bahkan menyelesaikan konflik mereka. Perlindungan berlebihan ini, yang sering disebut sebagai "helicopter parenting" oleh orang tua Boomer dan Gen X, merupakan faktor pembentuk utama dalam perkembangan mereka.
- Confident (Percaya Diri), Generasi Milenial digambarkan sebagai termotivasi, berorientasi pada tujuan, dan sangat percaya diri pada diri sendiri serta masa depan mereka. Mereka memiliki ekspektasi tinggi bahwa pendidikan tinggi akan mendorong mereka menuju kebesaran dan mungkin membanggakan kekuatan serta potensi generasi mereka. Mereka menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi, merasa terhubung erat dengan orang tua mereka, asertif, dan sangat yakin bahwa mereka "benar" dalam pandangan mereka. Di Kanada, generasi ini bahkan dikenal sebagai "Sunshine" generation, yang mencerminkan optimisme dan kepercayaan diri mereka.

- Team-Oriented (Berorientasi Tim), Milenial cenderung berorientasi pada kelompok daripada individualistis, terkadang rela mengorbankan identitas pribadi mereka untuk menjadi bagian dari tim. Mereka lebih menyukai kepemimpinan egaliter daripada hierarki yang kaku. Mereka membentuk kohort yang erat dan kohesif. Meskipun berorientasi kelompok dalam kohort mereka sendiri, mereka mungkin "dengan sopan" mengecualikan generasi lain. Mereka tidak ingin menonjol di antara rekan-rekan mereka, melainkan ingin dilihat sebagai bagian dari kelompok. Mereka tidak menyukai keegoisan dan sangat berorientasi pada pembelajaran layanan dan kesukarelaan. Karakteristik ini ditanamkan sejak usia muda, membentuk kecenderungan alami mereka untuk bekerja sama.
- Achieving (Berprestasi), Generasi Milenial menunjukkan tren peningkatan nilai akademik dan penurunan tingkat kejahatan. Fokus mereka pada pencapaian nilai bagus, kerja keras, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler menghasilkan tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Mereka memandang kuliah sebagai jalan langsung menuju pekerjaan bergaji tinggi dan kesuksesan, berpotensi mengabaikan gambaran yang lebih besar tentang tujuan pendidikan tinggi. Mereka didorong untuk memutuskan karir sejak dini, seringkali ditempatkan pada orientasi jalur karir sejak sekolah dasar. Fokus mereka lebih pada dunia pencapaian eksternal daripada

pengembangan pribadi. Berbeda dengan generasi Boomer yang menorehkan jejak di bidang humaniora dan seni, Milenial cenderung lebih menyukai bidang matematika dan sains.

- Pressured (Tertekan), Sebagai anak-anak, Milenial memiliki jadwal yang sangat padat, dengan setiap jam seringkali diisi dengan aktivitas terstruktur. Jadwal yang intens ini mungkin menyebabkan hilangnya permainan spontan, dan mereka mungkin kesulitan dalam mengelola waktu luang dan manajemen waktu secara umum. Sepanjang sekolah dasar, menengah, dan atas, mereka memiliki lebih banyak jam pekerjaan rumah dan lebih sedikit waktu luang dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka merasakan tekanan besar untuk berhasil, didorong keras untuk berprestasi, menghindari risiko, dan memanfaatkan peluang. Mereka mungkin mengambil terlalu banyak tanggung jawab, dan kemudian berharap orang lain fleksibel ketika mereka ingin menegosiasikan konflik jadwal. Mereka sering percaya multitasking menghemat waktu dan merupakan hal yang cerdas untuk dilakukan, tetapi biasanya tidak menyadari kualitas hasil pekerjaan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, Strauss dan Howe menggambarkan Milenial secara positif, sebagai generasi yang "optimis dan terlibat," "jauh lebih tidak vulgar dan kasar," mengantar "kesopanan seksual baru," dan berpotensi menjadi "Generasi Hebat Berikutnya". Mereka juga digambarkan sebagai lebih banyak, lebih makmur, lebih terdidik, dan lebih beragam secara etnis.

2.1.6. Pemilihan Umum di Indonesia

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, liberalisasi hak – hak sipil dan politik warga negara.³⁰

Sesuai yang dinyatakan oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. proses pemilu harus dilakukan secara berkala karena berbagai alasan sesuai dalam bukunya yang berjudul ‘Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, 2006’ yaitu sebagai berikut ini:³¹

³⁰ Robert A Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm 3.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm.123

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri.
3. Perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters).
4. Pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.

Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan;
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif;
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili Masyarakat;

- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.³²

Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis, tentunya menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan melaksanakan kebijakannya secara murni dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan, yang dalam bahasa Jimly Asshiddiqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*)³³.

Jika merujuk pada pandangan diatas, semakin jelaslah bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi

³² Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia* (PPW-LIPI, 1997).

³³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, hlm.293

kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

2.1.7. Pemilihan Umum Presiden (PILPRES)

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) adalah salah satu momen paling penting dalam demokrasi Indonesia. Ini adalah proses di mana rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden mereka untuk masa jabatan lima tahun. Pilpres merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin tertinggi negara. Hasil Pilpres sangat menentukan arah kebijakan nasional, stabilitas politik, dan pembangunan negara selama lima tahun ke depan.

Gambaran umum tentang Pemilihan Umum Presiden di Indonesia:

Dasar Hukum:

Pilpres diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A dan Pasal 7³⁴.

- Detail pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (serta perubahannya, seperti UU Nomor 7 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022).
- Peraturan yang lebih teknis dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU) dan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bentuk Peraturan Bawaslu.

Sistem Pemilihan:

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A dan Pasal 7.

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini dimulai sejak Pemilu 2004.
- Calon Presiden dan Wakil Presiden maju dalam satu paket atau pasangan.
- Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon jika memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya. Saat ini, ambang batasnya adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
- Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah dengan sebaran minimal 20% suara di setiap provinsi di lebih dari separuh jumlah provinsi, maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua.

Penyelenggara dan Pengawas:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU):

Badan independen yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan Pemilu di semua tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota). KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki wewenang untuk menerbitkan peraturan teknis yang lebih rinci untuk melaksanakan amanat undang-undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini sifatnya lebih operasional dan mengatur detail tahapan Pemilu, termasuk Pilpres. PKPU terkait Pemilu Presiden:

- PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- PKPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum
- PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
- PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

KPU terus memperbarui dan menerbitkan PKPU sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Pemilu. Dokumen PKPU dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU (jdih.kpu.go.id).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

Badan independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses. Untuk menjalankan tugas pengawasannya, Bawaslu juga menerbitkan peraturan.

- Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan.
- Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Bertugas mengawasi kode etik penyelenggara Pemilu (anggota KPU dan Bawaslu) dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran etik.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dapat digunakan sebagai landasan teori, dukungan argumen, atau pembanding beberapa penelitian yang dapat penulis jadikan acuan. Penelitian ini fokus pada isu-isu seperti *money politics*, partisipasi pemilih (terutama generasi milenial), dan dinamika pemilu di Indonesia. Penulis memilih penelitian yang terkait karena:

- Mereka membahas pengaruh *Money politics* terhadap proses demokrasi.
- Penulis dapat mengadaptasikannya untuk konteks studi kasus penulis di Kelurahan Petukangan Utara.

Tabel 2. 1 Hasil penelitian yang relevan

No	Jenis Penelitian dan Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Hidayat,A. (2019)	Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang secara signifikan menurunkan kualitas	Ruang lingkup penelitian sama , yaitu partisipasi politik dalam pemilu.

		dalam Pemilu 2019	partisipasimasyarakat karena memilih bukan berdasarkan preferensi rasional, melainkan imbalan sesaat.	Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif Fokus Berbeda Fokus pada <i>money politic</i> pemilihan presiden 2024, penelitian terdahulu pada pemilu 2019
2.	Wahyuni,N. (2021)	"Sikap Generasi Milenial terhadap <i>Money politics</i> di Perkotaan	Sebagian besar milenial di wilayah perkotaan menolak politik uang dan melihatnya sebagai bentuk penghinaan terhadap suara rakyat. Namun, sebagian lainnya memandang hal itu sebagai hal yang wajar dan lumrah dalam konteks budaya politik transaksional.	Subyek penelitian sama, yaitu generasi milenial. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif Fokus Berbeda Fokus pada sikap <i>money politics</i> , sementara penulis pada partisipasi politik.
3.	Ramadhan, F. (2023)	Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilu 2024 Antara Idealisme dan Realitas Politik	Menyoroti dilema generasi muda antara idealisme demokrasi dan realitas praktik politik yang penuh transaksionalisme. Ditemukan bahwa edukasi politik berperan penting dalam membentuk sikap kritis terhadap politik uang.	Jenis penelitian sama adalah deskriptif kualitatif. Sama-sama fokus pada partisipasi politik Fokus berbeda

4.	Ivodia Palupi, Universitas Diponegoro Semarang 2024	Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 Di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang	Praktik politik uang dalam Pemilihan Presiden 2024 di Desa Widodaren menunjukkan bahwa fenomena ini tetap menjadi ancaman besar bagi demokrasi di tingkat lokal.	Metode penelitian kualitatif dan tektik yang digunakan Fokus yang berbeda, penulis lebih memfokuskan pada <i>money politic</i> pada generasi milenial.
5.	Ginting, Yogi Ananta dan Di one, Frans (2024)	Partisipasi Politik Generasi Milenial Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.	Keterlibatan milenial sebagai pelajar atau mahasiswa dalam kegiatan politik hanya pada penyebaran kampanye dan informasi politik melalui media sosial, karakter dari masing-masing masyarakat, bagaimana situasi politik yang terjadi, serta bagaimana upaya dalam pemberian pendidikan politik.	Jenis Penelitian sama yaitu kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus yang berbeda serta fokus pemilihan yang berbeda (pilkada dengan pilpres)

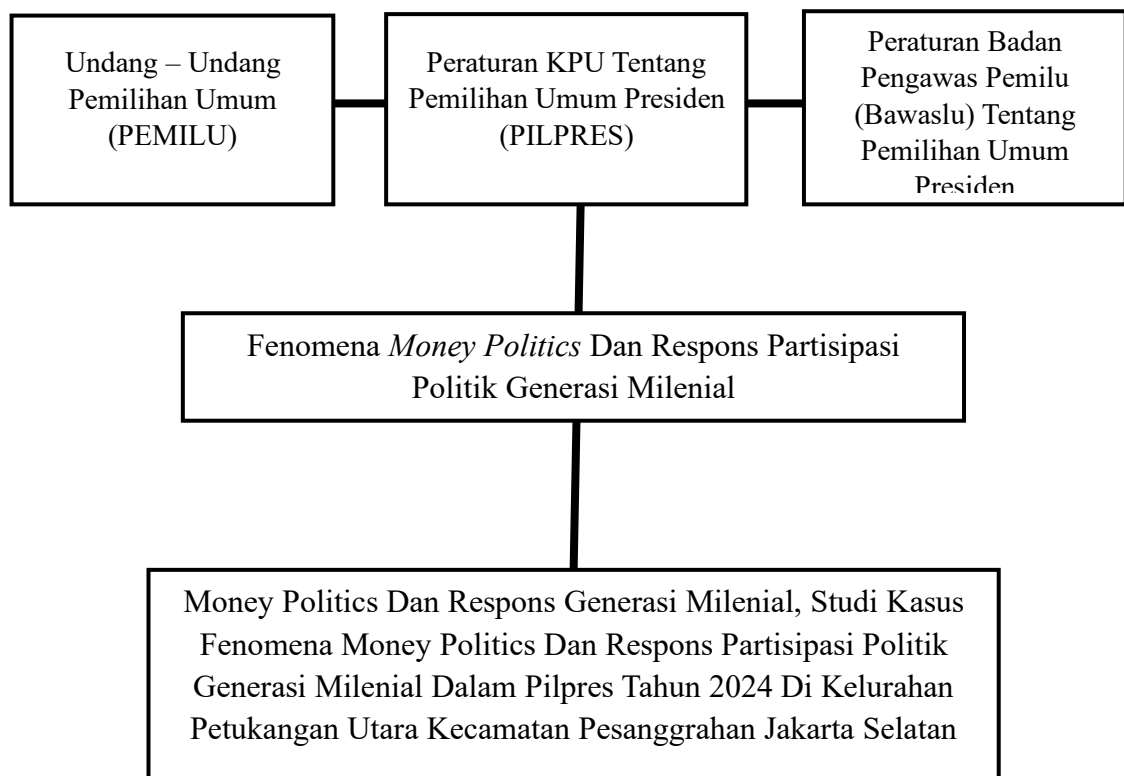
2.3. Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir bahwa praktik *Money politics* mempengaruhi keputusan generasi milenial untuk menggunakan hak pilihnya. Di satu sisi, milenial yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung menolak politik uang. Namun di sisi lain, masih terdapat kelompok milenial yang menerima praktik tersebut sebagai bagian dari "budaya politik" yang dianggap tidak

bisa dihindari. Tingkat literasi politik, tingkat pendidikan, akses informasi, dan pengalaman politik sebelumnya turut memengaruhi sikap tersebut.

2.3.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan menggambarkan alur berpikir peneliti dalam memahami dan menganalisis hubungan antara *Money politics* dan partisipasi generasi milenial dalam pemilu.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3.2. Operasional Konsep

Tabel 2. 2 Operasional Konsep

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Teknik Pengukuran
1.	Money Politics (Teori Pilihan Rasional oleh Anthony Downs, serta definisi oleh Ismawan)	- Praktik pemberian uang, barang, atau jasa oleh calon atau tim sukses untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih dalam konteks Pemilu Presiden 2024. - Janji Politik (Imbal Balik) - Tekanan/Intimidasi	- Ada atau tidaknya pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. - Ada atau tidaknya pemberian barang (sembako, pakaian, dll.) kepada pemilih. - Jumlah uang atau nilai barang yang diberikan. - Adanya janji pemberian pekerjaan / jabatan setelah pemilihan. - Adanya janji fasilitas umum atau bantuan spesifik	Pertanyaan Wawancara
2.	Partisipasi Politik Generasi Milenial Teori Partisipasi Politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson	- Keterlibatan generasi milenial dalam kegiatan politik, khususnya dalam bentuk pemberian suara pada Pemilu Presiden 2024. - Tingkat Partisipasi Pemilu (Pemungutan Suara) - Motivasi Partisipasi	- Kehadiran dalam kegiatan kampanye (rapat umum, pertemuan terbatas). - Keterlibatan dalam media sosial untuk mendukung /menyebarkan informasi tentang calon. - Keterlibatan dalam relawan atau tim sukses. - Kehadiran di Tempat Pemungutan Suara	Pertanyaan Wawancara

			(TPS) pada hari H. - Melakukan pencoblosan / pemungutan suara.	
3.	Generasi Milenial Teori Generasi oleh Mannheim, William Strauss dan Neil Howe	- Usia (Demografi) - Pendidikan (Demografi) - Pekerjaan (Demografi)	- Individu yang lahir antara tahun 1981–1996 (usia 27–43 tahun pada 2024), yang berdomisili di Kelurahan Petukangan Utara.	Pertanyaan Wawancara

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

2.4. Hipotesis

Penelitian ini merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Praktik *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara cenderung menurunkan partisipasi politik generasi milenial dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, karena menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi motivasi mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi.
2. Fenomena *Money politics* memiliki pengaruh negatif terhadap respon partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang ditunjukkan dengan kecenderungan apatis atau mendorong partisipasi yang bersifat transaksional/pragmatis.

3. Tingkat literasi politik, tingkat pendidikan, akses informasi, dan pengalaman politik sebelumnya juga turut memengaruhi sikap generasi milenial terhadap *Money politics* dan pada akhirnya memengaruhi keputusan partisipasi politik mereka. Generasi milenial yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung menolak praktik *money politics*. Sebagian kelompok generasi milenial lainnya mungkin menerima praktik *Money politics* sebagai bagian dari "budaya politik" yang dianggap tidak dapat dihindari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana fenomena *Money politics* memengaruhi partisipasi generasi milenial Pilpres tahun 2024 di lingkungan sosial tertentu, yakni Kelurahan Petukangan Utara. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi individu secara holistik dalam konteks kehidupan nyata.

Kriyantono menyatakan bahwa “riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas.³⁵

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah pemilih milenial yang cukup signifikan

³⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada, 2006), hlm 56-58

serta terdapat indikasi praktik *Money politics* yang teridentifikasi oleh berbagai laporan media maupun pengamatan sosial masyarakat.

3.2.2. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga Agustus 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN																							
	MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Usulan Penelitian																								
Seminar																								
Pengurusan Izin Penelitian																								
Pengumpulan Data																								
Analisis Data/Penyusunan Skripsi																								
Konsultasi Hasil																								
Pengurusan Ujian-ujian																								

Sumber: Diolah berdasarkan kalender Akademi STIP-AN Tahun 2022/2023

3.3. Latar dan Setting Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan sosial masyarakat di Kelurahan Petungkana Utara. Wilayah ini memiliki keberagaman latar belakang ekonomi dan sosial, serta keterwakilan generasi milenial yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari

masyarakat, baik melalui interaksi formal seperti wawancara maupun observasi informal terhadap dinamika politik di lingkungan tersebut selama dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan wawancara dan kegiatan menelaah dokumen. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.³⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

3.4.1. Teknik Observasi

Menurut Rachmat Kriyantono, **observasi** diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung (tanpa mediator) suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Observasi juga dapat dipahami sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam riset kualitatif³⁷.

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 109-110.

³⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 110.

Lokasi Observasi:

- Area Publik di Kelurahan Petukangan Utara.
- Aktivitas Komunitas, Pertemuan warga, kegiatan keagamaan, atau acara sosial yang relevan.
- Media Sosial Lokal/Grup Komunitas Online (dengan etika): Mengamati diskusi publik atau informasi yang beredar terkait Pemilu dan isu-isu lokal.

Aspek yang Diobservasi (dengan Panduan Catatan Lapangan):

- Indikasi Tidak Langsung *Money politics* (sangat hati-hati)
- Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Generasi Milenial
- Respon Komunitas Terhadap Isu Politik:
 - Bagaimana warga, termasuk milenial, menanggapi isu-isu politik yang muncul di lingkungan mereka.
 - Ekspresi apatisme atau antusiasme.

Prosedur Observasi:

1. Penentuan Fokus: Menentukan aspek-aspek kunci yang akan diamati secara spesifik.
2. Pembuatan Catatan Lapangan (Field Notes): Ini adalah alat utama observasi kualitatif. Catatan harus detail, deskriptif, dan memuat:
 - Tanggal, waktu, lokasi.
 - Deskripsi kejadian, perilaku, interaksi yang diamati.
 - Kutipan perkataan yang relevan.
 - Refleksi peneliti (pemikiran awal, perasaan, pertanyaan yang muncul).

3. Pelaksanaan: Mengunjungi lokasi dan mengamati secara sistematis. Berusaha tidak menarik perhatian berlebihan.
4. Analisis Awal: Membaca ulang catatan lapangan secara berkala untuk mengidentifikasi pola, tema, dan pertanyaan baru yang muncul.

3.4.2. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan sikap generasi milenial terhadap praktik *Money politics* serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Informan yang diwawancarai meliputi pemilih milenial, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Panwaslu setempat. Peneliti memiliki pedoman wawancara dengan daftar topik dan pertanyaan inti, tetapi fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara spontan dari responden, menggali cerita, pengalaman, dan pandangan mereka secara mendalam. Tujuannya adalah menangkap nuansa dan konteks yang kaya.

Pemilihan informan akan menggunakan kombinasi teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk memastikan kekayaan perspektif dan kedalaman informasi, hingga mencapai saturasi data (titik di mana tidak ada informasi atau tema baru yang signifikan muncul dari wawancara berikutnya).

3.4.3. Teknik Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono, teknik studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi dokumentasi ini berfungsi

sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³⁸. Data diperoleh dari dokumen seperti hasil rekapitulasi pemilih, laporan pemantauan pemilu, dokumentasi kampanye, dan data statistik kependudukan. Dokumentasi akan digunakan untuk memperkaya konteks, menguatkan temuan, dan menyediakan data latar belakang yang relevan. Jenis Dokumen:

1. Dokumen Resmi & Statistik:

- Data Demografi Kelurahan Petukangan Utara, Jumlah penduduk, distribusi usia (penting untuk mengidentifikasi milenial), tingkat pendidikan. (Dari Kelurahan/BPS).
- Laporan Pelanggaran Pemilu, Laporan resmi dari Bawaslu Kecamatan Pesanggrahan atau Bawaslu Jakarta Selatan terkait dugaan *Money politics* atau pelanggaran lain di wilayah studi (jika ada dan dapat diakses).

2. Dokumen Media & Publikasi:

- Pemberitaan Media Lokal/Nasional Online & Cetak, Artikel berita, laporan investigasi yang membahas *Money politics* pada Pemilu 2024, khususnya yang relevan dengan Jakarta Selatan atau isu milenial.
- Konten Media Sosial Publik, Postingan, diskusi, atau tangkapan layar dari grup-grup komunitas lokal (Facebook, X, Instagram) yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 329.

bersifat publik dan membahas Pemilu 2024, money politics, atau partisipasi politik milenial (dengan menjamin anonimitas).

3. Dokumen Lain (jika ada):

- Laporan atau studi terdahulu tentang *Money politics* atau partisipasi pemilih di Indonesia, khususnya Jakarta.

Prosedur Dokumentasi:

1. Identifikasi & Pencarian, Menentukan sumber dokumen yang relevan dan strategis. Menggunakan kata kunci pencarian yang efektif untuk dokumen online.
2. Akses & Koleksi, Mengunjungi kantor instansi terkait (Kelurahan, KPU, Bawaslu) untuk meminta data, atau mengunduh dari situs web resmi, serta mencari di arsip media online.
3. Verifikasi & Evaluasi, Menilai kredibilitas, keaslian, dan relevansi dokumen. Apakah dokumen tersebut berasal dari sumber yang terpercaya? Apakah ada bias dalam penyajiannya?
4. Ekstraksi & Pencatatan Data:
 - Mencatat informasi kunci dari dokumen.
 - Mengutip bagian yang relevan (dengan mencatat sumber lengkap).
 - Membuat ringkasan atau anotasi singkat tentang isi dokumen.
5. Analisis Dokumen:
 - Analisis Isi Kualitatif, Mengidentifikasi tema, pola, argumen, dan narasi yang terkandung dalam dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

- Analisis Kontekstual, Memahami bagaimana dokumen-dokumen ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya di Kelurahan Petukangan Utara.
- Triangulasi dengan Data Lain, Menggunakan informasi dari dokumen untuk mengkonfirmasi, memperluas, atau bahkan menantang temuan dari wawancara dan observasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu:³⁹

1. Reduksi data (data reduction): Merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.
2. Penyajian data (data display): Menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menganalisis pola-pola atau tema-tema yang muncul untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengaruh *Money politics* terhadap partisipasi generasi milenial.

³⁹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, ed. 2nd (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), hlm.10-12
<https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada, atau sebagai teknik untuk menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang berbeda.⁴⁰, yang meliputi:

1. Triangulasi sumber: Membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber, seperti nara sumber berbeda (pemilih milenial, tokoh masyarakat, petugas pemilu). Narasumber untuk penulis mengumpulkan data adalah dengan mewawancarai generasi millennial melalui para mahasiswa, karang taruna, serta pemuda yang bergabung dalam pengurus partai PDI Perjuangan, selain dari generasi millennial, penulis juga akan mewawancarai kalangan politisi, serta pandangan dari kalangan akademisi.
2. Triangulasi teknik: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk mengecek konsistensi informasi.
3. Triangulasi waktu: Mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi hasil.

Sebagai bagian dari upaya menjaga validitas data melalui teknik triangulasi, pemilihan narasumber menjadi aspek krusial dalam penelitian ini. Dengan melibatkan berbagai latar belakang informan, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam mengenai praktik *Money politics* serta dampaknya

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 369-370.

terhadap partisipasi politik generasi milenial. Oleh karena itu, berikut ini disampaikan usulan narasumber yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data lapangan.

Tabel 3. 2 Daftar Narasumber Usulan Penelitian

No.	Jumlah	Jenis Narasumber	Deskripsi	Kriteria Pemilihan
1	1 Orang	Tokoh Masyarakat	Individu yang berpengaruh di Kelurahan Petukangan Utara, seperti ketua RT/RW, tokoh agama, atau aktivis lokal yang memahami dinamika pemilu dan pengaruh <i>money politics</i> .	Berdomisili di Kelurahan Petukangan Utara, memiliki pengetahuan tentang proses pemilu, dan bersedia berbagi pengalaman.
2	1 Orang	Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta	Anggota DPRD aktif di Provinsi DKI Jakarta.	Memiliki pengalaman dan wawasan tentang praktik <i>money politics</i> , serta bersedia memberikan informasi secara etis.
3	1 Orang	Akademisi Ilmu Politik	Dosen pengajar Ilmu Politik.	Dosen aktif di universitas/sekolah tinggi di Jakarta, menguasai isu

				politik dan demokrasi.
4	7 Orang	Pemilih Generasi Milenial	Pemilih berusia 27–43 tahun (lahir 1981–1996) yang berdomisili di Kelurahan Petukangan Utara dan telah terdaftar sebagai pemilih Pemilu Presiden 2024.	Berada dalam rentang usia milenial, memiliki hak pilih, serta pengalaman langsung dengan <i>Money politics</i> atau partisipasi pemilu.
5	1 Orang	Tim Sukses Calon Presiden 2024	Tim sukses yang terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kelurahan Petukangan Utara.	Telah terlibat langsung dalam pemilu presiden 2024 di Jakarta Selatan dan mengetahui praktik <i>money politics</i> .
6	1 Orang	Petugas Pemilu	Petugas pemerintah, seperti Panitia Pengawas atau Petugas TPS.	Terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu 2024, memiliki data resmi, dan memahami pelanggaran seperti <i>money politics</i> .

7	2 Orang	Masyarakat Umum	Warga biasa yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pemilu, termasuk korban/saksi <i>money politics</i> .	Berdomisili di lokasi studi, memiliki pengalaman dengan proses pemilu, dan bersedia berbagi cerita pribadi.
8	1 Orang	Tokoh Agama	Orang yang dihormati dan ditokohkan oleh Masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan keagamaan	Berdomisili di Kelurahan Petukangan Utara, memiliki pengetahuan tentang proses pemilu, dan bersedia berbagi pengalaman

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Dalam bab ini penulis secara khusus menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemahaman terhadap konteks lokasi ini sangat penting karena dinamika sosial, ekonomi, dan demografi wilayah turut membentuk fenomena *Money politics* serta respon partisipasi politik Generasi Milenial yang menjadi fokus utama penelitian ini.

4.1.1. Profil Administratif dan Geografis

Kelurahan Petukangan Utara merupakan salah satu dari enam kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Secara geografis, Kelurahan Petukangan Utara memiliki letak yang strategis, berbatasan dengan beberapa wilayah. Kelurahan Petukangan Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 2,99 Km² dan dibagi ke dalam 11 Rukun Warga (RW) dan 121 Rukun Tetangga (RT).⁴¹ Struktur pembagian wilayah ini menjadi penting dalam konteks politik, karena RW dan RT seringkali menjadi unit terkecil tempat aktivitas politik dan sosial, termasuk penyaluran bantuan atau imbalan politik, berlangsung. Sebagai wilayah penyangga yang berdekatan dengan area komersial dan pinggiran kota, Petukangan Utara mencerminkan ciri khas kawasan urban di Jakarta, yang

⁴¹ Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, "Wilayah Kerja," diakses 1 November 2025, <https://pkcpesanggrahan.jakarta.go.id/flags/berita/profil/wilayah-kerja>.

ditandai dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan adanya percampuran antara permukiman padat, area bisnis kecil, dan fasilitas umum.

4.1.2. Kondisi Demografi dan Struktur Penduduk

Data demografi yang akurat sangat krusial untuk menganalisis partisipasi politik, terutama terkait Generasi Milenial. Berdasarkan data administrasi kependudukan terakhir yang tersedia Kelurahan Petukangan Utara memiliki total penduduk sebanyak 67.106 jiwa.⁴²

Fokus pada Generasi Milenial (Usia 25-40 tahun pada 2024):

Salah satu penekanan dalam penelitian ini adalah proporsi dan karakteristik Generasi Milenial. Berdasarkan proyeksi rentang usia, jumlah pemilih Generasi Milenial di Kelurahan Petukangan Utara diperkirakan 33% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Petukangan Utara, yang secara nasional setara dengan 66,8 juta pemilih.⁴³ Tingginya populasi pemilih muda ini menjadikan Petukangan Utara sebagai lokasi yang representatif untuk mengamati:

1. Seberapa besar Milenial di wilayah ini terekspos pada media sosial dan informasi politik digital.
2. Mayoritas pemilih muda di wilayah urban memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, yang secara teoritis berkorelasi dengan pemilih yang lebih rasional dan kurang rentan terhadap iming-iming materi.⁴

⁴² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Kampung KB Petukangan Utara." Diakses 1 November 2025. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2892/kampung-kb-petukangan-utara>.

⁴³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Data Jumlah DPT Pilkada 2024 Berdasarkan Usia: Gen Z-Boomer." *detikNews*. 21 November 2024. Diakses 1 November 2025. <https://news.detik.com/pilkada>.

4.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara menunjukkan karakteristik masyarakat perkotaan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Keberadaan kesenjangan ekonomi di beberapa kantong permukiman Kelurahan Petukangan Utara menjadi perhatian khusus. Dalam banyak literatur politik, kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah seringkali dianggap lebih rentan menjadi target utama praktik politik uang, karena imbalan materi dianggap memiliki dampak signifikan bagi keberlangsungan hidup sehari-hari.⁴⁴

4.1.4. Konteks Politik Lokal

Meskipun penelitian berfokus pada Pilpres 2024, dinamika politik lokal di Kelurahan Petukangan Utara seringkali dipengaruhi oleh:

- Hubungan Patronase, Adanya figur-figur lokal (tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau tokoh agama) yang berperan sebagai *gatekeeper* dan seringkali menjadi jembatan antara tim sukses/kandidat dengan pemilih.⁴⁵
- Wilayah ini memiliki sejarah partisipasi pemilih yang relatif tinggi. Hal ini tercermin dari data Pilpres 2024 yang mencapai 81,78% secara nasional (melampaui target KPU sebesar 77,5%) atau, secara spesifik di wilayah Jakarta Selatan, partisipasi pemilih dalam Pemilu selalu berada di atas rata-rata nasional Pemilu Legislatif sebelumnya.⁴⁶ Tingkat partisipasi yang

⁴⁴ Fitriana. "Kerentanan Pemilih Miskin terhadap Politik Uang dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 8, no. 1 (2020): 40-55.

⁴⁵ Prasajo, Eko. *Dinamika Politik Lokal: Patronase dan Broker Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. hlm. 98

⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen." *KOMPAS.com*. 5 Juni 2024. Diakses 1 November 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>.

tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat Petukangan Utara memiliki kesadaran politik yang baik. Namun, tingkat partisipasi yang tinggi ini tidak secara otomatis menghilangkan risiko money politics, melainkan berpotensi menjadi arena persaingan politik yang ketat, di mana praktik suap elektoral dapat menjadi alat untuk memenangkan suara.⁴⁷

4.2. Hasil Penelitian.

4.2.1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan.

4.2.1.1. Perspektif Akademis, Tipologi Partisipasi Milenial sebagai Gladiator Digital.

Dalam menganalisis partisipasi milenial di Petukangan Utara, Saudara Arlis Prayugo, S.IP.,M.Pd, seorang akademisi ilmu politik Kampus STIPAN Jakarta, menggunakan kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Milbrath dan Goel. Ia menilai bahwa milenial di wilayah urban seperti Jakarta menunjukkan kecenderungan partisipasi yang bersifat *gladiator politics*. Dalam pandangannya, milenial sangat aktif secara simbolik di ruang-ruang digital, melakukan diskusi, membagikan konten kampanye, dan terlibat dalam perdebatan di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Saudara AP menyatakan:

⁴⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen." *KOMPAS.com*. 5 Juni 2024. Diakses 1 November 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>.

“Milenial di perkotaan menunjukkan kecenderungan partisipasi yang aktif secara simbolik dan digital, namun tidak selalu hadir secara langsung dalam pemungutan suara atau kegiatan kampanye konvensional. Mereka lebih menyukai bentuk partisipasi politik yang bersifat expressive daripada instrumental.”⁴⁸

Pernyataan ini menggarisbawahi adanya pergeseran dalam metode partisipasi. Milenial cenderung menggunakan media sosial untuk mengekspresikan opini mereka (partisipasi ekspresif) tanpa selalu terlibat dalam kerja-kerja politik teknis di lapangan (partisipasi instrumental). Namun, di Kelurahan Petukangan Utara, temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat irisan antara kedua bentuk tersebut, terutama bagi milenial yang memiliki ikatan kuat dengan organisasi lokal seperti Karang Taruna atau kelompok relawan paslon tertentu. Akademisi ini juga mencatat pengaruh *influencer effect*, di mana keputusan politik milenial banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh publik digital, yang sering kali lebih didengarkan daripada tokoh politik formal.

4.2.1.2. Kualitas Partisipasi, Pandangan Anggota DPRD dan Otoritas Legislatif

Dari sudut pandang kebijakan dan representasi, Hj Yuke Yurike ST.,MM anggota DPRD DKI Jakarta, memberikan penilaian positif terhadap peningkatan kualitas partisipasi milenial di Jakarta Selatan, khususnya di Petukangan Utara. Ia mengamati bahwa milenial pada Pilpres 2024 tidak lagi hanya menjadi objek mobilisasi massa, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek politik yang sadar akan hak-haknya. Menurutnya, antusiasme milenial di wilayah urban padat ini

⁴⁸ wawancara dengan Akademisi Sdr. AP, di Kampus STIPAN Jakarta, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB

didorong oleh adanya isu-isu konkret yang berkaitan langsung dengan kehidupan harian mereka. Saudari YY menjelaskan:

"Jakarta Selatan, termasuk Petukangan Utara, memiliki basis pemilih milenial yang sangat dinamis. Dari pengamatan kami, partisipasi mereka di 2024 meningkat secara kualitas. Mereka bukan lagi sekadar datang ke TPS karena ikut-ikutan, tapi karena ada isu yang mereka kawal, misalnya soal lapangan kerja atau lingkungan."⁴⁹

Lebih lanjut, ia menekankan peran krusial platform digital sebagai jembatan informasi. Bagi lembaga legislatif, media sosial telah menjadi sarana transparansi yang paling efektif untuk mengedukasi milenial. Ia mencatat bahwa milenial di lokalitas seperti Pesanggrahan lebih mudah merespon konten visual yang relevan dibandingkan dengan pertemuan formal yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi milenial di Petukangan Utara sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi dan literasi digital yang memungkinkan mereka melakukan *fact-checking* secara mandiri sebelum menentukan pilihan di bilik suara.

4.2.1.3. Pengawasan Pemilu, Data Lapangan Kehadiran dan Kemandirian Pemilih
Saudara SG, selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) tingkat Kelurahan Petukangan Utara, memberikan perspektif teknis mengenai implementasi partisipasi di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasannya di 121 RT, ia mencatat bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung sangat kondusif dengan tingkat kehadiran pemilih muda yang signifikan. Sugianto memberikan apresiasi khusus

⁴⁹ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Sdri. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

terhadap kedewasaan politik milenial yang tampak "melek" prosedur dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ia menyatakan:

"Sangat mengapresiasi tingkat kehadiran warga yang datang untuk memberikan suara di TPS. Terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang di pemilu kali ini benar-benar tampak 'faham' prosedur; mereka tidak hanya datang, tapi juga aktif memantau jalannya penghitungan suara di setiap TPS."⁵⁰

Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa partisipasi milenial di Petukangan Utara tidak berhenti pada pemberian suara, tetapi meluas hingga pengawalan integritas hasil pemilu. Sugianto juga mencatat bahwa milenial cenderung lebih mandiri dalam menggunakan hak pilihnya. Berbeda dengan generasi tua yang sering kali datang ke TPS karena dorongan atau instruksi tokoh lokal, milenial banyak yang datang secara berkelompok dengan rekan sejawat atau bahkan secara individu setelah melakukan riset mandiri. Namun, ia juga mengidentifikasi hambatan administratif, seperti kendala waktu bagi milenial yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring atau pekerja lepas, yang terkadang menghalangi mereka untuk hadir tepat waktu di TPS.

Tabel 4.1. Aspek pengawasan dan implikasinya berdasarkan temuan

Aspek Pengamatan Panwas	Temuan di Petukangan Utara	Implikasi Sosiopolitik
Voter Turnout	Signifikan, antrean pagi-siang didominasi wajah muda.	Milenial menjadi kelompok penentu legitimasi pemilu lokal.

⁵⁰ wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Sdr. SG, di rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang, tanggal 15/12/2025, 19.00 WIB

Aspek Pengamatan Panwas	Temuan di Petukangan Utara	Implikasi Sosiopolitik
Kesadaran Prosedural	Tinggi, aktif memantau penghitungan suara (C1).	Meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi suara di TPS.
Kemandirian	Lebih mandiri dibandingkan generasi senior.	Mengurangi efektivitas mobilisasi gaya lama oleh tokoh tradisional.
Hambatan	Kendala waktu kerja (sektor informal/ojol).	Diperlukan fleksibilitas waktu pemungutan suara untuk pekerja urban.

Sumber: data diolah oleh penulis

4.2.1.4. Tipologi Motivasi Milenial, Antara Harapan Ekonomi dan Idealisme

Partisipasi politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara tidak dapat dilihat sebagai satu blok monolitik. Terdapat spektrum motivasi yang luas, yang mencerminkan latar belakang sosial-ekonomi responden. Hasil wawancara mendalam dengan para pemilih milenial di wilayah ini mengungkapkan empat tipologi utama partisipasi:

1. Partisipasi Berbasis Kesejahteraan (Instrumental-Ekonomis)

Bagi kelompok milenial yang telah berkeluarga dan berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, partisipasi politik dipandang sebagai sarana untuk memastikan stabilitas ekonomi. Saudari F, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa motivasi utamanya ke TPS adalah harapan akan perubahan harga kebutuhan pokok. Ia mengatakan "*Kami*

*merasa suara kami penting buat nentuin harga sembako ke depan... Kalau nggak nyoblos, saya rasa nggak punya hak buat komplain nanti kalau keadaan susah."*⁵¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian milenial, partisipasi politik bersifat transaksional-kebijakan. Mereka memberikan suara dengan ekspektasi adanya imbal balik berupa kebijakan yang meringankan beban hidup harian, seperti penurunan harga minyak atau bantuan pendidikan anak.

2. Partisipasi Berbasis Integritas dan Idealisme (Nilai-Normatif)

Kelompok milenial yang memiliki akses informasi luas dan pendidikan memadai cenderung menolak segala bentuk tekanan atau imbalan materi. Saudari N, seorang pengusaha kontrakan, mewakili suara ini. Baginya, pilihan politik adalah masalah hati nurani dan iman yang tidak bisa dibeli. Ia mengungkapkan sikap kritisnya terhadap kampanye yang menggunakan materi "Saya punya prinsip, iman nggak bisa dibeli, pilihan juga nggak bisa dipaksa, kalau ada yang bagi-bagi, saya malah makin males milih yang itu."⁵² Tipologi ini menunjukkan bahwa politik uang justru memberikan efek bumerang (*backfire effect*) bagi sebagian milenial di Petungkana Utara. Praktik tersebut dianggap sebagai indikasi ketidakmampuan kandidat dalam menawarkan ide dan prestasi, sehingga memicu antipati dari pemilih yang kritis.

⁵¹ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. F di Jl. H.Najih RT.08/01, Petungkana Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 09.15 WIB

⁵² wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. N, di Jl. Muhtar Raya, RT. 003/011. Petungkana Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 12.57 WIB

3. Partisipasi Pragmatis-Organisatoris

Kohort milenial yang terlibat dalam organisasi pemuda seperti Karang Taruna sering kali memiliki pola partisipasi yang lebih dinamis. Saudara RW Ketua Karang Taruna Tingkat RW, menjelaskan bahwa antusiasmenya didorong oleh keinginan untuk menarik perhatian para calon terhadap kegiatan kepemudaan di lingkungannya. Ia secara terbuka mengakui adanya unsur "ekstra" dalam mobilisasi:

"Ada adrenalin tersendiri pas kita terlibat di pusaran kampanye. Motivasi saya ya pengen liat lingkungan RW saya mendapat perhatian lebih dari para calon. Kita sering diskusi untuk membahas siapa nih yang paling 'royal' dan peduli sama kegiatan anak muda."⁵³

Dalam perspektif ini, partisipasi politik adalah alat negosiasi kolektif untuk mendapatkan sumber daya bagi komunitas. Milenial dalam kategori ini melihat pemilu sebagai momentum bagi "akar rumput" untuk mendapatkan dukungan konkret bagi fasilitas olahraga atau acara sosial warga.

4. Partisipasi yang Terhambat (Apatisme Protes)

Penelitian ini juga menemukan adanya kelompok milenial yang memilih untuk golput (golongan putih). Saudari PW seorang pengemudi ojek online berusia 29 tahun, adalah contoh nyata. Keputusannya untuk tidak memilih didorong oleh rasa muak terhadap

⁵³ wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. RW, di Jl. Swadharma 4, RW.09, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 20.05 WIB

praktik politik uang yang ia lihat secara langsung di lingkungannya. Ia menyatakan:

"Motivasi saya itu semacam protes ya. Saya sudah lelah melihat lingkungan di Petukangan Utara sini kalau mau Pemilu kayak pasar malam, semua bisa dibeli... lebih baik saya abstain/tidak menggunakan hak suara sekalian sebagai bentuk pernyataan dari sikap saya." ⁵⁴

Golput dalam konteks ini bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk protes aktif terhadap sistem yang dianggap korup. Priska lebih memilih bekerja mencari nafkah daripada berpartisipasi dalam proses yang menurutnya tidak jujur.

Tabel 4.2. motivasi responden, status partisipasi dan sumber informasi

Nama Responden	Motivasi Partisipasi	Status Partisipasi	Sumber Informasi Utama
Saudari F	Harga sembako & pendidikan anak.	Aktif (TPS Pagi)	TikTok & WA Grup warga.
Saudari N	Integritas bangsa & ekonomi stabil.	Aktif (Prinsip)	Facebook & Grup Keluarga.
Saudara RW	Perhatian bagi Karang Taruna/RW.	Sangat Aktif (Mobilisator)	Instagram & Diskusi Kopi.
Saudari PW	Protes terhadap politik uang.	Golput (Abstain)	Twitter (X) & Cerita Ojol.
Saudara KC	Bantuan ekonomi & "perhatian" materi.	Aktif (Pragmatis)	WA Grup Ojol.

⁵⁴ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. PW, di Jl. Palem, RW.08, Petukangan Utara, Pesangrahan, tanggal 5/11/2025, 16.11 WIB

4.2.1.5. Peran Tokoh Masyarakat dan Agama dalam Mobilisasi Milenial

Di tengah arus informasi digital, peran tokoh lokal di Kelurahan Petukangan Utara tetap signifikan sebagai penyeimbang moral dan penggerak massa. Saudara MNA, seorang tokoh masyarakat dan wiraswasta di pasar lokal, menggunakan pendekatan persuasif yang santai untuk mengajak anak muda tidak golput. Ia menggunakan analogi yang dekat dengan keseharian milenial "Saya sering ajak ngobrol pas mereka lagi nongkrong... Saya kasih gambaran kalau satu suara itu ibarat satu bumbu dalam masakan, kalau kurang satu ya rasanya beda. Itu bikin mereka ngerasa dihargai suaranya."⁵⁵ Pendekatan non-formal ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pidato politik yang kaku. Senada dengan hal tersebut, Saudara GW, seorang tokoh agama dan pimpinan Masjid, menekankan bahwa partisipasi politik adalah bagian dari tanggung jawab moral umat untuk memilih pemimpin yang amanah. Ia sering menyelipkan pesan-pesan politik yang mendidik dalam khotbah atau pengajian rutin, mengingatkan milenial bahwa memilih adalah bentuk ikhtiar memperbaiki keadaan bangsa. Ia mencatat adanya peningkatan kritisitas milenial, "Ada peningkatan, tapi caranya berbeda dengan zaman saya. Mereka lebih kritis. Saya sering dengar mereka diskusi soal visi-misi calon di teras masjid atau saat pengajian. Mereka tidak lagi sekadar ikut pilihan orang tua."⁵⁶

⁵⁵ wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sdr. MNA. di RPH Unggas Dinas Peternakan, Kel. Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 15.15 WIB

⁵⁶ wawancara dengan Tokoh Agama Sdr. GW. di Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 10.42 WIB

4.2.1.6. Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Partisipasi Politik

Kesenjangan ekonomi di Kelurahan Petukangan Utara menciptakan realitas partisipasi yang ambivalen. Di satu sisi, terdapat milenial yang memegang teguh idealisme, namun di sisi lain, tekanan ekonomi membuat sebagian lainnya melihat pemilu sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan tambahan. Saudara SH, yang merupakan ketua tim sukses salah satu paslon di tingkat kecamatan, mengakui bahwa milenial merupakan penggerak utama di lapangan karena mereka memiliki energi untuk menjangkau pemilih di gang-gang sempit. Ia melihat bahwa milenial merespon positif program yang menawarkan kemandirian ekonomi, "Milenial di Petukangan Utara itu luar biasa, Mas. Mereka itu penggerak di lapangan... mereka merasa program soal lapangan kerja itu kena banget ke mereka."⁵⁷. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi partisipasi milenial sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat ekonomi jangka panjang. Namun, Sugiharto juga menyoroti fenomena "sikap pragmatis" milenial yang menerima bantuan materi dari pihak manapun namun tetap menjaga rahasia pilihannya di bilik suara sebuah fenomena yang ia sebut sebagai strategi "ambil manfaatnya, jaga hatinya".

Kehadiran milenial yang dominan di TPS, kemandirian mereka dalam mencari informasi, serta keberanian untuk bersikap kritis terhadap praktik politik transaksional adalah indikator positif bagi pertumbuhan demokrasi. Namun, tantangan berupa skeptisisme sistemik yang berujung pada golput dan kerentanan

⁵⁷ wawancara dengan Tim sukses calon presiden Sdr. SH, di Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kec. Pesangrahan, di Jl Kemajuan, Petukangan Selatan, 22/12/2025, Pukul 17.00 WIB

ekonomi yang memicu partisipasi pragmatis tetap menjadi catatan krusial bagi para pemangku kepentingan.

Anggota DPRD Ibu YY menegaskan “bahwa kunci utama untuk membentengi integritas partisipasi milenial adalah melalui kemandirian ekonomi dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Jika milenial memiliki kemandirian finansial melalui UMKM atau pelatihan kerja yang memadai, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi sesaat yang nilainya tidak sebanding dengan kualitas kepemimpinan lima tahun ke depan.”⁵⁸

Sinergi antara otoritas pengawas seperti Panwas, wakil rakyat di DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat di Kelurahan Petukangan Utara. Partisipasi milenial yang tinggi di tahun 2024 bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan sebuah pesan kuat bahwa masa depan arah bangsa ini ditentukan oleh sejauh mana aspirasi dan kebutuhan riil anak muda di tingkat akar rumput dapat diakomodasi secara tulus oleh sistem politik nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Saudara Sugianto (Panwas), “kualitas pemimpin masa depan sangat ditentukan oleh bersihnya proses hari ini, dan milenial adalah garda terdepan dalam menjaga kejernihan proses tersebut di Kelurahan Petukangan Utara.”⁵⁹

⁵⁸ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

⁵⁹ Hasil wawancara narasumber Panwas Sugianto

4.2.2. Bentuk-bentuk dan pola *Money politics* yang terjadi dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Praktik *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara tidak lagi hanya terbatas pada distribusi uang tunai secara konvensional. Temuan penelitian menunjukkan adanya diversifikasi instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik warga, yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan tren gaya hidup pemilih. Berdasarkan data wawancara, bentuk-bentuk ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yang mencerminkan pragmatisme politik di tingkat lokal.

4.2.2.1. Manifestasi Materiil Konvensional, Uang Tunai dan Logistik Sembako

Bentuk yang paling persisten dan tetap menjadi instrumen utama di wilayah padat penduduk adalah pemberian uang tunai dan paket sembako. Di Kelurahan Petukangan Utara, pemberian ini sering kali disamarkan dalam istilah-istilah yang lebih halus untuk mengurangi resistensi moral dari penerima. Saudari S, seorang ibu rumah tangga, memberikan kesaksian langsung mengenai hal ini:

"Pernah, malah saya mengalaminya sendiri. Di sekitar wilayah atau tempat saya disini sudah menjadi rahasia umum. Biasanya dilakukan pada malam-malam atau subuh ada yang ngetok pintu, kasih amplop isinya uang tunai. Sementara itu Kadang ada juga yang memberikan paket sembako lengkap."⁶⁰

⁶⁰ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. S, di Jl. Swadharma Dalam III, RT.003/9, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 9/11/2025, 19.20 WIB

Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga menjadi pintu masuk yang efektif bagi tim sukses untuk melakukan penetrasi politik. Sariyah lebih lanjut menjelaskan bahwa motivasi utamanya adalah "manfaat nyata" bagi dapur, terutama mengingat kondisi ekonomi yang sulit dan kenaikan harga bahan pokok menjelang hari pencoblosan. Hal ini mengonfirmasi teori bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah menjadi target yang rentan terhadap godaan materiil sesaat.

Selain uang tunai, paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan gula menjadi komoditas politik yang sangat diminati oleh kalangan ibu rumah tangga. Saudari YF seorang warga masyarakat di kelurahan petukangan utara menyebutkan bahwa “pembagian ini biasanya terjadi secara ‘tangan ke tangan’ agar tidak menarik perhatian pihak luar atau petugas pengawas.”⁶¹ Penggunaan sembako ini dianggap lebih aman secara hukum oleh tim sukses karena sering kali dibungkus dalam narasi "bantuan sosial" atau "sedekah".

4.2.2.2. Modernisasi Instrumen: Digitalisasi dan Voucher

Temuan yang paling signifikan pada Pilpres 2024 di Petukangan Utara adalah munculnya penggunaan instrumen digital yang menyasar pemilih generasi milenial. Akademisi saudara AP menyoroti pergeseran ini sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital. Menurut analisisnya,

“praktik *Money politics* kini menjadi lebih tersembunyi melalui metode-metode seperti:” Transfer saldo melalui dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana, OVO, atau GoPay, Pembagian *voucher* pulsa atau kuota internet.,

⁶¹ wawancara dengan warga Masyarakat Sdri. YF, Jl. H. Gaim, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 18/12/2025, Pukul 10.21 WIB

Penawaran *giveaway* atau kuis berbayar di platform media sosial yang sebenarnya merupakan bagian dari kampanye terselubung.”⁶²

Ibu YY, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga mengonfirmasi adanya indikasi penggunaan metode digital ini. Ia menyatakan:

"Ada indikasi ke sana, meskipun pembuktiannya lebih sulit dibanding uang tunai. Metode digital ini memang 'menyasar' karakter milenial yang praktis. Ini modus baru yang harus diwaspadai oleh petugas yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu karena jejaknya bisa sangat samar namun jangkauannya luas.”⁶³

Pola digital ini sangat efektif bagi pemilih muda yang memiliki mobilitas tinggi dan ketergantungan pada gawai. Tokoh Agama saudara GW juga mencatat fenomena ini di kalangan jamaah muda, di mana pengisian saldo dompet digital dianggap sebagai sesuatu yang "keren" atau kekinian, padahal hakikatnya tetap merupakan upaya pembelian suara.⁶⁴

Tabel 4.3. Matriks Bentuk Instrumen *Money politics* di Petukangan Utara

Bentuk Instrumen	Deskripsi Materiil	Kelompok Target Utama	Istilah Lokal / Samaran
Uang Tunai	Amplop berisi Rp100.000 - Rp200.000	Masyarakat ekonomi rendah, ojol	Uang bensin, Uang transport, Vitamin

⁶² wawancara dengan Akademisi Sdr. AP, di Kampus STIPAN Jakarta, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB

⁶³ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

⁶⁴ wawancara dengan Tokoh Agama Sdr. GW, di Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 10.42 WIB

Bentuk Instrumen	Deskripsi Materiil	Kelompok Target Utama	Istilah Lokal / Samaran
Logistik Sembako	Beras, minyak, gula, mie instan	Ibu rumah tangga, lansia	Berkat, Bantuan sembako, Paket sembako
Digital Money	Transfer e-wallet, top-up saldo	Milenial, mahasiswa, pekerja digital	Voucher jajan, Dana kaget, Saldo digital
Fasilitas Komunal	Semen, pasir, cat untuk rumah ibadah/fasilitas umum	Kelompok pengajian, pemuda	Jariyah politis, Bantuan pembangunan
Barang Konsumsi	Jilbab, kaos, kalender, payung	Masyarakat umum	Souvenir, Kenang-kenangan

4.2.2.3. Pola Distribusi dan Strategi Penetrasi Akar Rumput

Analisis terhadap pola distribusi menunjukkan bahwa praktik *Money politics* di Petukangan Utara dilakukan secara terstruktur dan masif, dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada di tengah masyarakat. Strategi ini dirancang untuk memaksimalkan jangkauan suara sekaligus meminimalkan risiko deteksi oleh otoritas pengawas pemilu.

1. Strategi "Door-to-Door" dan Serangan Fajar

Pola yang paling dominan di Kelurahan Petukangan Utara adalah distribusi pintu ke pintu (*door-to-door*). Mengingat topografi wilayah yang terdiri dari gang-gang sempit dan pemukiman padat, metode ini dianggap paling efektif untuk menjangkau pemilih secara langsung. Saudara TA, seorang pemilih milenial yang juga bekerja sebagai penjaga malam, secara terbuka mengakui keterlibatannya sebagai pelaksana lapangan:

"Bukan cuma mendengar, Mas, saya pelakunya yang jalanin di lapangan. Saya diminta timses buat door-to-door ke rumah warga. Saya yang data siapa saja yang dapet, terus saya anterin amplop sama paket sembakonya supaya mereka milih calon tertentu. Jadi saya tahu banget polanya."⁶⁵

Keterlibatan warga lokal seperti Tri Aryanto sangat krusial bagi tim sukses karena mereka memiliki pemetaan yang akurat mengenai kecenderungan politik setiap kepala keluarga di lingkungannya. Pola ini sering kali dilakukan pada "Masa Tenang" atau beberapa jam sebelum pencoblosan (Serangan Fajar), di mana pertahanan psikologis pemilih dianggap paling lemah dan ingatan terhadap pemberi materi paling segar.

2. Pemanfaatan Broker Politik dan Struktur Informal

Pola distribusi juga melibatkan peran "broker politik" atau penghubung lokal yang memiliki pengaruh di komunitas terkecil. Di Petukangan Utara, broker-broker ini bisa berupa pengurus RT/RW, tokoh pemuda, atau individu yang dihormati di lingkungan tersebut. Saudara MNA, seorang

⁶⁵ wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. TA, di Jl. Ujung Aspal, RW.010 Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB

tokoh masyarakat dan wiraswasta, mengamati bahwa perantara ini biasanya adalah warga yang sudah sangat dikenal:

"Biasanya lewat perantara, Mas. Istilahnya 'kaki tangan' yang emang warga sini juga. Mereka nggak bakal terang-terangan di jalan besar. Masuknya ke gang-gang, lewat obrolan di warung kopi atau pas lagi kumpul-kumpul warga. Jadi kesannya kayak bantuan dari temen, padahal ada misi politiknya."⁶⁶

Penggunaan struktur informal seperti Karang Taruna juga terdeteksi sebagai saluran distribusi materi yang cukup efektif bagi pemilih muda. Rhaditya, menjelaskan bahwa pola penyaluran materi sering kali dibungkus dalam bentuk "uang pembinaan organisasi" atau "dana kegiatan sosial" untuk menyamarkan sifat transaksionalnya. Hal ini menciptakan loyalitas semu di kalangan anggota organisasi yang merasa mendapatkan perhatian lebih dari kandidat tertentu.

3. Penyamaran Melalui Program Sosial dan Bansos

Modus operandi lain yang ditemukan adalah penyaluran bantuan materi yang ditumpangkan pada program-program sosial atau bantuan pemerintah (Bansos) yang sudah ada. Ibu YY anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti fenomena ini sebagai tantangan berat dalam pengawasan pemilu. Ia mencatat adanya upaya mengeksploitasi hak rakyat demi kepentingan elektoral pribadi kandidat:

⁶⁶ wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sdr. MNA. di RPH Unggas Dinas Peternakan, Kel. Petungkang Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 15.15 WIB

"Bansos adalah hak rakyat yang dibiayai negara, jadi sangat tidak etis jika diklaim sebagai 'kebaikan' pribadi kandidat. Pergeseran ke sembako menunjukkan adanya upaya mengeksploitasi kebutuhan dasar masyarakat. Kami di DPRD selalu menekankan fungsi pengawasan agar program pemerintah tidak ditunggangi kepentingan elektoral."⁶⁷

Pola ini sangat licin karena sulit dipisahkan secara hukum antara bantuan yang memang menjadi program rutin pemerintah dengan bantuan yang diberikan dengan motif politik tambahan. Di lapangan, sering ditemukan paket bantuan yang disisipi kalender, stiker, atau pesan verbal dari petugas yang membagikannya agar warga "mengingat jasa" pemberi saat di bilik suara.

4.2.2.4. Perspektif Otoritas Pengawas dan Akademisi terhadap Dinamika Lapangan

Hasil wawancara dengan Panwas Kelurahan dan Akademisi memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tantangan dalam membendung arus *Money politics* di wilayah urban seperti Petukangan Utara.

Tantangan Pengawasan di Gang-Gang Sempit

Saudara S, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) tingkat Kelurahan, mengakui bahwa pola distribusi di gang-gang sempit adalah tantangan terbesar bagi jajarannya. Keterbatasan personil dibandingkan dengan luas wilayah dan kepadatan

⁶⁷ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

penduduk membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh setiap saat. Ia menjelaskan:

"Regulasi kita sebenarnya sudah tegas, tapi personil kami terbatas. Satu kelurahan diawasi sedikit orang, sementara gang di Petukangan Utara ini ribuan. Oknum lokal ini biasanya warga setempat, jadi mereka tahu kapan pengawas lewat. Kami lebih banyak mengandalkan laporan masyarakat, tapi warga sering takut atau enggan melapor karena alasan 'nggak enak sama tetangga'." ⁶⁸

Narasumber S juga mencatat adanya pergeseran modus yang semakin cerdik, di mana tim sukses menggunakan kedok "bakti sosial" atau bantuan relawan tanpa menyebutkan secara eksplisit ajakan untuk memilih, namun dengan memberikan atribut yang sangat identik dengan kandidat tertentu. Hal ini sering kali membuat laporan warga mentah karena tidak memenuhi unsur pelanggaran materiil yang bisa dibuktikan secara hukum.

4.2.2.5. Analisis Teoretis, Disonansi Kognitif dan Pilihan Rasional

Narasumber Akademisi Saudara AP dari sudut pandang akademisi menggunakan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dan Teori Disonansi Kognitif untuk menjelaskan mengapa pemilih, termasuk milenial yang melek informasi, tetap terjebak dalam praktik ini. Menurutnya, dalam masyarakat perkotaan yang kompetitif, keputusan milenial untuk aktif atau pasif dipengaruhi oleh persepsi manfaat versus biaya partisipasi.

“Meskipun milenial dianggap melek informasi, Teori Disonansi Kognitif menunjukkan bahwa ketika nilai idealisme berbenturan dengan kebutuhan pragmatis (ekonomi, identitas kelompok), mereka bisa terlibat. Selain itu,

⁶⁸ wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Sdr. SG, di Rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang, tanggal 15/12/2025, Pukul 19.00 WIB

narasi 'semua politisi sama saja' membuat mereka sinis dan permisif terhadap praktik tersebut.”⁶⁹

Lebih lanjut, ia mencatat bahwa *Money politics* di kalangan milenial urban tidak selalu dalam bentuk suap langsung untuk mengubah pilihan, tetapi sering kali berfungsi sebagai insentif untuk menggerakkan mereka datang ke TPS (mobilisasi kehadiran). Dampaknya, meskipun legitimasi pemimpin mungkin menurun di mata mereka secara moral, namun secara elektoral praktik ini tetap dianggap efektif oleh tim sukses.

Tabel 4.4. Pola Distribusi *Money politics* di Wilayah Urban Petukangan Utara

Pola Distribusi	Mekanisme Pelaksanaan	Aktor Kunci	Kelebihan Strategis
Penyelundupan Masa Tenang	Distribusi dilakukan H-1 atau dini hari sebelum pencoblosan	Tim Sukses (Tim Hore)	Efek kejut psikologis, sulit diawasi Panwas
Patronase Tokoh Lokal	Materi dititipkan melalui ketua RT/RW atau tokoh agama	Tokoh Masyarakat, Broker Politik	Memanfaatkan rasa "pekewuh" (tidak enak hati) warga
Infiltrasi Komunitas	Pemberian dana kas organisasi atau bantuan acara	Pengurus Karang Taruna, Ketua PKK	Penyamaran sebagai dana bantuan sosial/hobi

⁶⁹ wawancara dengan Akademisi Sdr. AP, di Kampus STIPAN Jakarta, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB

Pola Distribusi	Mekanisme Pelaksanaan	Aktor Kunci	Kelebihan Strategis
Distribusi Digital Terpusat	Pengiriman saldo e-wallet melalui database nomor HP	Admin Relawan, Influencer Lokal	Cepat, efisien, tanpa bukti fisik serah terima
Pemanfaatan Bansos Negara	Klaim bantuan pemerintah sebagai bantuan pribadi	Oknum Aparat, Relawan Paslon	Memanfaatkan fasilitas negara dengan biaya nol

Sumber data diolah oleh penulis

4.2.2.6. Refleksi atas Integritas Demokrasi di Kelurahan Petukangan Utara

Analisis terhadap Sub-fokus 2 mengenai bentuk-bentuk dan pola *Money politics* dalam Pilpres 2024 di Kelurahan Petukangan Utara menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan eksistensial yang sangat berat. Praktik politik uang telah mengalami metamorfosis dari sekadar amplop fisik menjadi instrumen digital yang lebih licin dan terselubung, menyesuaikan diri dengan profil sosiodemografis pemilih milenial urban.

Pola distribusi yang memanfaatkan struktur informal seperti broker lokal, tokoh pemuda, dan penyamaran melalui bansos menunjukkan betapa sistematisnya upaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara transaksional. Meskipun muncul resistensi dari kelompok milenial yang idealis dan adanya perlawanan pragmatis dari sebagian warga yang menerima uang namun tetap memilih sesuai

hati nurani, normalisasi praktik ini tetap menjadi ancaman serius bagi meritokrasi dan kualitas kepemimpinan nasional.

Integritas pemilu di Petukangan Utara pada akhirnya sangat bergantung pada tiga pilar utama yaitu ketegasan pengawasan dari otoritas terkait, kemandirian ekonomi warga yang membentengi mereka dari godaan materi, dan pendidikan politik yang mampu mengubah paradigma pemilih dari transaksional menjadi rasional-idealistis. Sebagaimana ditekankan oleh para narasumber, masa depan Indonesia tidak sebanding dengan nilai uang sesaat di pagi hari pencoblosan. Perjuangan melawan *Money politics* adalah perjuangan untuk menjaga martabat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

4.2.3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, praktik *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara selama Pilpres 2024 telah berevolusi menjadi lebih halus dan sistematis. Tim sukses tidak lagi hanya menggunakan cara-cara terbuka yang berisiko tertangkap oleh pengawas, melainkan memanfaatkan celah dalam struktur sosial masyarakat urban yang padat. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk materi, mulai dari uang tunai konvensional hingga instrumen digital yang menyasar karakteristik Generasi Milenial. Temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya pergeseran instrumen politik uang yang menyesuaikan

dengan gaya hidup milenial. Meskipun uang tunai dalam amplop tetap menjadi primadona, munculnya modus baru melalui saldo dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana, OVO, atau GoPay mulai terdeteksi. Saudara AP mencatat bahwa praktik ini sering kali disamarkan dalam bentuk "kuis berhadiah" atau "giveaway" di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, yang secara substantif bertujuan untuk memengaruhi preferensi politik tanpa meninggalkan jejak fisik yang mudah dilacak oleh Panwas.

Narasumber Anggota DPRD DKI Jakarta ibu YY, menegaskan bahwa tantangan pengawasan menjadi lebih berat dengan adanya digitalisasi ini. Ia menyatakan,

"Ada indikasi ke sana, meskipun untuk menemukan pembuktiannya lebih sulit dibanding uang tunai. Metode digital ini memang 'menyasar' karakter milenial yang praktis. Ini merupakan modus baru yang harus diwaspadai dikarenakan jejaknya bisa sangat samar namun dapat memiliki jangkauannya yang sangat luas".⁷⁰

Selain instrumen digital, pembagian paket sembako yang disisipi pesan politik atau "titipan salam" tetap menjadi alat yang efektif untuk menjangkau kelompok milenial yang sudah berkeluarga dan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

Mekanisme penyaluran insentif politik di Petukangan Utara dilakukan melalui jaringan "gerilya" yang melibatkan tokoh lokal dan simpatisan di tingkat RT. Strategi *door-to-door* pada malam hari atau dini hari sebelum pencoblosan

⁷⁰ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

(serangan fajar) menjadi metode yang paling dominan. Tri Aryanto, seorang pemilih milenial yang juga bekerja sebagai penjaga malam, mengakui secara jujur perannya dalam rantai distribusi ini. Ia menceritakan bagaimana ia diminta oleh tim sukses untuk mendata warga dan menyalurkan paket sembako serta amplop kepada warga di lingkungannya. Pola distribusi ini sangat bergantung pada kepercayaan antara tim sukses dan "kaki tangan" lokal. Penjaga malam, tokoh pemuda, hingga pengurus organisasi lokal seringkali direkrut sebagai perantara karena mereka memahami peta kekuatan suara di setiap gang.

Narasumber saudara MNA, seorang tokoh masyarakat, mengamati bahwa perantara ini menggunakan pendekatan personal yang santai, seperti obrolan di warung kopi, untuk menyisipkan janji-janji materiil tersebut, sehingga warga tidak merasa sedang disuap, melainkan sedang menerima "bantuan transportasi" atau "uang bensin".

4.2.3.1. Analisis Respon Generasi Milenial, Dialektika Antara Kebutuhan dan Integritas

Respon generasi milenial terhadap fenomena politik uang di Kelurahan Petungkana Utara menunjukkan dinamika yang kompleks, yang mencerminkan pergeseran nilai moral di tengah impitan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa milenial tidak lagi bersikap naif; mereka memiliki kesadaran penuh akan adanya praktik transaksional tersebut dan meresponnya dengan berbagai strategi pertahanan diri.

Bagi sebagian besar responden milenial yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, politik uang dipandang sebagai solusi pragmatis sementara. Narasumber generasi milenial Saudari S, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun, secara blak-blakan menyatakan bahwa motivasi utamanya ke TPS adalah karena adanya "manfaat nyata" bagi dapur. Ia berujar,

"Jujur saja ya Mas, motivasi utamanya karena ada yang memberikan uang. Sebagai ibu rumah tangga, kondisi ekonomi saat ini sedang berada dalam masa sulit atau susah, Dimana harga sembako naik semua. Sehingga apabila ada timses yang datang dengan membawa 'bensin' (uang), itu yang membuat saya pribadi semangat ke TPS".⁷¹

Bagi kelompok ini, uang seratus atau dua ratus ribu rupiah memiliki nilai utilitas yang jauh lebih tinggi daripada janji-janji abstrak tentang pembangunan nasional di masa depan.

Narasumber generasi milenial saudara KC, seorang pengemudi ojek daring, memperkuat narasi pragmatisme ini dengan menyatakan bahwa pemilu di Petungkang Utara sangat "basah," yang berarti banyak bantuan yang turun ke warga. Ia melihat pemberian tersebut sebagai bentuk perhatian nyata dari calon kepada pekerja sektor informal seperti dirinya. Kartono menegaskan, "Saya pilih calon yang kontribusinya paling nyata dan paling besar buat saya selama kampanye. Kalau dia berani kasih lebih banyak dari yang lain, berarti dia lebih peduli sama nasib kita di bawah".⁷²

⁷¹ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. S, di Jl. Swadharma Dalam III, RT.003/9, Petungkang Utara, Pesanggrahan, tanggal 9/11/2025, 19.20 WIB

⁷² wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. KC, di Jl Masjid Darul Fallah, Petungkang Utara, Pesanggrahan, tanggal 11/11/2025, 10.00 WIB

Dalam pandangan ini, politik uang bukan lagi dianggap sebagai kejahatan demokrasi, melainkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang legal di mata masyarakat yang lapar.

4.2.3.2. Perlawanan Diam-diam, "Ambil Barangnya, Tetap Pilih Hati Nurani"

Terdapat fenomena yang menarik di mana milenial menunjukkan sikap "cerdik" dengan menerima materi dari berbagai pihak tanpa merasa terikat secara politik. Narasumber generasi milenial saudara F, menjelaskan bahwa di lingkungannya banyak warga yang menganggap uang pemilu sebagai "rezeki musiman." Ia mengungkapkan,

"Dilema sih nggak, paling cuma merasa nggak enak kalau yang nawarin itu tetangga sendiri... Biasanya kalau saya dikasih, ya warga sini terutama tetangga yang lain mereka bilang 'terima aja nggak enak', tapi di dalam hati ya untuk pilihan tetap saya akan memilih yang menurut saya terbaik sesuai keyakinan".⁷³

Sikap ini menunjukkan adanya pemisahan antara tindakan ekonomi (menerima uang) dan tindakan politik (memilih di bilik suara).

Narasumber saudara GW sebagai tokoh agama, mengonfirmasi perilaku ini di kalangan jamaah mudanya. Ia menceritakan banyak anak muda yang berkata kepadanya, "Pak Haji, barangnya saya ambil karena saya butuh, tapi milih mah tetap sesuai hati".⁷⁴

⁷³ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. F di Jl. H.Najih RT.08/01, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 09.15 WIB

⁷⁴ wawancara dengan Tokoh Agama Sdr. GW. di Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 10.42 WIB

Meskipun secara etika hal ini tetap dipandang bermasalah, sosiolog politik melihatnya sebagai bentuk perlawanan pasif (*subtle resistance*) dari rakyat kecil terhadap sistem yang mereka anggap hanya peduli pada rakyat saat musim kampanye saja. Mereka melakukan "pemerasan balik" kepada para elit politik yang selama ini dianggap hanya mengeksploitasi suara mereka.

4.2.3.3. Idealisme dan Protes, Golput sebagai Bentuk Integritas

Di sisi ekstrem lainnya, penelitian ini menemukan sekelompok milenial yang memilih untuk menarik diri sepenuhnya dari proses pemungutan suara sebagai respon terhadap praktik politik uang yang masif. Narasumber generasi milenial saudari PW, seorang pengemudi ojek daring berusia 29 tahun, memutuskan untuk menjadi golongan putih (*golput*). Ia merasa muak dengan lingkungan yang ia gambarkan seperti "pasar malam politik" di mana suara diperjualbelikan. Priska menyatakan,

"Justru pemberian materi itu yang membuat diri saya memutuskan untuk tidak ikut memilih sama sekali (*Golput*). Saya muak... Saya merasa kalau saya itu terima, saya akan ikut merusak negara ini. Makanya, daripada saya pusing untuk memilih siapa di antara yang melakukan praktek 'nyogok', mending saya *golput*".⁷⁵

Keputusan *golput* bagi saudari PW bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan sebuah pernyataan politik (*political statement*) yang kuat terhadap rusaknya sistem demokrasi di tingkat akar rumput. Ia memandang bahwa integritas pribadinya jauh lebih berharga daripada uang seratus ribu rupiah yang ia anggap merendahkan harga

⁷⁵ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. PW, di Jl. Palem, RW.08, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 16.11 WIB

diri pemilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik politik uang memiliki dampak bumerang (*backfire effect*) bagi kelompok milenial yang tereduksi dan memiliki prinsip moral yang kuat.

4.2.3.4. Analisis Kedalaman, Peran Stakeholder dan Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi

Analisis ini juga diperkaya oleh perspektif para pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki peran krusial dalam ekosistem pemilu di Petukangan Utara. Pandangan mereka memberikan gambaran tentang bagaimana praktik politik uang di tingkat lokal merusak tatanan demokrasi secara sistemik dan jangka panjang.

Narasumber anggota DPRD ibu YY menekankan bahwa politik uang adalah "racun" yang menciptakan persepsi berbahaya bahwa jabatan publik bisa dibeli. Implikasi sosiopolitik yang paling mengkhawatirkan adalah enggan masuknya orang-orang kompeten dan jujur ke dalam politik karena mereka tidak memiliki modal finansial yang cukup untuk bersaing dalam pasar suara yang transaksional. Ia berargumen, "Jika kontestasi hanya jadi ajang adu isi dompet, maka gagasan-gagasan hebat untuk Jakarta akan tenggelam. Kita akan kehilangan peluang dipimpin oleh orang-orang cerdas yang jujur".⁷⁶ beliau mendorong perlunya kemandirian ekonomi bagi milenial melalui pemberdayaan UMKM agar

⁷⁶ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

mereka memiliki "imunitas" terhadap godaan uang receh yang ditawarkan saat kampanye.

Perspektif Akademisi, Krisis Kognitif dan Literasi Politik

Narasumber Akademisi Saudara AP menyoroti adanya kesenjangan antara kesadaran politik dan tindakan nyata. Melalui kacamata akademis, ia melihat bahwa literasi politik yang rendah membuat milenial mudah terjebak dalam disonansi kognitif. Milenial mungkin mengetahui bahwa politik uang merusak, namun karena pengaruh lingkungan sosial dan kebutuhan hidup, mereka tetap menoleransinya. AP menyatakan bahwa tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana membangun "moral firewall" pada pemilih muda agar mereka tidak hanya menjadi penonton yang sinis, tetapi menjadi aktor yang aktif menolak praktik koruptif. Ia juga memperingatkan bahwa normalisasi politik uang akan melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada pengembalian modal investasi kampanye (payback period), yang berujung pada tindak pidana korupsi saat menjabat.

Perspektif Panwas, Kendala Struktural

Narasumber Panwas Pemilu saudara SG memberikan perspektif teknis mengenai sulitnya pemberantasan politik uang di lapangan. Ia mencatat bahwa pelaku sering kali adalah warga setempat yang sangat mengenal medan dan jadwal patroli petugas.

"Personil kami terbatas. Satu kelurahan diawasi sedikit orang, sementara gang di Petungkang Utara ini ribuan. Oknum lokal ini sangat pandai dan pintar

sekali, cara bermain mereka sangat rapi sekali... warga sering merasa takut atau enggan untuk melapor dikarenakan alasan 'nggak enak dengan tetangga'", ⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan formal oleh negara tidak akan pernah cukup tanpa adanya pengawasan partisipatif dari warga itu sendiri. Namun, selama sanksi sosial terhadap politik uang masih rendah, maka praktik ini akan terus bertahan sebagai bagian dari "ekonomi bawah tanah" pemilu.

Tabel 4.5. Perbandingan Respon Milenial Berdasarkan Latar Belakang

Nama Narasumber	Pekerjaan/Latar Belakang	Respon terhadap Politik Uang	Alasan Utama
Saudari PW	Driver Ojol	Menolak Keras / Golput.	Menjaga harga diri dan integritas.
Saudara KC	Driver Ojol	Menerima dengan Antusias.	Kebutuhan ekonomi harian (setoran).
Saudara RW	Ketua Karang Taruna	Menerima sebagai "Vitamin".	Untuk dana kegiatan organisasi pemuda.
Saudari N	Pengusaha Kontrakan	Menolak dan Curiga.	Prinsip iman dan stabilitas jangka panjang.
Saudari F	Ibu Rumah Tangga	Menerima tapi Pilih Hati Nurani.	Menghargai tetangga (tekanan sosial).

⁷⁷ Hasil wawancara narasumber Panwas Sugianto

Nama Narasumber	Pekerjaan/Latar Belakang	Respon terhadap Politik Uang	Alasan Utama
Saudari S	Ibu Rumah Tangga	Memilih yang Memberi Terbanyak.	Rasionalitas manfaat ekonomi instan.

Sumber : diolah penulis dari hasil wawancara

4.2.3.5. Sintesis Temuan dan Refleksi Sosio-Politis

Berdasarkan deskripsi hasil analisis di atas, terlihat jelas bahwa fenomena *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara bukan sekadar masalah pelanggaran hukum administratif, melainkan sebuah isu sosiokultural yang berakar pada kemiskinan dan rendahnya literasi politik. Generasi milenial, yang diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, justru terfragmentasi dalam menyikapi fenomena ini. Sebagian kecil tetap memegang teguh idealisme, namun mayoritas terjebak dalam dilema antara tuntutan perut dan integritas suara.

1. Dampak Jangka Panjang terhadap Legitimasi Kepemimpinan

Dampak yang paling nyata dari fenomena ini adalah degradasi kepercayaan milenial terhadap institusi politik. Ketika proses pemilihan dipandang sebagai sebuah transaksi dagang, maka pemimpin yang terpilih tidak lagi dipandang sebagai pemegang amanah rakyat, melainkan sebagai "pembeli" jabatan. Hal ini menciptakan siklus apatisme di mana milenial merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan mengubah apa pun jika tidak ada uang yang terlibat. Sebagaimana diungkapkan oleh saudara ZP, seorang warga

berpendidikan pascasarjana, "Milennial akan tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuasaan bisa dibeli... mereka kehilangan respek terhadap institusi... karena menganggap prosesnya sudah cacat sejak awal".⁷⁸

2. Normalisasi dan Budaya "Rezeki Pemilu"

Normalisasi praktik politik uang di Petukangan Utara telah mencapai tingkat di mana warga secara terbuka menanyakan "kapan turunnya?" bantuan materiil kepada tim sukses. Saudara RW sebagai Ketua Karang Taruna di tingkat RW mengakui bahwa "warga akan merasa heran jika tidak ada tim sukses yang "turun" membawa materi." Istilah-istilah eufemisme seperti "uang bensin," "vitamin," atau "uang transport" digunakan untuk mereduksi beban moral dari tindakan suap elektoral tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi "budaya" yang mengakar secara sosiologis, yang memerlukan upaya dekonstruksi nilai secara masif dan berkelanjutan.

Laporan analisis ini menunjukkan bahwa respon milenial terhadap politik uang di Petukangan Utara dipengaruhi secara signifikan oleh status ekonomi dan tingkat pendidikan. Pemilih milenial yang terhimpit secara ekonomi cenderung merespon secara pragmatis, sementara mereka yang memiliki kemandirian finansial cenderung lebih idealis. Oleh karena itu, strategi pemberantasan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum formal melalui Bawaslu, tetapi harus

⁷⁸ wawancara dengan warga Masyarakat Sdr. ZP, di Jalan Anggrek Rt.007/05, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 17/12/2025, 15.00 WIB

diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan politik yang berbasis pada isu-isu nyata yang dihadapi warga.

Tokoh agama dan masyarakat di Petukangan Utara memiliki peran sentral sebagai penjaga moral (*moral guardian*) untuk memutus rantai politik uang di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan persuasif yang menyentuh harga diri dan tanggung jawab masa depan, milenial dapat didorong untuk bertransformasi dari pemilih transaksional menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak kutipan narasumber, kualitas pemimpin Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh keberanian milenial saat ini untuk menolak godaan materiil sesaat demi kesejahteraan bangsa yang berkelanjutan. Perjuangan melawan *Money politics* di Petukangan Utara adalah cermin dari perjuangan demokrasi Indonesia dalam menjaga kesucian suara rakyat dari intervensi modal yang merusak.

4.3. Pembahasan Temuan penelitian

Dinamika politik Indonesia pada tahun 2024 menandai fase krusial dalam konsolidasi demokrasi, di mana transisi kepemimpinan nasional melalui Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) menjadi panggung utama bagi keterlibatan aktif warga negara. Dalam konteks Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, fenomena ini tidak hanya sekadar rutinitas elektoral lima tahunan, melainkan sebuah manifestasi kompleks dari pertarungan antara nilai-nilai idealisme demokrasi dan realitas pragmatisme lapangan yang diwarnai oleh praktik

money politics. Generasi milenial, sebagai kohort demografis yang mendominasi daftar pemilih, berada di pusat pusaran ini, menghadapi tarikan antara literasi digital yang tinggi dan kerentanan ekonomi yang dieksploitasi melalui berbagai modus operandi politik transaksional.

4.3.1. Partisipasi politik generasi milenial dalam Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Sub-fokus pertama penelitian ini (4.2.1) mengeksplorasi tingkat dan bentuk partisipasi politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara. Berdasarkan temuan lapangan, partisipasi milenial di wilayah ini menunjukkan pola yang sangat dinamis dan beragam, yang jika dikaitkan dengan Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, merupakan manifestasi dari kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.⁷⁹ Huntington dan Nelson menekankan bahwa partisipasi dapat bersifat otonom atau dimobilisasi, dan di Petukangan Utara, kedua bentuk ini terlihat saling berkelindan secara unik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa milenial di wilayah urban ini memiliki kecenderungan partisipasi yang bersifat "gladiator digital," sebuah konsep yang diadaptasi dari tipologi Milbrath dan Goel⁸⁰. Mereka tidak hanya menjadi

⁷⁹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1977), hlm. 3.

⁸⁰ Lester W. Milbrath dan M. L. Goel, *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*, Edisi ke-2, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977), hlm. 18-20.

penonton (*spectators*), tetapi aktif dalam arena digital untuk menyebarkan informasi, melakukan perdebatan, dan melakukan pengawasan proses pemilu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Hal ini sejalan dengan karakteristik milenial yang dijelaskan oleh Strauss dan Howe, di mana generasi ini digambarkan sebagai kelompok yang *special*, *confident*, dan *team-oriented*. Kepercayaan diri mereka dalam menyuarakan pendapat di ruang siber mencerminkan perasaan bahwa mereka memiliki peran vital bagi bangsa, sebuah perasaan yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak melalui pola asuh yang melindungi (*sheltered*).⁸¹

Namun, terdapat perbedaan yang mencolok antara partisipasi ekspresif di dunia digital dan partisipasi instrumental di dunia nyata. Arlis Prayugo, sebagai narasumber akademisi, mencatat bahwa meskipun milenial sangat vokal di media sosial, kehadiran fisik mereka dalam kegiatan kampanye konvensional terkadang bersifat selektif.⁸² Hal ini dapat dijelaskan melalui teori pluralisme otonom dari Robert A. Dahl. Di Kelurahan Petukangan Utara, organisasi seperti Karang Taruna menjadi wadah bagi milenial untuk mengejawantahkan praktek demokrasi pluralis. Partisipasi mereka di sini tidak selalu didorong oleh ideologi partai, melainkan oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian bagi program komunitas mereka, yang menunjukkan pergeseran dari politik identitas tradisional menuju politik berbasis isu dan kepentingan lokal.⁸³

⁸¹ William Strauss dan Neil Howe, *Millennials Rising: The Next Great Generation*, (New York: Vintage Books, 2000), hlm. 43-45

⁸² wawancara dengan Akademisi Sdr. AP, di Kampus STIPAN Jakarta, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB

⁸³ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis*, Terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 45.

Dilihat dari sisi legalitas dan kedaulatan rakyat, pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai sistem demokrasi perwakilan memberikan landasan bagi tingginya angka kehadiran (*voter turnout*) di Kelurahan Petukangan Utara yang mencapai angka signifikan. Milenial di wilayah ini menyadari bahwa suara mereka adalah satu-satunya instrumen sah untuk menentukan arah kebijakan nasional selama lima tahun ke depan.⁸⁴ Penemuan bahwa milenial cenderung melakukan *fact-checking* secara mandiri sebelum memilih di bilik suara menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini memverifikasi teori perilaku pemilih yang menyatakan bahwa akses terhadap informasi merupakan variabel krusial yang membentuk preferensi rasional pemilih pemula.⁸⁵

Tabel 4.6. Relevansi Konsep/Teori dari hasil temuan terhadap dimensi partisipasi politik

Dimensi Partisipasi Politik	Temuan di Petukangan Utara	Relevansi Teori/Konsep
Bentuk Aktivitas	Dominasi kampanye digital, pengawasan rekapitulasi suara (C1) secara sukarela.	Partisipasi Ekspresif (Milbrath & Goel); Karakteristik Digital-Driven (Strauss & Howe).
Motivasi Utama	Harapan stabilitas harga sembako, lapangan kerja, dan eksistensi komunitas.	Teori Pilihan Rasional (Anthony Downs); Kebutuhan Manusia (Maslow dalam konteks politik).

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 158-160.

⁸⁵ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York: Harper & Row, 1957), hlm. 210-215.

Dimensi Partisipasi Politik	Temuan di Petukangan Utara	Relevansi Teori/Konsep
Basis Keputusan	Pengaruh <i>influencer</i> digital dan riset mandiri di media sosial.	Akses Informasi dalam Poliarki (Robert Dahl); Kesadaran Politik Digital.
Hambatan Partisipasi	Kendala waktu kerja bagi sektor informal (ojek online) dan kelelahan informasi.	Biaya Partisipasi dalam Teori Pilihan Rasional (Downs).

Secara sosiologis, keterlibatan milenial di Petukangan Utara juga mencerminkan teori generasi Karl Mannheim, di mana mereka yang melewati masa sosio-sejarah yang sama (era digitalisasi dan keterbukaan informasi pasca-reformasi) membentuk karakter politik yang serupa.⁸⁶ Mereka lebih skeptis terhadap janji-janji abstrak dan lebih responif terhadap narasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, partisipasi mereka bukan lagi sekadar mobilisasi massa yang kaku, melainkan gerakan yang lebih organik dan cair yang memanfaatkan jejaring sosial online sebagai mesin penggerak utama.

4.3.2. Analisis Bentuk-bentuk dan Pola Money Politics, Infiltrasi Transaksional dalam Struktur Urban Kelurahan Petukangan Utara

Mengenai sub-fokus kedua (4.2.2) mengungkap realitas yang kontradiktif dengan idealisme demokrasi. Praktik *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara telah bermetamorfosis menjadi berbagai bentuk yang melampaui sekadar

⁸⁶ Karl Mannheim, "The Problem of Generations," dalam *Essays on the Sociology of Knowledge*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1952), hlm. 276.

uang tunai. Ismawan mendefinisikan politik uang sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan imbalan materiil, dan temuan di lapangan memverifikasi bahwa praktik ini terjadi secara sistematis dan terstruktur.⁸⁷

Bentuk pertama yang paling persisten adalah pemberian uang tunai konvensional yang sering dijuluki "uang bensin" atau "vitamin." Pola distribusinya dilakukan melalui mekanisme *door-to-door* yang memanfaatkan celah pengawasan di gang-gang sempit Petukangan Utara. Informan generasi milenial saudara TA, seorang penjaga malam, secara blak-blakan mengakui perannya sebagai broker politik atau kaki tangan tim sukses untuk menyalurkan amplop pada masa tenang. Hal ini secara teoritis mengacu pada konsep kekuasaan Miriam Budiardjo, di mana kekuasaan (dalam hal ini uang) digunakan untuk memaksakan kehendak atau memengaruhi pilihan politik pemilih yang berada dalam posisi ekonomi rentan.⁸⁸

Bentuk kedua adalah modernisasi instrumen politik uang melalui media digital, seperti transfer saldo *e-wallet* (Dana, OVO, GoPay) atau voucher pulsa. Temuan ini sangat krusial karena menyasar karakteristik milenial yang sangat bergantung pada teknologi. Berbeda dengan uang tunai yang meninggalkan jejak fisik, praktik politik uang digital ini lebih sulit dilacak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena sering disamarkan sebagai hadiah kuis atau *giveaway* di media sosial.⁸⁹ Fenomena ini menunjukkan adaptasi taktis dari para elit politik yang

⁸⁷ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Jakarta: Media Pressindo, 1999), hlm. 15.

⁸⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35-37.

⁸⁹ wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Sdr. SG, di Rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang, tanggal 15/12/2025, Pukul 19.00 WIB

menggunakan prinsip realpolitik Machiavelli, di mana "tujuan menghalalkan cara" demi mengamankan kemenangan elektoral di segmen pemilih muda yang luas.⁹⁰

Bentuk ketiga adalah "Jariyah Politis" atau pemberian fasilitas umum seperti bantuan semen untuk masjid, cat untuk fasilitas RW, hingga paket sembako murah. Pola ini dikategorikan oleh Ahmad sebagai upaya menarik simpati melalui "politik pencitraan".⁹¹ Di Petungkana Utara, pemberian ini seringkali ditunggangi pada program bantuan sosial (Bansos) yang sudah ada, menciptakan kekaburan antara bantuan negara dan "kebaikan hati" kandidat tertentu. Hal ini merusak konsep legitimasi yang seharusnya dibangun di atas integritas prosedural, bukan atas dasar utang budi materiil.

Tabel 4.7. Kategori, instrumen dan pola distribusi sesuai teori pada Bab II

Kategori Money Politics	Instrumen Materiil	Pola Distribusi di Lapangan	Dasar Teori/Konsep
Konvensional	Amplop Uang (Rp100rb-200rb), Paket Sembako lengkap.	<i>Serangan Fajar, Door-to-Door</i> oleh broker lokal pada masa tenang.	Teori Jual Beli Suara (Juliansyah); Kekuasaan (Miriam Budiardjo).
Digital Modern	Saldo E-Wallet, Voucher Pulsa, Kuota Internet.	Distribusi via grup WA komunitas, kuis digital berhadiah, pendaftaran relawan fiktif.	Adaptasi Teknologi; Realpolitik (Machiavelli); Digital Corruption.

⁹⁰ Niccolò Machiavelli, *The Prince*, Translated by George Bull, (London: Penguin Books, 2003), hlm. 61.

⁹¹ Nyarwi Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 88-90.

Kategori Money Politics	Instrumen Materiil	Pola Distribusi di Lapangan	Dasar Teori/Konsep
Fasilitas Sosial	Semen, Cat, Janji Fasilitas Olahraga, Bantuan Masjid.	Penyaluran melalui struktur informal (RT/RW) atau organisasi kepemudaan.	Jariyah Politis (Ahmad); Politik Pencitraan dan Tebar Pesona.
Infiltrasi Bansos	Klaim bantuan pemerintah sebagai bantuan paslon.	Disisipi stiker atau kartu nama calon saat pembagian bansos resmi.	Manipulasi Legitimasi; Penyalahgunaan Sumber Daya Negara.

Sumber: data diolah penulis

Pola distribusi yang ditemukan menunjukkan penggunaan struktur informal sebagai jalur utama. Tokoh masyarakat atau perantara lokal yang dihormati di lingkungan Petukangan Utara berperan sebagai *gatekeeper*. Mereka memiliki data akurat mengenai "siapa yang bisa dipengaruhi" di setiap gang, yang membuktikan bahwa di wilayah urban padat, hubungan patron-klien masih menjadi faktor determinan dalam efektivitas politik uang. Hal ini menantang asumsi bahwa masyarakat kota sepenuhnya otonom; sebaliknya, kepadatan penduduk justru memudahkan tim sukses untuk melakukan pemetaan dan penetrasi transaksional secara terfokus.

4.3.3. Fenomena *Money politics* dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial, Rasionalitas Pragmatis dalam Bayang-bayang Krisis Integritas

Sub-fokus 4.2.3 merupakan inti dari diskusi peneliti, yaitu bagaimana milenial merespon gempuran politik uang tersebut. Analisis ini sangat relevan jika dihubungkan dengan *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional) dari Anthony Downs. Downs berasumsi bahwa individu adalah aktor rasional yang membuat keputusan dengan mengevaluasi biaya dan manfaat untuk memaksimalkan utilitas mereka.⁹² Di Petukangan Utara, respon milenial terbelah menjadi empat pola utama yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat literasi politik.

Pertama, pola respon pragmatis-instrumental. Kelompok milenial yang menghadapi kesulitan ekonomi harian, seperti ojek online atau ibu rumah tangga, cenderung menerima politik uang sebagai bantuan instan yang rasional. Saudara KC, seorang pengemudi ojek online, menganggap pemberian uang atau sembako sebagai bukti nyata kepedulian calon terhadap rakyat kecil. Baginya, pilihan politik didasarkan pada siapa yang memberikan manfaat materiil paling besar saat ini, sebuah bentuk *transactional politics* yang mengabaikan visi-misi jangka panjang demi kelangsungan hidup harian.⁹³

Kedua, pola respon "Ambil Barangnya, Pilih Sesuai Hati." Ini adalah fenomena unik yang menunjukkan kecerdikan milenial. Mereka menyadari bahwa politik uang adalah salah secara etika, namun karena tekanan sosial atau kebutuhan ekonomi, mereka tetap menerima materi tersebut. Namun, di bilik suara, mereka tetap menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani atau preferensi idealis mereka.

⁹² Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York: Harper & Row, 1957), hlm. 36-38.

⁹³ wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. KC, di Jl Masjid Darul Fallah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 11/11/2025, 10.00 WIB

Secara psikologis, ini merupakan bentuk eliminasi terhadap "utang budi" dengan menganggap uang tersebut sebagai "rezeki pemilu" atau "uang rakyat yang kembali". Hal ini memverifikasi teori perilaku pemilih yang menyatakan bahwa pilihan akhir seringkali dipisahkan dari stimulasi materiil awal jika pemilih memiliki identitas politik yang kuat.

Ketiga, pola respon idealis-perlawanan. Kelompok milenial terdidik dan memiliki kemandirian ekonomi cenderung menolak keras politik uang. Narasumber generasi milenial saudara N, seorang pengusaha lokal, memandang praktik ini sebagai penghinaan terhadap integritasnya. Baginya, calon yang menggunakan uang justru menunjukkan ketidakmampuan dan potensi korupsi di masa depan. Kelompok ini seringkali melakukan "perlawanan diam-diam" dengan tidak memilih kandidat yang terbukti melakukan bagi-bagi materi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip moral yang mereka anut.⁹⁴

Keempat, pola respon apatisme-protes (Golput). Temuan penelitian menunjukkan adanya milenial yang memilih untuk tidak memberikan suara sama sekali sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap sudah cacat oleh politik uang. Narasumber dari generasi milenial saudara PW menggambarkan keputusannya untuk golput karena merasa muak melihat lingkungan Petukangan Utara yang berubah menjadi "pasar malam politik." Dalam perspektif Downs, ini adalah keputusan rasional untuk tidak berpartisipasi karena biaya moral dan

⁹⁴ wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. N, di Jl. Muhtar Raya, RT. 003/011. Petukangan Utara, Pesangrahan, tanggal 5/11/2025, 12.57 WIB

kekecewaan sistemik dianggap jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan dari proses yang dianggap tidak jujur.⁹⁵

Tabel 4.8. Karakteristik Responden/Narasumber

Tipologi Respon Milenial	Dasar Pemikiran (Teori)	Implikasi terhadap Demokrasi	Karakteristik Responden
Pragmatis-Absolut	Rasionalitas manfaat langsung (Anthony Downs).	Memperlemah kualitas kepemimpinan; suara dapat dibeli.	Milenial ekonomi rendah; pekerja sektor informal.
Strategis-Cerdik	Disonansi kognitif; pemisahan ekonomi & politik.	Menciptakan loyalitas semu bagi kandidat pemberi.	Milenial yang merasa uang adalah hak, suara adalah rahasia.
Idealis-Normatif	Etika politik dan integritas (Miriam Budiardjo).	Menjaga kualitas demokrasi dan meritokrasi.	Milenial berpendidikan tinggi/mandiri secara ekonomi.
Apatisme Aktif	Protes terhadap impurity sistem (Downs).	Menurunkan legitimasi pemenang; delegitimasi sistem.	Milenial yang sangat kecewa pada praktik koruptif di lapangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *Money politics* memiliki dampak ganda (*double-edged sword*). Di satu sisi, ia berhasil memobilisasi kehadiran fisik di TPS, namun di sisi lain, ia mengikis kepercayaan (*trust*) terhadap institusi politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Narasumber anggota DPRD ibu YY, jika milenial

⁹⁵ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York: Harper & Row, 1957), hlm. 260-265.

percaya bahwa kekuasaan bisa dibeli, maka orang-orang kompeten tanpa modal akan enggan masuk ke politik, yang pada akhirnya akan menyebabkan "krisis talenta" dalam kepemimpinan nasional.⁹⁶ Peneliti berargumen bahwa normalisasi praktik ini di Petukangan Utara bukan hanya masalah pelanggaran hukum, melainkan masalah sosiokultural di mana integritas kedaulatan rakyat sedang dipertaruhkan demi keuntungan materiil jangka pendek.

Interpretasi Hubungan Antara Temuan Lapangan dan Kerangka Teoritis (Krisis Legitimasi dan Tantangan Meritokrasi)

Pembahasan peneliti terhadap temuan di atas membawa pada kesimpulan bahwa demokrasi di tingkat lokalitas Kelurahan Petukangan Utara sedang mengalami fase "demokrasi prosedural yang rapuh." Jika kita hubungkan kembali dengan Teori Politik Miriam Budiardjo, legitimasi pemimpin yang lahir dari proses transaksional akan cenderung lemah di mata kelompok milenial yang kritis. Meskipun pemimpin tersebut memiliki otoritas formal karena menang dalam pemilu, ia akan kehilangan kewibawaan moral jika kemenangannya didasarkan pada strategi "adu isi dompet".⁹⁷

Penggunaan metode digital dalam politik uang memverifikasi bahwa perkembangan teknologi informasi tidak selalu berbanding lurus dengan

⁹⁶ wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB

⁹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 53-55.

peningkatan kualitas demokrasi. Karakteristik milenial yang *confident* dan *achieving* dalam prestasi akademik ternyata tidak serta merta membuat mereka kebal terhadap manipulasi transaksional, terutama ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi urban yang berat. Teori generasi Mannheim menunjukkan bahwa meskipun mereka satu kohort usia, perbedaan kelas sosial menciptakan respon yang berbeda terhadap rangsangan politik yang sama.⁹⁸

Selain itu, temuan mengenai peran broker politik di gang-gang sempit menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia masih terperangkap dalam pola patronase. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam poliarki Robert Dahl, di mana setiap individu seharusnya memiliki otonomi penuh dalam menentukan pilihan tanpa tekanan atau iming-imingan materiil.⁹⁹ Keberadaan tokoh masyarakat sebagai penyalur materi memperkuat struktur kekuasaan yang tidak setara, di mana elite politik mengeksploitasi ketergantungan warga demi akumulasi suara.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik milenial di Kelurahan Petukangan Utara, tidak cukup hanya dengan mengandalkan literasi digital. Diperlukan penguatan kemandirian ekonomi dan penegakan hukum yang lebih tajam terhadap modus operandi baru politik uang digital. Tanpa upaya ini, kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap menjadi komoditas yang

⁹⁸ Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1952), hlm. 304-306.

⁹⁹ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 2-3.

diperjualbelikan di pasar gelap demokrasi, mengancam masa depan kepemimpinan nasional yang seharusnya berbasis pada visi, misi, dan rekam jejak yang bersih.¹⁰⁰

Pendalaman Karakteristik Generasi Milenial di Petukangan Utara (Tinjauan Berdasarkan Teori Strauss dan Howe)

Untuk memahami mengapa respon milenial di Petukangan Utara sangat bervariasi, peneliti perlu melakukan eksplorasi mendalam terhadap karakteristik generasi ini sebagaimana dipaparkan dalam sub-bab 2.1.5. kerangka teoritis. Strauss dan Howe dalam karya mereka, *Millennials Rising*, memberikan tujuh atribut inti yang dapat kita lihat manifestasinya dalam perilaku pemilih di lokasi penelitian.

Pertama adalah sifat *Special* (Istimewa). Milenial di Petukangan Utara yang aktif dalam gerakan relawan digital merasa bahwa partisipasi mereka sangat penting bagi masa depan Indonesia. Mereka merasa "dipilih" untuk melakukan perubahan. Hal ini terlihat dari cara mereka membagikan konten kampanye yang bersifat edukatif. Namun, rasa keistimewaan ini juga membuat mereka mudah kecewa (apatis) ketika melihat realitas lapangan yang kotor oleh politik uang. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber warga Masyarakat saudara ZP, milenial yang teredukasi merasa dikhianati oleh sistem yang transaksional.¹⁰¹

Kedua, atribut *Sheltered* (Terlindungi). Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini membuat mereka cenderung

¹⁰⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰¹ wawancara dengan warga Masyarakat Sdr. ZP, di Jalan Anggrek Rt.007/05, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 17/12/2025, 15.00 WIB

mencari stabilitas. Dalam konteks politik, stabilitas ini seringkali diartikan sebagai stabilitas ekonomi. Itulah sebabnya isu harga sembako dan lapangan kerja menjadi magnet utama yang menggerakkan mereka ke TPS. Respon saudara F narasumber generasi milenial yang mengutamakan harga bahan pokok mencerminkan kebutuhan akan perlindungan ekonomi yang stabil.¹⁰²

Ketiga, atribut *Confident* (Percaya Diri). Kepercayaan diri milenial di Petukangan Utara terlihat dari keberanian mereka dalam melakukan *fact-checking* terhadap visi-misi kandidat. Mereka tidak lagi hanya mengikuti pilihan orang tua. Namun, kepercayaan diri ini juga bisa berubah menjadi "rasionalitas pragmatis" ketika mereka merasa mampu "memainkan sistem" yakni dengan menerima uang dari semua paslon namun tetap menjaga rahasia pilihannya. Mereka merasa cukup pintar untuk tidak terjebak oleh suap tersebut, meskipun secara sistemik tindakan mereka tetap menyuburkan praktik tersebut.

Tabel 4.9. Atribut Strauss & Howe, Manifestasi dan dampak Keputusan politik

Atribut Strauss & Howe	Manifestasi pada Milenial Petukangan Utara	Dampak pada Keputusan Politik
Team-Oriented	Aktivitas di Karang Taruna dan grup relawan digital.	Keputusan sering dipengaruhi oleh konsensus kelompok atau <i>influencer</i> .
Achieving	Fokus pada isu lapangan kerja dan kemandirian UMKM.	Menilai kandidat berdasarkan kemampuan memperbaiki ekonomi personal.

¹⁰² wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. F di Jl. H.Najih RT.08/01, Petukangan Utara, Pesangrahan, tanggal 5/11/2025, 09.15 WIB

Atribut Strauss & Howe	Manifestasi pada Milenial Petukangan Utara	Dampak pada Keputusan Politik
Pressured	Tekanan ekonomi urban dan cicilan hidup di Jakarta.	Menjadikan mereka rentan terhadap insentif politik uang jangka pendek.
Conventional	Menghargai norma sosial tetangga (tekanan broker lokal).	Menerima amplop karena rasa "nggak enak" dengan tetangga yang memberi.

Sumber: data diolah penulis

Peneliti berpendapat bahwa atribut-atribut ini menciptakan profil pemilih yang sangat volatil. Di satu sisi mereka progresif secara digital, namun di sisi lain mereka terikat secara sosiologis dan ekonomis pada realitas pragmatis di gang-gang sempit Jakarta Selatan. Dinamika ini memperjelas mengapa tingkat partisipasi politik mereka meningkat secara kuantitas, namun kualitasnya masih dibayangi oleh tantangan integritas.¹⁰³

Mekanisme Broker Politik dan Patronase Urban (Analisis Kekuasaan Miriam Budiardjo dalam Modus Operandi)

Sub-bab 2.1.1 membahas mengenai Teori Politik, khususnya konsep kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Dalam pembahasan hasil penelitian mengenai bentuk dan pola *Money politics* (4.2.2), peneliti menemukan bahwa kekuasaan di Kelurahan Petukangan Utara tidak bekerja secara linear dari atas ke bawah, melainkan melalui jaringan labirin perantara atau broker.

¹⁰³ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2013), hlm. 142-145.

Broker politik di Petukangan Utara adalah individu-individu yang memiliki "Otoritas Tradisional" atau "Otoritas Sosial" di tingkat RT/RW. Mereka adalah jembatan yang mengubah kekuasaan materiil (dana kampanye dari paslon) menjadi legitimasi (suara di TPS). Penjaga malam seperti narasumber generasi milenial saudara TA atau ketua organisasi seperti narasumber saudara RW adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan didistribusikan melalui jaringan informal. Mereka menggunakan hubungan personal untuk melakukan persuasi yang dibarengi dengan pemberian insentif.¹⁰⁴

Secara teoritis, ini adalah bentuk dari *Patron-Client Relationship* yang sangat kuat di wilayah urban padat. Patron (kandidat) memberikan sumber daya (uang/barang) kepada klien (pemilih) melalui perantara (broker). Sebagai imbalannya, klien memberikan dukungan politik. Di Petukangan Utara, hubungan ini disamarkan dengan sangat rapi. Pola "ngetok pintu" di malam hari atau subuh (serangan fajar) adalah taktik untuk menghindari pengawasan formal Panwaslu. Narasumber saudara SG, sebagai petugas Panwas, mengakui keterbatasan personelnnya untuk menembus jaringan informal yang sangat tertutup ini.¹⁰⁵

Peneliti juga menemukan adanya penyalahgunaan wewenang melalui infiltrasi program bantuan sosial negara. Ketika seorang kandidat mengklaim bansos pemerintah sebagai jasanya, ia sedang melakukan manipulasi terhadap konsep "Otoritas." Rakyat yang seharusnya tunduk pada otoritas negara yang sah,

¹⁰⁴ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Demokrasi Dijual: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Terj. Robertus Robet, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 70.

¹⁰⁵ wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Sdr. SG, di Rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang, tanggal 15/12/2025, Pukul 19.00 WIB

malah dipaksa untuk merasa berhutang budi pada otoritas personal kandidat. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.¹⁰⁶

Dampak dari pola ini adalah terciptanya "Legitimasi Semu." Pemimpin yang terpilih mungkin menang secara angka, namun di mata milenial yang mengetahui proses transaksional tersebut, pemimpin tersebut kehilangan kewibawaan moralnya. Hal ini akan berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan sukarela dari warga negara terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut di masa depan, karena proses perolehan kekuasaannya dianggap cacat sejak awal.¹⁰⁷

Rasionalitas Ekonomi dalam Politik (Verifikasi Teori Anthony Downs pada Respon Generasi Milenial)

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang dipaparkan dalam sub-bab 2.1.3 kerangka teoritis menjadi instrumen paling tajam untuk membedah respon milenial di sub-fokus 4.2.3. Anthony Downs dalam *An Economic Theory of Democracy* menyatakan bahwa dalam pemilu, partai politik bertindak seperti pengusaha yang menjual produk (kebijakan/janji) untuk mendapatkan suara,

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 282 dan Pasal 283.

¹⁰⁷ Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, Terj. Thomas McCarthy, (Boston: Beacon Press, 1975), hlm. 68-70.

sementara pemilih adalah konsumen yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan pengeluaran energi seminimal mungkin.¹⁰⁸

Di Petungkana Utara, respon milenial mencerminkan kalkulasi biaya-manfaat tersebut. Narasumber generasi milenial saudara KC dan saudari S, yang berasal dari kelas ekonomi bawah, secara eksplisit menyatakan bahwa mereka memilih calon yang memberikan "bantuan" paling besar. Dalam logika mereka, manfaat langsung berupa uang Rp100.000 atau paket sembako memiliki nilai utilitas yang lebih pasti dan segera dirasakan daripada janji-janji abstrak tentang pertumbuhan ekonomi makro yang belum tentu berdampak pada dapur mereka. Ini adalah manifestasi dari *Bounded Rationality* (rasionalitas yang terbatas oleh kondisi ekonomi).¹⁰⁹

Namun, respon milenial lainnya seperti narasumber generasi milenial saudari N dan PW menunjukkan dimensi rasionalitas yang berbeda, yaitu "Rasionalitas Berbasis Integritas." Mereka menghitung bahwa jika mereka menerima uang hari ini, maka biaya jangka panjang yang harus dibayar adalah pemerintahan yang korup dan pembangunan yang terhambat. Mereka lebih memilih untuk menolak uang tersebut atau bahkan memilih golput sebagai bentuk "Investasi Integritas" untuk masa depan.¹¹⁰

Dilema moral yang muncul, sebagaimana diakui oleh beberapa informan milenial, menunjukkan adanya pertentangan antara *Self-Interest* (kepentingan

¹⁰⁸ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, (New York: Harper & Row, 1957), hlm. 36.

¹⁰⁹ Herbert A. Simon, *Models of Man: Social and Rational*, (New York: John Wiley & Sons, 1957), hlm. 198-200.

¹¹⁰ Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 145.

pribadi) dan *Social/Moral Factors*. Meskipun Downs lebih menekankan pada kepentingan pribadi, dalam konteks masyarakat religius seperti di Petukangan Utara, faktor moral (seperti nasihat dari narasumber tokoh agama saudara GW mengenai larangan suap dalam agama) tetap menjadi variabel yang memengaruhi perhitungan rasional milenial.¹¹¹ Beberapa milenial memilih untuk "menyelamatkan diri" dari beban moral dengan cara menerima barangnya namun tidak memilih orangnya—sebuah strategi untuk mendapatkan utilitas materiil sekaligus menjaga integritas suara di hadapan Tuhan dan nurani mereka.

Secara teoritis, temuan ini memverifikasi bahwa milenial bukanlah massa yang pasif. Mereka adalah aktor strategis yang mampu melakukan kalkulasi di tengah impitan ekonomi. Namun, tantangan bagi demokrasi ke depan adalah bagaimana menggeser rasionalitas pragmatis-instrumental ini menuju rasionalitas substantif-idealis, sehingga pilihan politik tidak lagi ditentukan oleh isi amplop, melainkan oleh kualitas gagasan.¹¹²

Sintesis Temuan dengan Masa Depan Demokrasi di Tingkat Lokal

Secara keseluruhan, pembahasan peneliti terhadap hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Petukangan Utara merupakan mikrokosmos dari tantangan demokrasi Indonesia secara luas. Partisipasi generasi milenial yang tinggi secara kuantitas masih harus berhadapan dengan infiltrasi praktik *Money politics*

¹¹¹ wawancara dengan Tokoh Agama Sdr. GW. di Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 10.42 WIB

¹¹² Max Weber, *Economy and Society*, Ed. Guenther Roth & Claus Wittich, (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24-26.

yang semakin cerdas dan terdigitalisasi. Hubungan antara temuan lapangan dan kerangka teoritis membuktikan bahwa perilaku pemilih milenial urban sangat kompleks, dipengaruhi oleh tarikan antara kemajuan teknologi digital dan struktur sosial-ekonomi yang masih tradisional-transaksional.¹¹³

Peneliti menyimpulkan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai politik uang di kalangan milenial adalah melalui peningkatan efikasi politik dan kemandirian ekonomi. Selama politik dianggap sebagai ajang jual beli suara, maka aspirasi tulus dari kaum muda akan selalu tenggelam oleh kekuatan modal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendidikan politik yang berkelanjutan dari akademisi, ketegasan pengawasan dari lembaga pemilu, serta integritas dari tokoh masyarakat untuk membentengi generasi milenial dari godaan pragmatisme sesaat demi kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

¹¹³ Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*, (London: Rowman & Littlefield, 2017), hlm. 112.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Interpretasi Dan Verifikasi Fenomena *Money politics* Serta Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial

Dinamika politik elektoral di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2024, telah menunjukkan sebuah lanskap yang sangat kompleks di tingkat akar rumput. Kelurahan Petukangan Utara, yang terletak di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menjadi sebuah mikrokosmos yang merepresentasikan ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas transaksional. Sebagai wilayah urban padat dengan populasi milenial mencapai 33% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), fenomena partisipasi politik di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh masif praktik *money politics*. Bab ini akan menyajikan kesimpulan menyeluruh melalui interpretasi dan verifikasi temuan penelitian dengan mengaitkannya secara mendalam pada konsep-konsep serta teori ilmu politik yang telah dibangun. Analisis ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada sub-bab 1.3, yakni mengenai tingkat partisipasi, bentuk dan pola politik uang, serta respon dan keputusan politik generasi milenial di lokasi penelitian.

5.1.2. Interpretasi Temuan Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial: Verifikasi Teori Partisipasi dan Karakteristik Generasi

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara pada Pilpres 2024 berada pada level yang sangat signifikan secara kuantitas. Hal ini terverifikasi dari data nasional yang mencatat angka kehadiran pemilih sebesar 81,78%, yang di lapangan Petukangan Utara terlihat dari antrean panjang pemilih muda di 121 Rukun Tetangga (RT) sejak pagi hari. Namun, interpretasi kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi ini tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa tipologi yang mencerminkan karakteristik unik generasi milenial sebagaimana dijelaskan oleh Strauss dan Howe.¹¹⁴

Berdasarkan teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel, milenial di Kelurahan Petukangan Utara dapat dikategorikan sebagai "Gladiator Digital". Temuan ini memverifikasi bahwa milenial urban cenderung menggunakan media sosial sebagai arena utama keterlibatan politik mereka. Arlis Prayugo, sebagai narasumber akademisi, menegaskan bahwa milenial di wilayah ini lebih menyukai bentuk partisipasi politik yang bersifat ekspresif daripada instrumental. Mereka sangat aktif menyebarkan konten kampanye, melakukan diskusi di grup WhatsApp warga, serta terlibat dalam perdebatan di platform TikTok dan Instagram. Aktivitas digital ini merupakan perwujudan dari karakteristik *Confident* (Percaya Diri) yang melekat pada milenial, di mana mereka merasa memiliki peran vital bagi bangsa dan memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapat di ruang siber.

¹¹⁴ William Strauss dan Neil Howe, *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*, (New York: William Morrow and Company, 1991), hlm. 335-340.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran signifikan dari cara partisipasi konvensional. Generasi milenial cenderung mandiri dalam mencari informasi dibandingkan generasi senior yang lebih bergantung pada mobilisasi tokoh lokal. Temuan ini selaras dengan teori perilaku pemilih yang menyatakan bahwa akses terhadap informasi merupakan variabel penentu dalam poliarki Robert Dahl.¹¹⁵ Milenial di Petukangan Utara melakukan *fact-checking* mandiri terhadap visi-misi kandidat melalui gawai mereka sebelum memutuskan datang ke bilik suara. Kedewasaan politik ini juga terlihat dari peran aktif mereka dalam mengawal integritas hasil pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana banyak milenial secara sukarela memantau penghitungan suara dan mendokumentasikan formulir C1 sebagai upaya mencegah manipulasi.

Interpretasi terhadap motivasi partisipasi milenial di Petukangan Utara mengungkapkan adanya tarikan antara kebutuhan ekonomi dan kesadaran normatif. Sesuai dengan Teori Pilihan Rasional dari Anthony Downs, individu membuat keputusan dengan mengevaluasi biaya dan manfaat untuk memaksimalkan utilitas mereka. Bagi milenial yang telah berkeluarga dan berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, partisipasi politik dipandang sebagai sarana untuk memastikan stabilitas ekonomi rumah tangga. Harapan akan penurunan harga sembako dan tersedianya lapangan kerja menjadi motor penggerak utama mereka ke TPS. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di tingkat lokal sering kali

¹¹⁵ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 3.

bersifat "transaksional-kebijakan", di mana suara diberikan dengan ekspektasi adanya imbal balik kebijakan yang meringankan beban hidup harian.

Di sisi lain, terdapat kelompok milenial yang berpartisipasi atas dasar nilai integritas dan idealisme. Kelompok ini, yang diwakili oleh responden dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi atau kemandirian ekonomi. Verifikasi teoretis terhadap pandangan Jimly Asshiddiqie menunjukkan bahwa kelompok ini menyadari pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan yang sah dan sarana pendidikan politik yang mendewasakan. Motivasi mereka bukan lagi sekadar keuntungan materiil sesaat, melainkan stabilitas nasional jangka panjang.

Hambatan Partisipasi, Kendala Struktural Masyarakat Urban

Meskipun tingkat partisipasi secara umum tinggi, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hambatan sistemik yang menghalangi sebagian milenial di Petungkana Utara untuk berpartisipasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kendala administratif dan beban kerja ekonomi menjadi faktor penghambat utama. Pengemudi ojek daring dan pekerja sektor informal sering kali menghadapi dilema antara kehilangan penghasilan harian atau meluangkan waktu berjam-jam untuk mengantre di TPS. Hal ini mengonfirmasi teori Downs mengenai "Biaya Partisipasi", di mana individu akan abstain jika biaya yang dikeluarkan (dalam hal ini kerugian finansial dari waktu kerja) dianggap lebih besar daripada manfaat dari satu suara yang diberikan.

Beberapa milenial merasa bahwa proses politik hanya menguntungkan elit di tingkat atas tanpa memberikan dampak nyata di gang-gang sempit Kelurahan

Petukangan Utara. Verifikasi terhadap teori partisipasi kognitif menunjukkan bahwa *information overload* di media sosial terkadang berujung pada kelelahan mental, yang membuat sebagian pemilih muda memilih untuk menarik diri dari perdebatan politik dan menjadi pasif pada hari pemungutan suara.

5.1.3. Verifikasi Temuan Bentuk Dan Pola Praktik Money Politics: Dari Konvensional Hingga Digitalisasi Transaksional

Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini memverifikasi bahwa praktik *Money politics* di Kelurahan Petukangan Utara telah mengalami metamorfosis yang signifikan. Definisi politik uang menurut Ismawan, yakni upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu, terlihat jelas dalam berbagai modus operandi yang ditemukan di lapangan. Pola transaksional ini tidak lagi hanya bersifat terbuka, melainkan menyusup ke dalam struktur sosial dan teknologi informasi yang akrab dengan milenial.

Evolusi Instrumen Materiil, Modernisasi Suap Elektoral

Temuan penelitian menunjukkan adanya diversifikasi instrumen materiil yang melampaui sekadar uang tunai. Di wilayah padat penduduk Petukangan Utara, pemberian uang tunai konvensional tetap menjadi primadona, namun disamarkan dengan istilah halus seperti "uang bensin", "vitamin", atau "uang transport". Nominal yang diberikan berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000, yang didistribusikan secara *door-to-door* menjelang hari pencoblosan, sebuah praktik yang dikenal sebagai "Serangan Fajar". Verifikasi teoretis terhadap konsep

kekuasaan Miriam Budiardjo menunjukkan bahwa uang di sini berfungsi sebagai instrumen untuk memaksakan kehendak politik kepada pemilih yang berada dalam posisi ekonomi rentan.¹¹⁶

Yang paling signifikan adalah munculnya fenomena digitalisasi politik uang yang menyasar karakteristik milenial yang praktis dan melek teknologi. Temuan lapangan mengidentifikasi penggunaan saldo dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana, OVO, dan GoPay sebagai medium transaksi. Selain itu, pembagian voucher pulsa dan kuota internet juga menjadi modus baru yang sulit dilacak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Narasumber, Anggota DPRD DKI Jakarta ibu YY, menegaskan bahwa metode digital ini memiliki jangkauan yang sangat luas namun jejak fisiknya sangat samar, sehingga menjadi tantangan berat bagi integritas pengawasan pemilu. Hal ini mencerminkan adaptasi prinsip realpolitik Machiavelli, di mana "tujuan menghalalkan cara" demi mengamankan basis suara di kalangan generasi Z dan milenial.

Analisis Pola Distribusi, Jaringan Broker Informal dan Struktur Patronase

Pola distribusi *Money politics* di Petukangan Utara terbukti sangat sistematis dan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada. Temuan penelitian memverifikasi peran krusial "Broker Politik" atau perantara lokal yang memiliki pengaruh di komunitas terkecil. Broker ini bisa berupa pengurus RT/RW, tokoh

¹¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35-37

pemuda seperti pengurus Karang Taruna, hingga penjaga malam di lingkungan permukiman.

Pola distribusi ini mengikuti struktur patronase urban, di mana tim sukses (Patron) menitipkan sumber daya materiil kepada broker (Klien/Perantara) untuk kemudian dibagikan kepada warga. Pemanfaatan struktur informal seperti organisasi pemuda atau kelompok pengajian menjadi kedok efektif untuk menyamarkan sifat transaksional pemberian tersebut. Istilah "uang pembinaan organisasi" atau "dana kegiatan sosial" sering digunakan untuk mereduksi beban moral bagi penerima.

Infiltrasi Bantuan Sosial, Manipulasi Otoritas dan Legitimasi

Modus operandi lain yang terverifikasi dalam penelitian ini adalah penyaluran bantuan materi yang ditumpangkan pada program bantuan pemerintah (Bansos). Temuan di Petungkana Utara menunjukkan adanya upaya mengeksploitasi hak rakyat demi kepentingan elektoral pribadi kandidat tertentu. Paket sembako atau bantuan langsung tunai yang didanai negara sering kali disisipi kartu nama, kalender, atau pesan verbal dari petugas lapangan agar warga "mengingat jasa" pemberi saat di bilik suara.

Rakyat yang seharusnya tunduk pada otoritas negara secara sah, dipaksa untuk merasa berutang budi pada otoritas personal kandidat. Hal ini merusak fondasi legitimasi politik karena dukungan rakyat tidak lagi didasarkan pada kesepakatan sukarela atas kualitas program, melainkan hasil dari penguasaan sumber daya yang tidak setara. Penyamaran politik uang melalui Bansos

menciptakan kekaburan hukum yang menyulitkan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

5.1.4. Analisis Respon Dan Keputusan Politik Generasi Milenial, Verifikasi Teori Pilihan Rasional Dan Perilaku Pemilih

Menjawab rumusan masalah ketiga, penelitian ini mengungkap dinamika respon milenial terhadap fenomena politik uang di Kelurahan Petukangan Utara yang sangat kompleks. Respon milenial tidaklah monolitik; mereka menunjukkan perilaku yang strategis, kritis, hingga apatis, tergantung pada posisi sosiologis dan ekonomi mereka. Verifikasi terhadap temuan lapangan mengidentifikasi empat pola respon utama yang menjelaskan bagaimana milenial menavigasi pilihan politik mereka di tengah gempuran materiil.

Respon Pragmatis-Instrumental, Rasionalitas di Tengah Kerentanan Ekonomi

Bagi kelompok milenial yang menghadapi tekanan ekonomi harian, politik uang dipandang sebagai solusi pragmatis sementara. Verifikasi teoretis menunjukkan bahwa bagi kelompok ini, politik uang bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran etika, melainkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan yang terjadi lima tahun sekali. Mereka melihat musim kampanye sebagai "musim panen" di mana rakyat kecil mendapatkan perhatian materiil yang jarang mereka dapatkan di luar masa pemilu. Keputusan politik mereka akhirnya bersifat transaksional-absolut, di mana suara diberikan kepada siapa pun yang memberikan imbalan paling besar saat ini. Hal ini mencerminkan kondisi "Bounded Rationality", di mana keputusan politik dibatasi oleh kondisi ekonomi yang marginal.

Strategi Perlawanan Diam-Diam, Pemisahan Utilitas Materiil dan Keyakinan Politik

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya fenomena milenial yang menunjukkan sikap "cerdik" dengan menerima materi namun tetap menjaga integritas rahasia pilihannya. Mereka menyadari bahwa politik uang secara normatif salah, namun karena tekanan sosial dari tetangga atau pengurus lingkungan yang menjadi broker, mereka tetap menerima pemberian tersebut untuk menjaga harmoni sosial.

Secara psikologis, milenial dalam kelompok ini melakukan pemisahan antara tindakan ekonomi dan tindakan politik. Mereka menganggap uang yang diterima adalah "rezeki musiman" atau uang rakyat yang kembali, sehingga mereka merasa tidak memiliki utang budi politik kepada pemberi. Verifikasi teoretis terhadap teori perilaku pemilih menunjukkan bahwa identitas politik dan preferensi idealis tetap dominan di bilik suara, meskipun ada stimulasi materiil di awal. Perlawanan diam-diam ini merupakan bentuk subversi rakyat kecil terhadap sistem yang mereka anggap hanya peduli pada mereka saat mencari suara saja.

Respon Idealis-Normatif, Integritas sebagai Bentuk Investasi Demokrasi

Penelitian ini memverifikasi keberadaan kelompok milenial yang memiliki kemandirian ekonomi dan literasi politik tinggi yang secara tegas menolak segala bentuk praktik politik uang. Interpretasi terhadap respon ini menunjukkan adanya "Moral Firewall" yang dibangun di atas kesadaran akan dampak jangka panjang politik uang. Kelompok milenial idealis menyadari bahwa normalisasi praktik

transaksional akan melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada pengembalian modal, bukan pada pelayanan publik. Verifikasi teoretis terhadap konsep kriteria poliarki Robert Dahl menunjukkan bahwa kelompok ini berupaya menjaga agar pemilu tetap bebas dari kooptasi kekuatan ekonomi. Bagi mereka, menolak politik uang adalah bentuk investasi untuk mendapatkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan bagi bangsa.

Apatisme Protes, Delegitimasi Sistem Melalui Golongan Putih

Respon terakhir yang ditemukan adalah penarikan diri sepenuhnya dari proses politik atau menjadi golongan putih (golput). Keputusan golput di sini bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat terhadap rusaknya integritas sistem demokrasi di tingkat akar rumput. Dalam perspektif Downs, keputusan untuk golput adalah rasional jika biaya moral untuk terlibat dalam proses yang kotor dianggap jauh lebih menyakitkan daripada manfaat yang mungkin didapatkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik *Money politics* memiliki efek bumerang yang dapat menurunkan legitimasi pemenang pemilu dan mendelegitimasi sistem demokrasi itu sendiri di mata generasi muda yang kritis.

5.1.5. Sintesis Teoretis, Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi Dan Kepemimpinan Nasional

Berdasarkan keseluruhan interpretasi dan verifikasi temuan di atas, peneliti dapat mensintesis bahwa demokrasi di tingkat lokalitas Kelurahan Petukangan Utara sedang berada dalam fase "Demokrasi Prosedural yang Rapuh".

Meskipun partisipasi milenial secara angka (kuantitas) tinggi, kualitas dari partisipasi tersebut masih dibayang-bayangi oleh tantangan integritas sistemik yang berat. Verifikasi terhadap Teori Politik Miriam Budiardjo menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih dari proses transaksional akan kehilangan kewibawaan moral (otoritas moral) di mata kelompok milenial kritis.

Verifikasi Teori Kekuasaan dan Otoritas (Miriam Budiardjo)

Temuan mengenai pola distribusi melalui broker lokal membuktikan bahwa kekuasaan tidak bekerja secara linear dari atas ke bawah, melainkan melalui labirin jaringan perantara yang memanfaatkan otoritas tradisional dan sosial di tingkat RT/RW. Ketika tim sukses menggunakan tokoh masyarakat untuk membagikan uang, mereka sedang meminjam otoritas moral tokoh tersebut untuk melegitimasi tindakan suap yang ilegal. Hal ini menciptakan "Legitimasi Semu", di mana kemenangan elektoral tercapai, namun kepercayaan publik terhadap institusi politik menurun drastis. Milenial yang melihat proses ini akan tumbuh dengan pemahaman sinis bahwa jabatan publik hanyalah barang komoditas yang bisa dibeli.

Verifikasi Teori Pilihan Rasional (Anthony Downs)

Penelitian ini memverifikasi bahwa milenial bukanlah massa pasif yang mudah dipicu emosinya, melainkan aktor strategis yang mampu melakukan kalkulasi biaya-manfaat di tengah impitan ekonomi urban. Respon strategis "terima uangnya tapi pilih hati nurani" adalah bukti konkret dari rasionalitas milenial untuk mendapatkan manfaat materiil sekaligus menjaga otonomi politiknya. Namun,

tantangan bagi demokrasi ke depan adalah bagaimana menggeser rasionalitas pragmatis-instrumental ini menjadi rasionalitas substantif-idealis, sehingga kompetisi politik tidak lagi ditentukan oleh isi amplop melainkan oleh kualitas gagasan dan rekam jejak.

Verifikasi Teori Generasi dan Karakteristik Politik (Mannheim, Strauss & Howe)

Karakteristik milenial yang *Special*, *Confident*, dan *Achieving* terlihat dari cara mereka mengekspresikan diri di ruang digital dan melakukan pengawasan mandiri terhadap proses pemilu. Namun, sifat *Sheltered* (terlindungi) menjadikan mereka sangat reaktif terhadap isu-isu stabilitas ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa isu harga sembako dan lapangan kerja menjadi magnet utama dalam menggerakkan suara mereka, yang kemudian dieksploitasi oleh elit politik melalui politik uang. Teori Mannheim terverifikasi melalui kesamaan pola pikir milenial di Petukangan Utara yang sangat bergantung pada teknologi informasi sebagai sumber rujukan politik utama mereka, yang membedakan mereka secara tajam dari generasi sebelumnya.

5.1.6. Kesimpulan Akhir, Jawaban Konkret Terhadap Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil interpretasi dan verifikasi temuan penelitian dengan konsep dan teori yang relevan, maka kesimpulan akhir dari penelitian mengenai fenomena *Money politics* dan respon partisipasi politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara dalam Pilpres 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat Partisipasi Politik Tinggi Secara Kuantitas, Dinamis Secara Kualitas.**

Tingkat partisipasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara tergolong sangat tinggi yang didorong oleh kesadaran akan kedaulatan rakyat dan harapan akan perbaikan ekonomi. Partisipasi ini mewujud dalam bentuk "Gladiator Digital" di mana milenial sangat aktif di ruang siber untuk menyebarkan informasi dan melakukan pengawasan proses pemilu secara mandiri. Namun, partisipasi ini terfragmentasi antara keterlibatan ekspresif (nilai-normatif) dan keterlibatan instrumental yang masih dipengaruhi oleh motif kesejahteraan ekonomi harian bagi kelompok milenial rentan.

2. Bentuk dan Pola *Money politics* Bermetamorfosis Menuju Digital dan Sistematis.

Praktik politik uang di lokasi penelitian telah bertransformasi dari sekadar amplop uang tunai fisik menjadi instrumen digital yang modern (saldo *e-wallet*, voucher, kuota internet) dan "Jariyah Politis" melalui fasilitas umum. Pola distribusinya dilakukan secara sistematis melalui jaringan broker informal (RT/RW, tokoh pemuda) yang memanfaatkan kedekatan personal dan struktur patronase di gang-gang sempit untuk menyasar pemilih milenial pada masa tenang (serangan fajar). Infiltrasi terhadap program Bansos pemerintah juga menjadi modus untuk memanipulasi otoritas dan melegitimasi dukungan secara transaksional.

3. Respon dan Keputusan Politik Rasionalitas yang Terbagi.

Money politics memengaruhi respon milenial melalui empat pola utama yang berbasis pada rasionalitas aktor:

- (a) Respon Pragmatis, di mana materi diterima dan menentukan pilihan karena desakan kebutuhan ekonomi;
- (b) Respon Strategis, di mana materi diterima namun pilihan tetap berdasarkan hati nurani sebagai bentuk perlawanan pasif;
- (c) Respon Idealis, di mana praktik suap ditolak keras demi menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan; serta
- (d) Respon Apatis (Golput), di mana milenial menarik diri dari pemilu sebagai bentuk protes terhadap rusaknya sistem demokrasi di tingkat akar rumput.

Analisis komprehensif ini menegaskan bahwa masa depan kualitas demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keberanian generasi milenial untuk menolak godaan materiil sesaat demi martabat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Meskipun Kelurahan Petukangan Utara menghadapi tantangan infiltrasi politik uang yang masif dan cerdik, benih-benih perlawanan diam-diam dari kaum muda menunjukkan bahwa integritas nurani masih merupakan variabel yang tidak bisa dibeli sepenuhnya oleh kekuatan modal. Diperlukan sinergi antara pendidikan politik yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan ketegasan penegakan hukum untuk memutus mata rantai politik transaksional demi terwujudnya pemerintahan yang memiliki legitimasi moral dan kualifikasi kepemimpinan unggul di masa depan.

5.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis merumuskan sejumlah saran strategis yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya guna memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

5.2.1. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

Penyelenggara pemilu harus melakukan reposisi strategi pengawasan untuk menghadapi ancaman *Money politics* digital yang semakin masif.

1. Penguatan Pengawasan Transaksi Digital,

Bawaslu perlu membentuk satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan penyedia layanan e-wallet untuk memantau aliran dana mencurigakan selama masa tenang. Regulasi mengenai dana kampanye harus diperketat untuk mencakup segala bentuk pemberian digital, termasuk kuis dan giveaway yang dilakukan oleh influencer politik.

2. Digitalisasi Pelaporan Pelanggaran,

Mengingat milenial sangat akrab dengan teknologi, Bawaslu harus menyediakan kanal pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, aman, dan menjamin anonimitas pelapor. Aplikasi pelaporan harus terintegrasi dengan sistem pemetaan kerawanan pemilu di tingkat kelurahan untuk mempercepat respon petugas lapangan.

3. Optimalisasi Pendidikan Pemilih Partisipatif,

Sosialisasi anti politik uang tidak boleh hanya bersifat seremonial. KPU dan Bawaslu harus merancang konten edukasi yang kreatif, berbasis visual, dan disebarakan melalui platform yang digandrungi milenial seperti TikTok dan Instagram. Pesan edukasi harus menekankan pada biaya jangka panjang dari politik uang terhadap kualitas layanan publik dan pembangunan.

5.2.2. Pemerintah dan Lembaga Eksekutif

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem sosial yang membentengi warga dari praktik transaksional.

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Urban

Mengingat kerentanan ekonomi menjadi pintu masuk utama politik uang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat program kemandirian ekonomi bagi generasi muda melalui pelatihan UMKM dan akses modal usaha di wilayah seperti Petukangan Utara.

2. Netralitas dan Transparansi Bantuan Sosial

Pemerintah harus menjamin bahwa penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan secara transparan dan tidak dipolitisasi oleh kepentingan kandidat tertentu. Diperlukan pengawasan ketat terhadap aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan agar tidak menjadi bagian dari jaringan broker politik lokal.

3. Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan

Institusi pendidikan, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, harus mengintegrasikan literasi politik dan etika berdemokrasi ke dalam kurikulum guna membentuk karakter pemilih pemula yang kritis dan berintegritas.

5.2.3. Masyarakat dan Generasi Milenial

Masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas kedaulatan rakyat.

1. Membangun Budaya Malu terhadap Politik Uang

Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Petukangan Utara harus terus menyuarakan bahwa politik uang adalah tindakan yang merusak moral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta etika bangsa.

2. Aktivisme Kolektif Milenial

Generasi milenial harus menggunakan literasi digital mereka untuk menjadi pengawas mandiri. Gerakan untuk memviralkan praktik politik uang dan mengedukasi rekan sejawat mengenai rekam jejak kandidat harus terus digalakkan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang bersih.

3. Transformasi dari Pemilih Transaksional ke Pemilih Rasional

Milenial diharapkan tidak hanya melihat janji jangka pendek, tetapi lebih fokus pada visi-misi, program kerja, dan integritas kandidat yang akan berdampak pada nasib mereka selama lima tahun ke depan.

5.2.4. Partai Politik (Parpol)

Sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi dan sirkulasi kepemimpinan, partai politik dituntut untuk melakukan reformasi struktural dalam pola pendekatan elektoralnya, khususnya terhadap pemilih muda. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, beberapa saran konkret yang disarankan untuk partai politik adalah sebagai berikut:

1. **Transformasi Strategi Kampanye dari Transaksional Berbasis Materi ke Kampanye Berbasis Isu (*Issue-Based Campaigning*)** Partai politik harus mulai meninggalkan pola mobilisasi massa tradisional yang rentan terhadap infiltrasi politik uang (*money politics*). Seiring dengan tingginya proporsi generasi milenial yang kritis dan berpendidikan di wilayah urban seperti Petukangan Utara, parpol harus mengedepankan kampanye yang menawarkan solusi konkret atas isu-isu harian anak muda, seperti ketersediaan lapangan kerja, stabilitas ekonomi/harga kebutuhan pokok, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
2. **Optimalisasi Ruang Digital untuk Edukasi dan Literasi Politik yang Substansial** Mengingat karakteristik generasi milenial di wilayah urban yang cenderung bertindak sebagai "gladiator digital" yang aktif di media sosial (TikTok, Instagram, X, dan YouTube), partai politik wajib memaksimalkan platform digital bukan hanya sebagai alat pencitraan visual atau tebar pesona semata. Parpol harus menggunakan media digital untuk menyebarkan visi, misi, rekam jejak (*track record*) kandidat, serta program

kerja secara transparan dan interaktif, guna memfasilitasi kebutuhan pemilih muda dalam melakukan pengecekan fakta (*fact-checking*) sebelum menentukan pilihan.

3. **Revitalisasi Fungsi Kaderisasi dan Kelembagaan Partai yang Akuntabel** Parpol disarankan untuk melakukan kaderisasi yang inklusif dan memberikan ruang bagi generasi milenial untuk terlibat sebagai subjek politik yang aktif, bukan sekadar objek pendulang suara menjelang pemilu. Partai politik juga harus membangun sistem kelembagaan yang bersih guna memutus mata rantai ketergantungan kandidat terhadap struktur patronase lokal dan cukong politik yang kerap menjadi penyalur dana *money politics* di tingkat akar rumput.
4. **Mengembangkan Kebijakan Internal Partai yang Menolak Tegas Praktik *Money Politics*** Partai politik harus memiliki komitmen moral dan regulasi internal yang tegas untuk memberikan sanksi bagi kader atau tim sukses yang terbukti melakukan suap elektoral, baik dalam bentuk konvensional (sembako/uang tunai) maupun digitalisasi transaksional (transfer dompet digital/manipulasi bansos). Hal ini penting untuk mengembalikan fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik yang sehat dan menjaga legitimasi hasil pemilu di mata pemilih muda yang memiliki sensitivitas etika tinggi.

5.2.5. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup dan metodologi yang dapat dikembangkan oleh peneliti di masa depan.

1. **Penelitian Kuantitatif Skala Luas**, Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar untuk menguji signifikansi hubungan antara tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan kecenderungan menerima politik uang di kalangan milenial urban Jakarta.
2. **Studi Komparasi Rural-Urban**, Perlu dilakukan studi komparatif untuk melihat perbedaan pola *Money politics* dan respon milenial di wilayah perkotaan (seperti Petukangan Utara) dengan wilayah pedesaan yang memiliki struktur sosial patronase yang berbeda.
3. **Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Gakkumdu**, Penelitian masa depan dapat memfokuskan pada efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menindaklanjuti laporan politik uang digital, serta hambatan hukum apa yang membuat praktik ini sulit diproses hingga ke pengadilan.
4. **Dampak Psikologi Politik**, Meneliti lebih dalam mengenai fenomena disonansi kognitif pada pemilih yang menerima uang tetapi tetap memilih berdasarkan hati nurani, serta bagaimana hal ini memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem pemerintahan jangka panjang.

Melalui sinergi antara regulasi yang tegas, pengawasan yang modern, kemandirian ekonomi warga, serta literasi politik yang tinggi, cita-cita untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dapat tercapai. Generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara, sebagai representasi pemilih muda perkotaan, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam memutus rantai politik uang dan membangun budaya politik baru yang berbasis pada integritas dan kompetensi. Kedaulatan rakyat tidak boleh digadaikan oleh sekantong sembako atau selembar amplop, karena masa depan bangsa dipertaruhkan pada setiap pilihan yang dilakukan di dalam bilik suara.

Dengan berakhirnya analisis dalam bab ini, diharapkan seluruh temuan yang telah dipaparkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu politik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika perilaku pemilih muda di tengah tantangan politik transaksional yang terus berevolusi. Perjuangan melawan politik uang adalah perjuangan panjang untuk menjaga martabat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Kesimpulan dan saran ini menjadi penutup dari laporan penelitian ini, namun menjadi awal dari langkah nyata untuk memperbaiki sistem demokrasi kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nyarwi. 2011. *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Kampung KB Petukangan Utara." Diakses 1 November 2025. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2892/kampung-kb-petukangan-utara>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. IX. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- . *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Dahl, Robert A, and Sahat (Translator) Simamora. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi Dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Dimock, Michael. "Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins." *Pew Research Center*, 2019. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>.
- Downs, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1957.
- Fitriana. "Kerentanan Pemilih Miskin terhadap Politik Uang dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 8, no. 1 (2020): 40-55.

- Haris, Syamsuddin. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. PPW-LIPI, 1997.
- Held, David. *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.
- Huntington, Samuel P, and Joan M Nelson. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Juliansyah, Elvi. 2007. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Data Jumlah DPT Pilkada 2024 Berdasarkan Usia: Gen Z-Boomer." *detikNews*. 21 November 2024. Diakses 1 November 2025. <https://news.detik.com/pilkada>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen." *KOMPAS.com*. 5 Juni 2024. Diakses 1 November 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>.
- Kristiadi, Joseph. "Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih Di Kotamadya Yogyakarta Dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 1987-1992." Universitas Gajah Mada, 1994.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Lubis, Bertha. *Keterkaitan Bonus Demografi Dengan Teori Generasi*. Registratie. Vol. 1, 2019.
- Mahendra, A A Oka. *Pemilu Pilkada 2005: Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Jakarta: Milenium Publisher, 2005.
- Machiavelli, N. (1998). *The Prince* (H. C. Mansfield, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1532)

- Mannheim, Karl. "The Problem of Generations." Dalam *Essays on the Sociology of Knowledge*, 276-322. New York: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Edited by 2nd. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nusantara, Tim Pandom Media. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- “Partisipasi Anak Muda Dalam Pemilu 2024: Kajian Psikologis Mengenai Kesadaran Politik Pemuda Indonesia.” LM Psikologi UGM, 2024.
- Pew Research Center, "Generations Defined," diakses 20 april 2025, <https://www.pewresearch.org/topic/generations-and-age/>.
- Prasojo, Eko. *Dinamika Politik Lokal: Patronase dan Broker Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, "Wilayah Kerja," diakses 1 November 2025, <https://pkcpesanggrahan.jakarta.go.id/flags/berita/profil/wilayah-kerja>.
- Puspitasari, Sri H. 2004. "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Ius Quia Iustum Law Journal* 11 (25): 135–148.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.
- Rose-Ackerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simon, Herbert A. 1957. *Models of Man: Social and Rational*. New York: John Wiley & Sons.
- Statistik, Badan Pusat. “Hasil Sensus Penduduk 2020: Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Generasi.” *Badan Pusat Statistik*, 2021.

<https://demakkab.bps.go.id/id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Strauss, William, and Neil Howe. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow and Company, 1991.

Subekti, Tia. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)," 2014. <https://www.neliti.com/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe>.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Tazkia, Institut. "Mengulik Istilah Generasi Millennial." *Institut Tazkia*, 2021. <https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millennial>.

———. "Mengulik Istilah Generasi Millennial." *Tazkia.Ac.Id*, 2020. <https://tazkia.ac.id/berita/populer/442-mengulik-istilah-generasi-millennial>.

Tapsell, Ross. 2017. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield.

Topatimasang, Roem. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute, 2011.

Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai & Budaya Korupsi Di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.

Verba, Sidney, dan Norman H. Nie. 1972. *Participation in America: Political Equality and the People*. New York: Harper & Row.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretative sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischhoff et al., Trans.). University of California Press. (Original work published 1922)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

A. Tujuan Observasi

Untuk mengamati secara langsung fenomena *Money politics* dan respon partisipasi politik generasi milenial di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam konteks Pilpres Tahun 2024. Observasi dilakukan dengan objektif dan tanpa prasangka. Setiap temuan didokumentasikan dengan detail, termasuk waktu, lokasi, deskripsi kejadian, dan pihak-pihak yang terlibat (jika relevan).

B. Lokasi Observasi

Lokasi observasi berada di wilayah Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

C. Persiapan Alat Observasi

Menyiapkan formulir atau lembar pengamatan yang mencakup daftar perilaku yang akan diamati dan ruang untuk catatan tambahan. Memastikan alat observasi mudah digunakan dan dapat mengakomodasi variasi dalam perilaku atau situasi yang diamati.

D. Subjek Observasi

Kegiatan terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, khususnya yang melibatkan generasi milenial (lahir antara tahun 1981 hingga 1996), serta potensi atau indikasi praktik money politik.

Waktu Observasi: 12 Mei 2025 - 30 Agustus 2025

E. Aspek-Aspek Yang Diamati:

No	Aspek Pengamatan	Indikator / Fokus Observasi	Catatan
1	Bentuk Praktik Money Politics	• Pembagian uang atau sembako • Kegiatan kampanye terselubung • Mobilisasi massa dengan imbalan	Apakah terlihat bentuk praktik langsung atau tidak langsung?
2	Pihak Pelaku Money Politics	• Tokoh politik lokal • Tim sukses • Relawan/oknum masyarakat	Siapa yang terlibat dalam distribusi atau kampanye bermuatan materi?
3	Respon Masyarakat	• Antusias menerima atau menolak • Reaksi diam, curiga, atau kritis • Diskusi warga terkait fenomena ini	Bagaimana masyarakat secara terbuka atau diam-diam menanggapi?
4	Kondisi Sosial-Politik Lingkungan	• Diskusi warga soal Pilpres • Kegiatan posko atau arisan politik • Spanduk/atribut kampanye	Apakah ada atmosfer tekanan, fanatisme, atau pragmatisme politik?
5	Tingkat Partisipasi Politik	• Kehadiran saat kampanye • Diskusi politik terbuka • Antusiasme saat hari pemungutan suara	Adakah korelasi antara pemberian materi dengan keikutsertaan?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Judul Skripsi	:	<i>"Money politics</i> Dan Respon Generasi Milenial (Studi Kasus: Fenomena Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)"
Lokasi:	:	Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Jenis Penelitian	:	Kualitatif
Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Profil Nara Sumber	:	Generasi milenial (lahir antara Tahun 1981–1996), warga dan tokoh masyarakat di kelurahan petukangan utara yang mengikuti atau tidak mengikuti pemilu 2024, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, akademisi, petugas pemilu tingkat tps, tim sukses calon presiden.

I. Pertanyaan Umum (Gambaran Diri Responden) Ditujukan Untuk Semua Narasumber

1. Nama (Opsional) :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan Saat Ini :

II. Pertanyaan Inti

II.1. Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

II.2. Pertanyaan Wawancara (disesuaikan dengan Narasumber/responden)

II.2.1. Pertanyaan untuk Narasumber Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

II.2.1.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Penilaian tingkat antusiasme dan partisipasi (voter turnout) milenial di Petukangan Utara?
2. Program spesifik DPRD untuk meminimalkan angka golput/apatisme pemilih muda?
3. Pandangan terhadap peran platform digital untuk kesadaran politik di tingkat lokal?
4. Korelasi tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap kualitas keputusan politik milenial?

II.2.1.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Pola *Money politics* yang paling sering ditemukan di wilayah padat penduduk selama masa tenang?
2. Tanggapan pergeseran modus dari tunai ke sembako atau bansos yang disisipi pesan politik?
3. Temuan terkait penggunaan metode digital (e-wallet/voucher) yang menyasar milenial?
4. Efektivitas regulasi daerah dalam mengawasi "oknum simpatisan lokal" di pemukiman?

II.2.1.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana *Money politics* merusak kepercayaan milenial terhadap institusi politik secara jangka panjang?

2. Sikap legislatif terhadap fenomena "sikap pragmatis" milenial (terima uang tapi tidak pilih pemberinya)?
3. Pertimbangan kebijakan ekonomi/lapangan kerja untuk membentengi milenial dari godaan materi?
4. Ancaman politik uang terhadap "kesetaraan suara" dan kalahnya calon kompeten?

II.2.2. Pertanyaan untuk Narasumber Tokoh Agama di Kelurahan Petukangan Utara

II.2.2.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Bapak terhadap jamaah atau warga muda di Petukangan Utara, bagaimana Bapak menilai tingkat kehadiran milenial di TPS pada Pilpres 2024?
2. Apakah Bapak melihat adanya peningkatan kesadaran politik di kalangan milenial, atau mereka cenderung acuh tak acuh?
3. Apa alasan yang sering Bapak dengar dari para pemuda yang memilih untuk tidak mencoblos (golput)?
4. Sejauh mana peran Bapak sebagai tokoh agama dalam mengajak generasi muda agar mau berpartisipasi aktif dalam pemilu?

II.2.2.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Bapak pernah mendengar laporan warga mengenai adanya pemberian materi (uang/barang) yang diboncengi kepentingan politik di Petukangan Utara?
2. Bagaimana pola penyaluran yang biasanya terjadi di lapangan menurut pantauan Bapak?
3. Apakah ada pergeseran cara penyaluran politik uang yang kini lebih modern untuk menarik minat milenial?
4. Bagaimana Bapak melihat peran "oknum penghubung" lokal dalam penyaluran materi tersebut di gang-gang sempit?

II.2.2.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana praktik *Money politics* ini merusak kepercayaan milenial terhadap institusi politik menurut pandangan Bapak/ibu?
2. Bagaimana Bapak/ibu merespon sikap milenial yang menganggap politik uang sebagai "rezeki" yang wajar saat pemilu?
3. Apakah Bapak/ibu sering memberikan nasihat khusus terkait larangan politik uang (suap) kepada para pemuda di lingkungan ini?
4. Sejauh mana pemberian materi tersebut mampu mengubah pilihan hati nurani milenial, atau mereka hanya sekadar menerima saja?

II.2.3. Pertanyaan untuk Narasumber Tokoh Masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara

II.2.3.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu di lingkungan Petukangan Utara, bagaimana Bapak melihat antusiasme anak-anak muda (milenial) datang ke TPS pada Pilpres 2024 kemarin?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang paling memotivasi mereka untuk ikut mencoblos ketimbang jadi golongan putih (golput)?
3. Pernahkah Bapak/Ibu mendengar ada pemuda yang curhat kalau mereka males nyoblos? Apa biasanya alasan mereka?
4. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana cara Bapak/Ibu mengajak anak muda di sini agar tetap peduli dengan Pemilu?

II.2.3.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Bapak/Ibu melihat atau mendengar adanya praktik pemberian materi untuk memengaruhi pilihan warga di Petukangan Utara ini?
2. Dalam bentuk apa biasanya praktik tersebut menyasar anak-anak muda di wilayah ini?
3. Bagaimana pola penyalurannya? Apakah biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau lewat perantara tertentu?

4. Menurut pengamatan Bapak/Ibu sebagai pengusaha, apakah pemberian materi ini meningkat menjelang hari pencoblosan?

II.2.3.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat respon anak muda milenial ketika mereka ditawarkan uang atau barang untuk memilih calon tertentu?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah politik uang ini efektif untuk mengubah pilihan hati nurani seorang milenial?
3. Apa dampak jangka panjang dari fenomena politik uang ini terhadap kepercayaan warga terhadap pemimpin yang terpilih?
4. Apa pesan Bapak/Ibu untuk generasi muda terkait maraknya fenomena politik uang ini di masa depan?

II.2.4. Pertanyaan untuk Narasumber Generasi Milenial di Kelurahan Petukangan Utara

II.2.4.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?
2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?
3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda dalam menentukan pilihan?
4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

II.2.4.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?
3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?
4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

II.2.4.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?
2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?
3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?
4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

II.2.5. Pertanyaan untuk Narasumber Akademisi Ilmu Politik

II.2.5.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Secara teoretis, bagaimana Anda menilai tingkat partisipasi politik generasi milenial di perkotaan seperti Jakarta, khususnya pada Pilpres 2024?
2. Menurut Anda, apakah fenomena partisipasi politik milenial di Kelurahan Petukangan Utara ini konsisten dengan pola partisipasi politik generasi muda secara nasional?
3. Apa saja karakteristik unik dari partisipasi politik milenial yang Anda amati selama Pilpres 2024, baik dari segi metode maupun motivasi?
4. Berdasarkan teori partisipasi politik, bagaimana Anda menjelaskan kecenderungan partisipasi aktif atau pasif di kalangan milenial?

1. Bagaimana bentuk praktik *Money politics* yang terjadi pada Pilpres 2024 berbeda dari pemilu sebelumnya, khususnya dengan adanya peran media sosial?
2. Menurut teori perilaku pemilih, apa yang menjelaskan mengapa generasi milenial yang dianggap melek informasi bisa menjadi sasaran atau bahkan terlibat dalam praktik *money politics*?
3. Apa saja indikasi atau pola-pola baru dalam praktik politik uang yang Anda amati selama Pilpres 2024?
4. Seberapa besar dampak *Money politics* terhadap hasil akhir pemilu dan legitimasi pemimpin yang terpilih?

II.2.5.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Bagaimana bentuk praktik *Money politics* yang terjadi pada Pilpres 2024 berbeda dari pemilu sebelumnya, khususnya dengan adanya peran media sosial?
2. Menurut teori perilaku pemilih, apa yang menjelaskan mengapa generasi milenial yang dianggap melek informasi bisa menjadi sasaran atau bahkan terlibat dalam praktik *money politics*?
3. Apa saja indikasi atau pola-pola baru dalam praktik politik uang yang Anda amati selama Pilpres 2024?
4. Seberapa besar dampak *Money politics* terhadap hasil akhir pemilu dan legitimasi pemimpin yang terpilih?

II.2.5.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana teori perilaku pemilih, seperti Teori Pilihan Rasional, dapat digunakan untuk menganalisis respon dan keputusan politik generasi milenial terhadap *money politics*?
2. Menurut Anda, apa saja faktor sosiologis dan psikologis yang membuat milenial cenderung menerima atau menolak praktik politik uang?

3. Seberapa besar dampak *Money politics* terhadap kualitas pemimpin yang terpilih, jika dibandingkan dengan faktor lain seperti visi-misi atau rekam jejak?
4. Apakah ada hubungan antara tingkat literasi politik generasi milenial dengan kerentanan mereka terhadap praktik politik uang?

II.2.6. Pertanyaan untuk Narasumber Petugas Pengawas Pemilu (Panwas)

II.2.6.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan data lapangan dan pengawasan Anda di Kelurahan Petukangan Utara, bagaimana Anda menilai tingkat kehadiran (voter turnout) milenial di TPS?
2. Apakah Panwas melihat adanya perbedaan cara partisipasi antara milenial dibandingkan kelompok usia yang lebih tua?
3. Dari hasil pengawasan, apa faktor utama yang membuat sebagian kecil milenial di wilayah ini memilih untuk golput?
4. Bagaimana efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Panwas terhadap pemilih milenial di tingkat kelurahan?

II.2.6.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Pola *Money politics* seperti apa yang paling sering terdeteksi oleh Panwas di wilayah Petukangan Utara selama masa tenang?
2. Bagaimana Anda melihat pergeseran modus politik uang dari tunai ke bentuk bantuan sosial atau fasilitas lainnya?
3. Apakah Panwas menemukan indikasi praktik politik uang digital (e-wallet/transfer) yang menyasar pemilih milenial?
4. Sejauh mana regulasi saat ini mampu menjangkau "simpatisan lokal" yang menjadi penyalur politik uang di gang-gang sempit?

II.2.6.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap *Money Politics*

1. Dalam pandangan Anda sebagai pengawas, bagaimana politik uang merusak kredibilitas proses pemilu di mata milenial?
2. Bagaimana Panwas menyikapi fenomena milenial yang menerima materi tapi tetap memilih sesuai hati nurani?
3. Apakah ada koordinasi khusus dengan pemerintah kelurahan untuk membentengi warga dari politik uang melalui program ekonomi?
4. Bagaimana Anda melihat ancaman politik uang terhadap "kesetaraan suara" kandidat di wilayah Jakarta Selatan?

II.2.7. Pertanyaan untuk Narasumber Masyarakat Umum

II.2.7.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Anda sebagai warga yang sudah cukup lama tinggal di Petukangan Utara, bagaimana Anda melihat antusiasme kehadiran kaum milenial di TPS pada Pilpres 2024 kemarin?
2. Menurut analisis Anda sebagai lulusan pascasarjana, apa yang sebenarnya memotivasi milenial di wilayah urban ini untuk memilih berpartisipasi aktif daripada golput?
3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan cara partisipasi politik milenial di lingkungan ini dibandingkan dengan generasi di atasnya?
4. Jika ada milenial yang memilih tidak berpartisipasi (golput), menurut Anda apa alasan mendasar yang sering melatarbelakanginya?

II.2.7.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola Money Politics

1. Selama masa tenang Pilpres 2024 di Petukangan Utara, pola pemberian materi seperti apa yang menurut Anda paling sering terjadi atau terdengar di masyarakat?
2. Bagaimana Anda mengidentifikasi cara praktik politik uang ini menyasar kalangan pemilih milenial yang biasanya lebih melek informasi?

3. Apakah Anda mencium adanya penggunaan teknologi digital, seperti transfer saldo e-wallet, dalam praktik politik uang di wilayah Pesanggrahan ini?
4. Mengapa menurut Anda praktik politik uang ini masih terus ada dan polanya tetap bertahan di wilayah urban seperti Kelurahan Petukangan Utara?

II.2.7.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap Money Politics

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai dampak jangka panjang politik uang terhadap kredibilitas lembaga politik di mata generasi milenial?
2. Bagaimana Anda menyikapi fenomena milenial yang 'pragmatis'—menerima uangnya namun tidak memilih calon tersebut sebagai bentuk perlawanan diam-diam?
3. Menurut Anda, apakah tingkat pendidikan yang tinggi menjamin seseorang lebih kebal terhadap godaan materi saat pemilu?
4. Bagaimana Anda melihat ancaman politik uang ini terhadap 'kesetaraan suara' di mana calon berkualitas tapi kurang modal bisa tersisih di mata pemilih muda?

II.2.8. Pertanyaan untuk Narasumber Tim Sukses Capres 2024

II.2.8.1. Subfokus 1 Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Sebagai Ketua Timses di tingkat Kecamatan, bagaimana Bapak/Ibu melihat keterlibatan milenial di Kelurahan Petukangan Utara dalam mendukung atau mengawal suara paslon Bapak/Ibu?
2. Apa strategi khusus tim Bapak/Ibu untuk memastikan milenial di wilayah ini tidak golput dan mau datang ke TPS?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa alasan utama jika masih ada milenial di wilayah Pesanggrahan yang memilih untuk tidak berpartisipasi (golput)?

4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai cara milenial mengambil keputusan politik? Apakah mereka lebih ikut arahan tokoh lokal atau punya pendirian sendiri?

II.2.8.2. Subfokus 2 Bentuk dan Pola Money Politics

1. Dalam persaingan di lapangan, pola *Money politics* seperti apa yang menurut Bapak/Ibu paling sering muncul dan mengganggu strategi tim Bapak di Petukangan Utara?
2. Apakah ada pola khusus yang menurut Bapak/Ibu digunakan pihak tertentu untuk menyasar milenial melalui materi?
3. Bagaimana tim Bapak/Ibu memantau penyaluran politik uang yang terjadi di gang-gang sempit di wilayah Pesanggrahan?
4. Mengapa menurut pandangan Bapak/Ibu praktik ini masih sangat efektif digunakan di wilayah urban yang padat penduduk?

II.2.8.3. Subfokus 3 Fenomena dan Respon Partisipasi Politik Generasi Milenial terhadap Money Politics

1. Bagaimana Bapak menanggapi fenomena milenial yang menerima pemberian dari pihak lain tapi tetap menyatakan dukungan ke paslon Bapak?
2. Menurut Bapak, seberapa besar ancaman politik uang terhadap kredibilitas kemenangan seorang paslon di mata pemilih muda?
3. Apakah ada instruksi khusus dari Bapak kepada relawan untuk membentengi warga dari godaan politik uang?
4. Bagaimana Bapak melihat masa depan politik kita jika milenial terus-menerus terpapar fenomena politik uang seperti di Pilpres 2024 ini?

II.3. Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

Lampiran 3, Catatan Hasil Observasi

Catatan Lapangan Hasil Observasi *Money politics* & Respon Milenial

Lokasi Observasi : Area Publik, Pertemuan Warga, dan Media Sosial Lokal
Kelurahan Petukangan Utara.

Objek Observasi : Generasi Milenial (Kelahiran 1981–1996)

No	Aspek yang Diobservasi	Deskripsi Temuan Lapangan
1	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Generasi Milenial	Aktivitas Digital & Prosedural , Milenial mendominasi antrean di 121 RT sejak pagi hari. Mereka aktif melakukan riset mandiri melalui media sosial, melakukan <i>fact-checking</i> visi-misi, serta memantau langsung penghitungan suara di TPS (C1).
2	Indikasi Praktik <i>Money Politics</i>	Transformasi Digital & Fisik , Ditemukan pembagian materi yang tidak hanya tunai ("serangan fajar"), tetapi juga saldo <i>e-wallet</i> , voucher, dan kuota internet. Secara fisik, terlihat pembagian paket sembako, jilbab, dan kalender yang disisipi atribut kampanye.
3	Pola Distribusi Materi Politik	Infiltrasi Melalui Broker Lokal , Distribusi materi dilakukan secara <i>door-to-door</i> melalui perantara informal seperti tokoh pemuda, pengurus RT/RW, atau Karang Taruna. Dana sering dibungkus sebagai "uang pembinaan" atau "dana kegiatan sosial".

No	Aspek yang Diobservasi	Deskripsi Temuan Lapangan
4	Penyalahgunaan Otoritas & Bansos	Manipulasi Program Pemerintah, Program bantuan sosial (Bansos) dieksploitasi dengan cara menyisipkan pesan verbal dari petugas lapangan agar warga merasa berutang budi personal kepada kandidat tertentu.
5	Respon Komunitas Terhadap Isu Politik	Normalisasi & Eufemisme, Warga secara terbuka menanyakan "kapan turunnya?" bantuan materi. Muncul istilah eufemisme untuk mereduksi beban moral suap, seperti "uang bensin", "vitamin", atau "uang transport".
6	Ekspresi Antusiasme atau Apatisme	Fragmentasi Sikap, Sebagian milenial menunjukkan antusiasme karena harapan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, milenial berpendidikan tinggi cenderung apatis karena merasa sistem sudah cacat akibat dominasi kekuasaan materiil.
7	Hambatan Partisipasi Masyarakat Urban	Kendala Struktural, Pekerja sektor informal (pengemudi ojek daring) menghadapi "Biaya Partisipasi" yang tinggi; mereka harus memilih antara kehilangan upah harian atau mengantre di TPS.

Ringkasan Tipologi Respon Milenial (Hasil Sintesis Observasi)

Berdasarkan pengamatan terhadap interaksi dan perilaku di lapangan, respon milenial terhadap praktik ini dapat dikategorikan menjadi empat pola utama:

1. Pragmatis-Instrumental, Menerima materi karena desakan kebutuhan ekonomi (solusi jangka pendek).
2. Strategis-Kritis, Menerima materi dari tim sukses namun tetap menjaga rahasia dan memilih sesuai hati nurani (mencoba "memainkan sistem").
3. Idealis-Prinsipil, Menolak keras segala bentuk pemberian demi menjaga integritas suara dan kedaulatan rakyat.
4. Apatis (Golput), Menarik diri dari pemungutan suara sebagai bentuk protes terhadap rusaknya sistem demokrasi di tingkat akar rumput.

Lampiran 4, Catatan Lapangan Hasil Wawancara (Transkrip)

1. NARASUMBER ANGGOTA DPRD

Lokasi : Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan
 Tanggal : 26/10/2025. Pukul 14.06 WIB
 Nama (Opsional) : Saudari Yuke Yurike, ST.,MM (inisial “YY”)
 Usia : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan Saat Ini : Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI
 Perjuangan

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Waduh, kalau bicara Petukangan Utara, itu salah satu basis yang lumayan ramai ya. Secara umum, Pilpres 2024 kemarin itu mencerminkan dinamika yang luar biasa, ini bukti bahwa semangat gotong royong dalam berdemokrasi itu masih hidup. Meskipun banyak tantangan dan noise di luar sana, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik di Jakarta Selatan, khususnya di Petukangan Utara, sudah matang. Tapi ya, sebagai kader PDI Perjuangan, kita tentu mengamati betul setiap potensi kecurangan yang bisa merusak idealisme masyarakat.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Penilaian tingkat antusiasme dan partisipasi (*voter turnout*) milenial di Petukangan Utara?

"Jakarta Selatan, termasuk Petukangan Utara, memiliki basis pemilih milenial yang sangat dinamis. Dari pengamatan kami, partisipasi mereka di 2024 meningkat secara kualitas. Mereka bukan lagi sekadar datang ke TPS karena

ikut-ikutan, tapi karena ada isu yang mereka kawal, misalnya soal lapangan kerja atau lingkungan. Petukangan Utara sebagai wilayah urban padat menunjukkan bahwa milenial adalah penentu arah suara di tingkat akar rumput."

2. Program spesifik DPRD untuk meminimalkan angka golput/apatisme pemilih muda?

"Kami di DPRD terus mendorong program 'Parlemen Goes to Campus/School' dan memperkuat fungsi sosialisasi melalui Kesbangpol. Fokus kami adalah memberikan pemahaman bahwa satu suara mereka menentukan kualitas kebijakan publik seperti KJP Plus atau perbaikan infrastruktur di wilayah mereka sendiri. Kami ingin mereka merasa bahwa politik itu dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka."

3. Pandangan terhadap peran platform digital untuk kesadaran politik di tingkat lokal?

"Sangat krusial. Sekarang, aspirasi warga banyak masuk lewat Instagram atau TikTok. Bagi lembaga legislatif, media sosial adalah jembatan tercepat untuk transparansi. Milenial di lokalitas seperti Pesanggrahan lebih mudah diedukasi lewat konten visual yang relevan dibanding pertemuan formal yang kaku. Platform digital membuat politik tidak lagi terlihat membosankan bagi mereka."

4. Korelasi tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap kualitas keputusan politik milenial?

"Sangat kuat. Di wilayah urban seperti Petukangan Utara, akses informasi sangat terbuka. Milenial yang teredukasi cenderung melakukan 'fact-checking' sebelum memilih. Mereka tidak mudah termakan hoaks. Semakin baik literasi digital dan pendidikan mereka, semakin kritis mereka dalam menuntut rekam jejak kandidat, bukan sekadar janji manis."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Pola *Money politics* yang paling sering ditemukan di wilayah padat penduduk selama masa tenang?

"Laporan yang masuk biasanya terkait pola 'door-to-door' di gang-gang sempit. Modusnya bukan lagi terang-terangan di lapangan terbuka. Pola ini memanfaatkan kedekatan personal atau struktur informal di lingkungan masyarakat untuk menyisipkan pesan politik bersamaan dengan pemberian tertentu tepat sebelum hari H."

2. Tanggapan pergeseran modus dari tunai ke sembako atau bansos yang disisipi pesan politik?

"Ini adalah tantangan berat. Bansos adalah hak rakyat yang dibiayai negara, jadi sangat tidak etis jika diklaim sebagai 'kebaikan' pribadi kandidat. Pergeseran ke sembako menunjukkan adanya upaya mengeksploitasi kebutuhan dasar masyarakat. Kami di DPRD selalu menekankan fungsi pengawasan agar program pemerintah tidak ditunggangi kepentingan elektoral."

3. Temuan terkait penggunaan metode digital (*e-wallet/voucher*) yang menysasar milenial?

"Ada indikasi ke sana, meskipun pembuktiannya lebih sulit dibanding uang tunai. Metode digital ini memang 'menysasar' karakter milenial yang praktis. Ini modus baru yang harus diwaspadai oleh penyelenggara pemilu karena jejaknya bisa sangat samar namun jangkauannya luas."

4. Efektivitas regulasi daerah dalam mengawasi "oknum simpatisan lokal" di pemukiman?

"Regulasi sudah ada, tapi penegakannya di level gang-gang sempit memang menantang. Perlu sinergi kuat antara Bawaslu, aparat, dan masyarakat. Kami mendorong warga untuk berani melapor. Pengawasan paling efektif sebenarnya bukan dari petugas, tapi dari kesadaran warga sendiri untuk menolak praktik tersebut di lingkungannya."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana *Money politics* merusak kepercayaan milenial terhadap institusi politik secara jangka panjang?

"Politik uang menciptakan persepsi bahwa 'semua pejabat itu sama saja, bisa dibeli'. Ini racun bagi demokrasi. Jika milenial percaya bahwa uang adalah satu-satunya cara untuk menang, maka orang-orang baik dan kompeten yang tidak punya modal akan enggan masuk ke politik. Akibatnya, institusi politik kita akan kehilangan talenta terbaiknya."

2. Sikap legislatif terhadap fenomena "sikap pragmatis" milenial (terima uang tapi tidak pilih pemberinya)?

"Meskipun ini bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan diam-diam, secara sistemik ini tetap tidak sehat. Namun, hal ini menunjukkan bahwa milenial sudah mulai cerdas; mereka tidak merasa 'terikat' oleh uang. Tugas kami adalah menggeser perilaku ini dari 'terima uangnya tapi jangan pilih' menjadi 'tolak uangnya, pilih programnya'."

3. Pertimbangan kebijakan ekonomi/lapangan kerja untuk membentengi milenial dari godaan materi?

"Sangat menjadi pertimbangan. Di Komisi D dan di DPRD secara umum, kami mendorong pemberdayaan UMKM dan pelatihan kerja (PPKD) bagi anak muda Jakarta. Jika milenial memiliki kemandirian ekonomi, mereka tidak akan mudah goyah oleh uang 100-200 ribu rupiah. Kemandirian ekonomi adalah kunci kedaulatan memilih."

4. Ancaman politik uang terhadap "kesetaraan suara" dan kalahnya calon kompeten?

"Ini adalah ancaman nyata bagi meritokrasi. Jika kontestasi hanya jadi ajang adu isi dompet, maka gagasan-gagasan hebat untuk Jakarta akan tenggelam. Kita akan kehilangan peluang dipimpin oleh orang-orang cerdas yang jujur."

Inilah mengapa edukasi politik bagi milenial sangat penting, agar mereka melihat kompetensi sebagai mata uang yang jauh lebih berharga daripada politik uang."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Pesan saya, khususnya untuk para Milenial di Petukangan Utara dan seluruh Jakarta: Jadilah pewaris sejati semangat Proklamasi. Jangan pernah takut untuk bersuara dan berjuang demi cita-cita keadilan sosial. Pemilu sudah selesai, tapi perjuangan ideologi tidak akan pernah berakhir. Mari kita kuatkan semangat gotong royong untuk mengawal pemerintahan yang terpilih agar mereka benar-benar bekerja untuk wong cilik. Ingat selalu pesan Bung Karno: "Perjuangan saya lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri!" Termasuk melawan penyakit *Money politics* ini. Terima kasih"

2. NARASUMBER TOKOH AGAMA

Lokasi : Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan,

Tanggal : 2/11/2025, Pukul 10.42 WIB

Nama (Opsional) : H. Genggong Widjaya (Inisial "GG")

Usia : 65 Tahun

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Ketua Masjid, pemilik usaha Haji dan Umroh

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Alhamdulillahirabbilalamin... Secara umum, pelaksanaannya berjalan dengan tertib, ya. Kita bersyukur, meskipun suasana agak panas di luar sana, di Petukangan Utara ini masih bisa menjaga tali silaturahmi. Namanya pesta demokrasi, pasti ada riak-riak kecil. Tapi saya selalu ingatkan jamaah, politik itu urusan dunia, persaudaraan itu urusan akhirat. Jadi, jangan sampai gara-gara beda pilihan, masjid jadi sepi atau tegur sapa jadi hilang. Secara fiqih, semua berjalan sah dan halal lah.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Bapak terhadap jamaah atau warga muda di Petukangan Utara, bagaimana Bapak menilai tingkat kehadiran milenial di TPS pada Pilpres 2024?

"Alhamdulillah, kalau saya lihat di masjid dan lingkungan sekitar, anak-anak muda kita cukup semangat kemarin. Habis salat Subuh berjamaah, banyak yang langsung rapi mau ke TPS. Saya rasa partisipasi mereka cukup tinggi di wilayah kita, karena mereka sadar bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan mereka."

2. Apakah Bapak melihat adanya peningkatan kesadaran politik di kalangan milenial, atau mereka cenderung acuh tak acuh?

"Ada peningkatan, tapi caranya berbeda dengan zaman saya. Mereka lebih kritis. Saya sering dengar mereka diskusi soal visi-misi calon di teras masjid atau saat pengajian. Mereka tidak lagi sekadar ikut pilihan orang tua, tapi punya pendirian sendiri. Jadi tidak acuh, malah lebih 'melek' informasi."

3. Apa alasan yang sering Bapak dengar dari para pemuda yang memilih untuk tidak mencoblos (golput)?

"Ada satu-dua yang bilang malas karena merasa siapa pun yang menang hidup mereka tetap begitu saja. Saya selalu nasihatkan, dalam agama kita diajarkan untuk memilih pemimpin (imamah). Kalau kita tidak memilih, kita

membiarkan orang yang mungkin kurang amanah untuk memimpin. Golput itu bukan solusi, tapi malah lepas tangan dari tanggung jawab."

4. Sejauh mana peran Bapak sebagai tokoh agama dalam mengajak generasi muda agar mau berpartisipasi aktif dalam pemilu?

"Saya sering sisipkan di khotbah jumat atau pengajian rutin. Saya ingatkan bahwa memilih itu bagian dari ikhtiar kita memperbaiki keadaan. Saya dorong mereka untuk jadi pemilih yang cerdas, yang melihat akhlak dan kapasitas calonnya. Kita ini bangsa besar, jangan sampai anak muda kehilangan harapan."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Bapak pernah mendengar laporan warga mengenai adanya pemberian materi (uang/barang) yang diboncengi kepentingan politik di Petukangan Utara?

"Dengar selentingan pasti ada, namanya juga masyarakat banyak. Ada yang cerita dikasih sembako, atau uang transportasi. Tapi biasanya mereka ceritanya malu-malu karena tahu kalau di agama itu kan ada istilah 'Rasyi dan Murtasyi' (penyuap dan penerima suap), keduanya tidak dibenarkan."

2. Bagaimana pola penyaluran yang biasanya terjadi di lapangan menurut pantauan Bapak?

"Biasanya lewat jaringan pertemanan atau tetangga dekat yang jadi tim sukses. Caranya halus, kadang dibungkus sedekah atau bantuan sosial. Kadang ada juga yang coba-coba menitip lewat pengurus lingkungan. Tapi kalau ke masjid, saya pribadi tegaskan tidak boleh ada politik praktis atau bagi-bagi yang sifatnya mengikat suara."

3. Apakah ada pergeseran cara penyaluran politik uang yang kini lebih modern untuk menarik minat milenial?

"Sekarang kan zamannya serba digital, ya. Saya dengar ada yang pakai voucher atau pengisian saldo dompet digital. Buat milenial yang suka praktis,

hal seperti ini mungkin dianggap keren atau kekinian, padahal hakikatnya sama saja, itu upaya membeli suara."

4. Bagaimana Bapak melihat peran "oknum penghubung" lokal dalam penyaluran materi tersebut di gang-gang sempit?

"Ini yang sulit dibendung karena mereka mainnya di bawah, dari pintu ke pintu. Biasanya mereka memanfaatkan kondisi ekonomi warga yang lagi susah. Sebagai tokoh agama, saya sedih melihatnya. Harusnya tetangga itu mengajak pada kebaikan, bukan mengajak pada praktik yang merusak tatanan demokrasi kita."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana praktik *Money politics* ini merusak kepercayaan milenial terhadap institusi politik menurut pandangan Bapak?

"Sangat merusak. Anak muda jadi berpikir bahwa jabatan itu bisa dibeli. Kalau dari awal sudah pakai uang, nanti pas menjabat pasti pikirannya bagaimana balik modal, bukan mengabdikan. Ini yang bikin milenial jadi sinis sama pemerintah dan politik."

2. Bagaimana Bapak merespon sikap milenial yang menganggap politik uang sebagai "rezeki" yang wajar saat pemilu?

"Saya selalu bilang, tidak semua yang datang ke tangan kita itu disebut rezeki yang berkah. Kalau tujuannya untuk memengaruhi keadilan atau memilih yang tidak layak, itu jatuhnya syubhat atau bahkan haram. Kita harus hati-hati, jangan sampai karena uang yang tidak seberapa, keberkahan hidup kita terganggu."

3. Apakah Bapak sering memberikan nasihat khusus terkait larangan politik uang (suap) kepada para pemuda di lingkungan ini?

"Sering. Saya tekankan bahwa memilih itu adalah persaksian kita di depan Allah. Kalau persaksian kita dibeli, berarti kita berbohong. Saya ajarkan

mereka untuk punya harga diri. Sebagai pengusaha Haji dan Umroh pun saya sering sampaikan, kalau mau berangkat ke tanah suci, uangnya harus dari sumber yang bersih, jangan dari hasil 'menjual' suara."

4. Sejauh mana pemberian materi tersebut mampu mengubah pilihan hati nurani milenial, atau mereka hanya sekadar menerima saja?

"Milenial sekarang lebih cerdas. Banyak yang bilang ke saya, 'Pak Haji, barangnya saya ambil karena saya butuh, tapi milih mah tetap sesuai hati'. Secara moral ini memang dilema, tapi setidaknya menunjukkan bahwa hati nurani mereka tidak bisa dibeli sepenuhnya. Namun tetap saja, secara etika itu kurang elok."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengalaman Bapak dalam Pemilu Presiden 2024?

"Saya hanya berharap, bagi yang sudah terpilih, tolong perhatikan rakyat kecil dan jaga kemudahan ibadah kita. Untuk anak muda di Petukangan Utara, tetaplah jadi anak muda yang punya integritas. Jangan mau disuap, jangan mau diadu domba. Dunia ini sebentar, tapi tanggung jawab kita atas pilihan kita akan dibawa sampai ke akhirat."

3. NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT

Lokasi : RPH Unggas Dinas Peternakan, Kel. Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 2/11/2025, Pukul 15.15 WIB

Nama (Opsional) : M. Nur Azis (Inisial "MNA")

Usia : 61 Tahun

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Wiraswasta

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Kalau di sini sih, Pilpres 2024 kemarin lumayan ramai sekali ya. Antusiasme warganya tinggi. Cuma ya gitu deh, namanya Pilpres, pasti ada saja gesekan-gesekan kecil di bawah, terutama antar pendukung yang fanatik. Tapi secara umum, alhamdulillah, aman terkendali. Semua berjalan lancar, TPS juga oke. Yang paling kelihatan, persaingan di akar rumput itu keras sekali, Pak.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Bapak di lingkungan Petukangan Utara, bagaimana Bapak melihat antusiasme anak-anak muda (milenial) datang ke TPS pada Pilpres 2024 kemarin?

"Kalau saya lihat di lingkungan saya, anak muda sekarang cukup melek ya. Mereka datang ke TPS itu berkelompok, bareng teman-temannya. Saya kan tiap hari di pasar dan lingkungan rumah, saya lihat mereka antusias, tapi gayanya santai. Nggak kaku kayak orang tua dulu. Jadi kalau soal kehadiran, saya rasa cukup bagus di wilayah kita ini."

2. Menurut Bapak, apa yang paling memotivasi mereka untuk ikut mencoblos ketimbang jadi golongan putih (golput)?

"Milenial di sini itu kritis. Mereka pilih karena pengen hidup lebih gampang ke depannya, terutama soal harga-harga. Mereka ngerasa kalau nggak milih, nanti nggak bisa protes kalau ekonomi susah. Motivasi mereka itu pengen perubahan yang bener-bener kerasa di kantong anak muda, kayak urusan cari kerjaan atau modal usaha."

3. Pernahkah Bapak mendengar ada pemuda yang curhat kalau mereka males nyoblos? Apa biasanya alasan mereka?

"Ada aja, biasanya yang bilang 'siapa pun presidennya, saya tetep jualan ayam'. Alasan mereka ya karena merasa politik itu cuma urusan orang atas. Tapi sebagai orang tua, saya sering ingetin, 'Lu jangan cuma liat sekarang, liat nanti harga pakan naik apa nggak'. Itu yang bikin mereka akhirnya mikir lagi buat berangkat ke TPS."

4. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana cara Bapak mengajak anak muda di sini agar tetap peduli sama Pemilu?

"Saya sering ajak ngobrol pas mereka lagi nongkrong atau pas belanja ayam ke saya. Saya bilang, 'Tong, jangan sia-siain suara lu'. Saya pake pendekatan yang santai aja, nggak menggurui. Saya kasih gambaran kalau satu suara itu ibarat satu bumbu dalam masakan, kalau kurang satu ya rasanya beda. Itu bikin mereka ngerasa dihargai suaranya."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Bapak melihat atau mendengar adanya praktik pemberian materi untuk memengaruhi pilihan warga di Petukangan Utara ini?

"Namanya pemilu, pasti ada aja selentingan begitu. Ada yang bilang lewat paket sembako, ada yang bilang 'amplop titipan'. Di wilayah padat kayak kita ini, pola begitu susah hilangnya. Biasanya lewat orang-orang yang emang udah dikenal di lingkungan, jadi masuknya enak, nggak kaku."

2. Dalam bentuk apa biasanya praktik tersebut menyasar anak-anak muda di wilayah ini?

"Kalau anak muda, polanya lebih ke arah 'traktiran' atau bantuan kegiatan. Kadang lewat voucher pulsa atau bantuan buat acara-acara tongkrongan mereka. Jadi nggak selalu uang tunai di depan muka, tapi lewat barang atau fasilitas yang mereka butuhin sehari-hari."

3. Bagaimana pola penyalurannya? Apakah biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau lewat perantara tertentu?

"Biasanya lewat perantara, Mas. Istilahnya 'kaki tangan' yang emang warga sini juga. Mereka nggak bakal terang-terangan di jalan besar. Masuknya ke gang-gang, lewat obrolan di warung kopi atau pas lagi kumpul-kumpul warga. Jadi kesannya kayak bantuan dari temen, padahal ada misi politiknya."

4. Menurut pengamatan Bapak sebagai pengusaha, apakah pemberian materi ini meningkat menjelang hari pencoblosan?

"Iya, biasanya pas 'serangan fajar' atau H-2. Ibarat dagang ayam, itu lagi ramai-ramainya pesanan. Makin deket hari H, makin gencar itu yang namanya bagi-bagi materi. Tujuannya ya biar orang nggak berubah pikiran pas udah di depan kotak suara."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana Bapak melihat respon anak muda milenial ketika mereka ditawari uang atau barang untuk memilih calon tertentu?

"Anak muda sekarang lebih pinter. Banyak yang responnya 'terima aja uangnya, pilihan mah tetep sesuai hati'. Mereka nggak merasa terbebani. Mereka anggap itu 'rezeki dadakan'. Tapi ada juga yang malah jadi males dan nggak respek sama calon yang bagi-bagi duit begitu."

2. Menurut Bapak, apakah politik uang ini efektif untuk mengubah pilihan hati nurani seorang milenial?

"Kalau menurut saya sih kurang efektif buat milenial yang idealis. Mereka itu lebih liat figur dan medsos. Uang mungkin diterima karena emang lagi butuh, tapi kalau buat ngerubah pilihan yang udah mantap di hati, saya rasa susah. Mereka nggak se-setia itu sama amplop."

3. Apa dampak jangka panjang dari fenomena politik uang ini terhadap kepercayaan warga terhadap pemimpin yang terpilih?

"Dampaknya ya warga jadi mikir, 'Ah, dia terpilih karena duit'. Jadi kalau nanti pemimpinnya nggak bener, warga nggak kaget. Ini bahaya, karena jadi kayak

jual beli. Kepercayaan jadi luntur, dan warga nggak berharap banyak lagi sama janji-janji pemerintah."

4. Apa pesan Bapak untuk generasi muda terkait maraknya fenomena politik uang ini di masa depan?

"Pesan saya, jangan mau suara kalian dibeli murah. Masa depan kalian itu nggak sebanding sama uang seratus-dua ratus ribu. Ambil pelajarannya, jangan ambil dosanya. Jadilah pemilih yang punya harga diri. Kita pengen Indonesia maju, ya mulainya dari cara milih yang bener, jangan karena 'bonus' sesaat aja."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Ya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Pengalaman Pemilu 2024 kemarin itu mengajarkan kita, terutama di Kelurahan Petukangan Utara sini, bahwa persatuan itu jauh lebih penting daripada pilihan politik sesaat. Selama masa kampanye, memang sempat panas dan terjadi sedikit kerenggangan antar-tetangga karena beda pilihan capres. Itu biasa. Tapi begitu Pilpres selesai, ya sudah, kita harus kembali rukun. Jangan sampai karena politik uang atau karena fanatisme buta, hubungan bertetangga kita jadi rusak. Pesan saya untuk semua, terutama untuk Milenial: Jangan pernah berhenti peduli dengan politik, tapi jadilah pemilih yang cerdas. Jangan mudah dipecah belah, dan jangan mau harga dirimu dibeli murah oleh siapa pun. Pemilu sudah selesai, sekarang saatnya kita fokus lagi membangun lingkungan kita bersama-sama. Itu saja, Mas. Terima kasih."

4. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. H.Najih RT.08/01, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 5/11/2025, Pukul 09.15 WIB

Nama (Opsional) : Fitrianingsih (inisial “F”)
 Usia : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan Terakhir : D3 Keperawatan
 Pekerjaan Saat Ini : Ibu Rumah Tangga

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Pilpres kemarin ramai banget, ya, pak. Di sini tuh terasa banget tegangnya, apalagi karena barengan sama Pileg. Tapi ya baguslah, semua warga pada datang nyoblos. Harapan saya sih, dengan ramainya ini, semoga Presiden yang sudah terpilih benar-benar bawa perubahan. Capek rasanya kalau harga-harga sembako naik terus.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Jujur ya mas, kalau antusias pasti ada. Saya kemarin datang ke TPS pagi-pagi banget setelah selesai urusan dapur. Di lingkungan sini, terutama ibu-ibu seumuran saya di Petukangan Utara, rata-rata pada nyoblos semua. Kami merasa suara kami penting buat nentuin harga sembako ke depan, jadi ya nggak mau kelewatan."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Motivasinya sederhana sih, pengen perubahan yang lebih baik aja buat anak-anak saya. Karena saya punya anak yang sudah sekolah, saya mikirin soal lapangan kerja dan bantuan pendidikan. Kalau nggak nyoblos, saya rasa nggak punya hak buat komplain nanti kalau keadaan susah."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda dalam menentukan pilihan?

"Saya seringnya lihat di TikTok sama grup WhatsApp warga sini. Kadang juga lihat cuplikan debat di YouTube kalau lagi luang. Tapi paling sering memang dari obrolan sama tetangga pas lagi belanja atau jemput anak sekolah, itu pengaruh banget sih."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Sebagian besar iya, terutama soal harga bahan pokok dan bantuan sosial. Tapi kadang ada juga janji yang kayaknya terlalu muluk. Buat kami yang sudah berkeluarga, yang penting itu bukti nyata, bukan cuma gaya di medsos aja."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Kalau dengar-dengar selentingan sih ada ya mas, namanya juga di lingkungan padat begini. Biasanya ada yang bilang 'nanti ada titipan', tapi kalau saya pribadi nggak mau terlalu urus yang begitu. Tapi ya memang rahasia umum lah kalau jelang hari H ada yang keliling."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Sebenarnya dibilang wajar juga nggak, tapi dianggap 'rezeki' sama sebagian orang. Banyak yang mikir, 'ambil aja uangnya tapi pilihannya tetap sesuai hati nurani'. Jadi kayak sudah jadi kebiasaan tiap ada pemilu, dianggapnya kayak bantuan musiman aja."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Mungkin mereka pikir karena kondisi ekonomi lagi sulit, orang bakal gampang kegoda sama uang seratus-dua ratus ribu. Mereka menganggap milenial atau ibu-ibu kayak saya ini praktis aja, siapa yang ngasih ya itu yang diingat."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Harus lebih sering diedukasi sih, dikasih tahu kalau uang segitu nggak sebanding sama susahnya hidup lima tahun ke depan kalau salah pilih. Terus juga harus ada pengawasan yang lebih ketat di tingkat RT/RW biar nggak ada 'serangan fajar' lagi."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Buat saya pribadi sih nggak ngaruh ya. Saya sudah punya pilihan sendiri dari awal lihat debat dan rekam jejaknya. Masa depan anak saya nggak bisa ditukar sama uang yang habis buat makan sehari doang."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Dilema sih nggak, paling cuma merasa nggak enak kalau yang nawarin itu tetangga sendiri atau orang yang kita kenal. Biasanya kalau dikasih, ya orang sini bilang 'terima aja biar nggak nggak enak', tapi di dalam hati ya tetep pilih yang sesuai keyakinan."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Saya nggak mau ikut campur sih mas, itu urusan masing-masing. Tapi paling cuma saling senyum aja, kayak udah sama-sama tahu lah. Tapi ya saya tetap bilang ke teman-teman dekat, 'jangan gara-gara itu kita jadi salah pilih'."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Malah jadi ragu mas. Saya mikirnya, 'kok ini calon nggak percaya diri banget sampai harus bagi-bagi uang?'. Justru saya lebih respek sama calon yang mau datang langsung, dengerin keluhan kita, daripada yang cuma kirim orang buat bagi-bagi amplop."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Saya cuma mau nitip pesan, terutama buat para pemimpin yang sudah terpilih: Tolong jangan lupakan kami yang di bawah ini. Tolong pikirkan kami yang setiap pagi harus pusing mikirin harga minyak dan uang jajan anak. Politik itu jangan cuma ramai pas mau Pemilu saja. Setelah dilantik, tolong turunkan harga sembako. Itu saja harapan kami, sederhana, tapi penting sekali. Terima kasih, mas."

5. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. Muhtar Raya, RT. 003/011. Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 5/11/2025, Pukul 12.57 WIB

Nama (Opsional) : Nuriyah (inisial "N")

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Pengusaha Kontrakan

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Secara umum ya, ramai banget, kayak pesta tapi versi politik. Saya lihat sih, antusiasme warga, terutama ibu-ibu dan anak muda, itu tinggi banget. Suasana di Petukangan Utara ini cukup panas, tapi pas hari-H di TPS berjalan lancar. Cuma ya gitu deh, drama di media sosialnya yang bikin pusing.”

Mengenai Tingkat Partisipasi Politik Generasi Milenial

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Wah, kalau saya mah semangat banget, Mas! Namanya juga hajat besar negara, ya kudu ikut ngeramein. Saya mah dari subuh udah rapi, kelarin urusan rumah terus langsung ke TPS.

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Motivasinya ya biar Indonesia makin maju aja. Apalagi saya kan usaha kontrakan, ya pengennya ekonomi stabil, biar penyewa kontrakan saya juga lancar bayarnya, nggak macet-macet. Kalau negara aman, rezeki juga lancar, Mas. Itu aja motivasi utamanya."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda dalam menentukan pilihan?

"Saya mah mainnya Facebook sama grup WhatsApp keluarga besar. Kalau anak-anak muda sekarang kan TikTok-an, saya mah liat yang lewat di FB aja. Sama denger-denger omongan sepupu yang ngerti politik. Biasanya obrolan pas lagi kondangan atau tahlilan itu pengaruh banget buat saya milih siapa."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Sebagian sih masuk di kuping saya, kayak soal harga bensin sama sembako. Tapi ya gitu, kadang terlalu banyak janji. Buat saya yang penting mah yang nyata-nyata aja, yang peduli sama warga kecil di bawah, bukan cuma pinter ngomong di tv."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Kalo ngomongin itu mah bukan rahasia lagi ya di kampung-kampung. Ada aja yang 'ngetok' pintu malem-malem atau lewat tim sukses yang masih tetangga juga. Kadang bukan cuma uang, ada yang ngasih jilbab lah, kalender, sampai paket sembako. Di Petukangan sini mah pola begituan tiap pemilu pasti ada aja selewatnya."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Gimana ya, dibilang wajar ya emang kejadian terus. Orang-orang mah mikirnya 'namanya dikasih ya masa ditolak, pamali'. Tapi bukan berarti mereka langsung manut sama yang ngasih. Jadi dianggapnya kayak 'uang transport' aja buat ke TPS, nggak dianggap sesuatu yang tabu banget."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Mungkin mereka pikir milenial sekarang kan kebutuhannya banyak, apa-apa mahal. Jadi dikasih sedikit mah pasti nyamber. Padahal kan pemikiran orang sekarang udah beda. Mereka masih pake cara lama karena mungkin itu cara paling gampang buat narik perhatian warga yang nggak mau pusing."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Harus berani nolak atau minimal jangan mau diatur pilihannya gara-gara uang. Warga sini kudu sadar kalau kontrakan sepi, sembako mahal, itu pengaruh dari siapa yang kita pilih. Jangan mau dituker sama uang yang cuma cukup buat beli nasi uduk beberapa porsi."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Kalo buat saya pribadi mah nggak ngaruh, Mas. Saya punya prinsip, iman nggak bisa dibeli, pilihan juga nggak bisa dipaksa. Biarpun kontrakan lagi ada yang kosong, saya nggak bakal nuker suara saya cuma demi amplopan yang isinya nggak seberapa."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Nggak ada dilema-dilemaan. Kalau emang ada yang ngasih tanpa syarat, ya mungkin ada yang terima buat jajan anak. Tapi kalau disuruh sumpah atau janji milih, saya mah ogah. Saya orangnya blak-blakan aja, mending nggak nerima daripada beban di hati."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Saya mah paling cuma nyindir dikit sambil bercanda, 'Wah, dapet amplop nih, makan-makan dong!'. Tapi ya saya ingetin, 'Lu boleh ambil duitnya, tapi pilihan jangan sampe salah, liat masa depan'. Kita mah sesama warga Petukangan saling ngingetin aja jangan sampe harga diri dibeli."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Malah saya jadi curiga. Ini calon duitnya dari mana sampe bisa bagi-bagi begini ke satu kelurahan? Takutnya nanti pas udah jadi, malah sibuk nyari

balikan modal, bukannya ngurusin rakyat. Jadi kalau ada yang bagi-bagi, saya malah makin males milih yang itu."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Harapan saya ke depan, pemilu harus lebih bersih dari uang, terutama di tingkat bawah. Dan saya berharap, tolong perhatikan nasib rakyat kecil, terutama kami para pelaku usaha UMKM dan single parent.

6. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. Palem, RW.08, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 5/11/2025, Pukul 16.11 WIB

Nama (Opsional) : Priska Widyaningsih (inisial "PW")

Usia : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMEA

Pekerjaan Saat Ini : Driver Ojek Online

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Ramai banget, mas. Kayak pesta, tapi yang paling bikin pusing itu banyak banget bagi-bagi uang di belakang.

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Jujur ya Mas, kalau dibilang antusias, awalnya saya ngikutin banget debat-debat di YouTube sambil nunggu orderan. Tapi pas deket hari H, saya malah

jadi males. Akhirnya kemarin saya mutusin nggak ke TPS. Saya narik ojek aja seharian, cari duit buat cicilan motor daripada pusing dengerin janji-janji yang ujung-ujungnya cuma mau beli suara kita."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi (golput) dalam Pilpres 2024?

"Motivasi saya itu semacam protes ya. Saya capek liat lingkungan di Petukangan Utara sini kalau mau Pemilu kayak pasar malam, semua bisa dibeli. Saya pikir, buat apa saya nyoblos kalau sistemnya udah 'kotor' dari bawah? Saya nggak mau suara saya jadi bagian dari permainan yang nggak jujur. Jadi mending saya abstain sekalian sebagai bentuk sikap."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda?

"Saya banyak liat konten di Twitter (X) sama TikTok soal isu-isu korupsi dan gimana politik uang merajalela. Terus di lapangan, pas lagi nongkrong bareng temen-temen ojol, ceritanya sama semua: ada timses ini bagi itu, timses itu bagi ini. Informasi dari medsos dan kenyataan di jalanan itu yang bikin saya makin yakin kalau pemilu ini cuma buat yang punya modal gede."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Kelihatannya sih keren ya, bahas ekonomi digital lah, lapangan kerja lah. Tapi buat saya yang kerjanya di jalanan, itu cuma bahasa kampanye. Nyatanya, nasib ojol kayak saya makin susah, potongan aplikasi gede, bensin naik. Harapan saya itu perubahan nyata di lapangan, bukan cuma jualan jargon di baliho."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Ooh, sering banget Mas! Pas saya lagi di rumah, ada tetangga yang juga jadi tim hore salah satu paslon nanya, 'Pris, udah ada yang ngisi belum?'. Maksudnya ngisi amplop ya. Polanya itu lewat kedekatan tetangga, jadi kita kayak diteken secara halus. Bukan cuma uang, kadang ditawarkan voucher bensin atau paket sembako juga."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Di lingkungan Petukangan sini, terutama di kalangan bawah, itu udah kayak dianggap 'bonus lima tahunan'. Nggak tabu lagi, malah ditunggu-tunggu. Tapi buat saya yang lulusan SMEA dan ngerti dikit soal ekonomi, itu justru ngerendahkan harga diri pemilih. Kita kayak dianggap nggak punya otak, cuma punya perut."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Mungkin mereka pikir milenial yang kerjanya serabutan kayak saya ini butuh uang instan. Mereka manfaatin celah ekonomi kita. Mereka nggak mau repot adu program, mending kasih uang seratus ribu, beres urusan."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Harusnya ada jaminan kalau kita nolak itu nggak bakal dikucilkan di lingkungan. Karena tekanannya itu dari tetangga sendiri, itu yang susah. Terus pengawasan jangan cuma di TPS, tapi di gang-gang sempit pas malem-malem itu yang musti dipantau beneran."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Justru pemberian materi itu yang bikin saya mutusin buat nggak milih sama sekali. Saya ngerasa muak. Pas ada yang coba nawarin saya amplop, saya langsung bilang nggak mau. Saya merasa kalau saya terima, saya ikut ngerusak negara ini. Karena itu, saya lebih milih nggak nyoblos daripada milih orang yang dapet dukungan pakai cara nyogok."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Dilema sih ada, apalagi lagi sepi orderan. Uang seratus ribu lumayan buat beli bensin dua hari. Tapi hati nurani saya teriak, 'Masa suara lu cuma seharga bensin?'. Itu tekanan batin yang bikin saya akhirnya nggak mau dateng ke TPS, biar saya nggak perlu ngerasa berdosa."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Saya cuma bisa diem aja, malas berdebat."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Malah bikin saya makin antipati. Saya bakal mikir, 'Ini orang kalau kepilih pasti bakal korupsi buat balikin modal'. Buat saya, politik uang itu tanda kalau calon tersebut nggak punya prestasi yang bisa dibanggain. Makanya, daripada saya pusing milih di antara yang 'nyogok', mending saya golput."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

Jawab:

"Harapan saya ke depan, pemilu harus lebih bersih dan lebih menghargai kejujuran. Dan tolong, hargai orang-orang yang punya prinsip. Jangan cuma

bisa mengejek orang yang nggak mau terima uang. Kami driver ojek online juga punya hati nurani!”

7. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. Swadharma 4, RW.09, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 5/11/2025, Pukul 20.05 WIB

Nama (Opsional) : Rhaditya Wresniwira (inisial “RW”)

Usia : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Karyawan Swasta / Ketua Karang Taruna

Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana pandangan umum anda mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Kalau secara umum sih ya, lumayan ramai dan seru lah di Petukangan Utara ini. Apalagi sebagai Ketua Karang Taruna, saya lihat anak-anak muda cukup aktif. Suasananya panas di luar, di media sosial, tapi alhamdulillah pelaksanaannya di TPS aman dan lancar. Ribut-ributnya biasa, tapi semuanya tertib, nggak ada kericuhan berarti. Intinya, hype-nya dapet, pelaksanaannya sukses.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Wah, kalau saya mah antusias banget, Mas. Bukan cuma sebagai pemilih, tapi kan saya di Karang Taruna juga bantu-bantu ngeramein suasana. Buat saya, Pilpres kemarin itu momen yang paling ditunggu. Kita anak-anak muda di sini nggak ada yang absen ke TPS, pokoknya semua kita gerakin buat nyoblos. Suasananya udah kayak pesta rakyat beneran di lingkungan kita."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Jujur-jujuran aja nih ya, Mas. Selain karena emang kewajiban warga negara, partisipasi saya itu ada dorongan 'ekstra'-nya. Ada adrenalin tersendiri pas kita terlibat di pusaran kampanye. Motivasi saya ya pengen liat lingkungan RW saya dapet perhatian lebih dari para calon. Kalau kita nggak gerak dan nggak nyoblos, ya kita nggak bakal dilirik sama orang-orang pusat."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda?

"Saya mah campur-campur. Instagram sama TikTok buat liat gaya-gaya kandidatnya, tapi kalau informasi yang 'dalam' biasanya lewat obrolan di grup-grup relawan sama temen-temen organisasi. Kita sering diskusi sambil ngopi di sekretariat, bahas siapa nih yang paling 'royal' dan peduli sama kegiatan anak muda di kampung kita."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Sebagian sih masuk, kayak soal kerjaan. Tapi buat kami di tingkat RW, janji di TV itu kejauhan. Harapan kita mah simpel: ada bantuan buat kegiatan kepemudaan nggak? Ada support buat lapangan olahraga atau acara 17-an nggak? Isu yang menyentuh 'akar rumput' itu yang lebih kita pegang."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Kalau itu mah saya nggak tutup-tutupi, Mas. Namanya saya di Karang Taruna, pasti 'pintu'-nya lewat kita juga kalau ada timses yang mau masuk. Polanya macem-macem, ada yang kasih uang pembinaan organisasi, ada yang nitip amplop buat warga, sampe ada yang ngirim atribut-atribut kampanye

plus 'isinya'. Di Petukangan Utara sini, pola mainnya udah rapi, biasanya lewat tokoh pemuda atau orang yang pegang massa."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Nggak tabu sama sekali. Malah kalau nggak ada yang 'turun', warga atau anak muda malah nanya, 'Kok tahun ini sepi?'. Di sini mah dianggap wajar, itu bagian dari 'biaya silaturahmi'. Kita nggak nyebutnya politik uang yang jahat ya, tapi lebih ke 'transport' atau 'uang capek' karena kita udah mau luangin waktu buat dengerin mereka sosialisasi."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Karena mereka tahu, milenial itu butuh 'bensin'. Kita punya tenaga, punya massa, punya kreatifitas, tapi seringnya nggak punya dana. Timses pake cara ini karena paling efektif buat ngunci suara dalam waktu cepet. Kalau cuma modal janji, anak muda sekarang mah udah kenyang, mending yang keliatan aja di depan mata."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Sebenarnya susah ya, karena ini udah kayak 'vitamin'. Tapi kalau mau dikurangin, ya calon-calon itu harus mau modalin program jangka panjang, bukan cuma kasih duit pas mau nyoblos doang. Tapi ya kenyataannya, pola 'instan' begini yang paling laku di bawah."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Wah, jujur ya Mas, itu jadi dorongan tersendiri. Ibaratnya itu 'vitamin' buat gerak. Pas ada materi yang masuk, kita jadi lebih semangat buat ngajak yang

lain ke TPS. Dorongan materil itu bikin politik jadi lebih 'hidup' di mata saya. Jadi ya pengaruhnya cukup gede buat mutusin tingkat partisipasi kita."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Dilema? Nggak ada sih. Saya mikirnya ini kan uang dari mereka yang emang udah dianggarkan buat kampanye. Daripada diabisin buat iklan di TV yang kita nggak dapet apa-apa, mending turun ke bawah buat kita-kita. Saya nerimanya dengan tangan terbuka, anggep aja itu rezeki buat nambah-nambahin kas organisasi atau jajan temen-temen."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Saya malah dukung. Saya bilang, 'Ambil aja, itu emang hak warga pas musim pemilu'. Kita nggak usah munafik lah, ekonomi lagi begini. Kalau ada yang ngasih buat bantu-bantu dapur atau jajan, ya bagus. Yang penting kerukunan di RW tetap dijaga, jangan gara-gara beda amplop malah berantem."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Malah makin mantap. Buat saya, kalau dia berani 'keluar' buat kita di bawah, berarti dia serius mau diperhatiin. Politik uang itu buat saya bukan tanda negatif, tapi tanda kalau dia mau 'investasi' ke kita. Jadi kalau saya dikasih, ya itu yang saya prioritaskan buat saya dukung dan saya amanin suaranya di lingkungan."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

“Kita anak muda di Petukangan Utara, khususnya di RW.09, sebenarnya siap kok diajak kerja bareng. Masalah 'vitamin' atau politik uang tadi, itu kan sebenarnya cuma efek karena nggak adanya kedekatan emosional antara calon sama warga. Jadi ya warga mikirnya transaksional aja: 'Lu dapet jabatan, gue dapet apa?'. Harapan saya, siapa pun yang menang, jangan lupain janji-janjinya ke lingkungan kecil kayak kami ini.

8. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. Swadharma Dalam III, RT.003/9, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 9/11/2025, Pukul 19.20 WIB

Nama (Opsional) : SARIYAH (inisial “S”)

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Ibu Rumah tangga.

Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana pandangan umum anda mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Kalau menurut saya sih ramai ya, Mas. Warga disini antusias banget kalau urusan milih presiden. Cuma ya gitu, suasananya kerasa banget transaksionalnya. Dari obrolan di tukang sayur sampai pas arisan, orang-orang sudah mulai nanya 'siapa nih yang turun?', maksudnya ya siapa yang bagi-bagi bantuan atau uang."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Pengalamannya seru, tapi jujur motivasi saya lebih ke 'manfaat nyata' saja buat dapur. Saya tetap ke TPS buat nyoblos, apalagi kalau sudah ada yang 'nitip' salam lewat amplop, rasanya tanggung kalau nggak datang."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Jujur saja ya Mas, motivasi utamanya karena ada yang ngasih uang. Sebagai ibu rumah tangga, kondisi ekonomi sekarang lagi susah, harga sembako naik semua. Jadi pas ada timses yang datang bawa 'bensin' (uang), itu yang bikin saya semangat ke TPS."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda?

"Saya lihat Facebook atau WhatsApp grup sih ada, tapi itu nggak terlalu pengaruh. Yang paling berpengaruh ya timses yang datang langsung ke rumah atau tetangga yang bawain amanah amplop itu."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Janji-janji di TV mah manis semua, Mas. Tapi buat saya yang penting itu yang nyata saja sekarang. Yang ngasih uang sekarang, ya itu yang saya rasa peduli sama kebutuhan mendesak saya hari ini."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Pernah banget, malah saya ngalamin sendiri. Di RW 04 sini sudah jadi rahasia umum. Biasanya pas malam-malam atau subuh ada yang ngetok pintu, kasih amplop isinya uang tunai. Kadang ada juga yang kasih paket sembako lengkap."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Sudah nggak tabu lagi, Mas. Malah dianggap wajar, kayak 'rezeki pemilu' saja. Tetangga-tetangga juga kalau kumpul nanyanya, 'Eh, kamu sudah dapet dari nomor sekian belum?'. Jadi sudah kayak tradisi setiap lima tahun sekali."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Karena mereka tahu kita lagi butuh. Mereka sadar kalau cuma modal omongan, orang nggak akan yakin. Tapi kalau ada uang seratus-dua ratus ribu di tangan, itu lebih mempan buat narik suara ibu-ibu atau anak muda yang praktis pikirannya."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petungkana Utara tidak terjebak politik uang?

"Susah ya, Mas, selama urusan perut masih susah. Mungkin kalau lapangan kerja banyak dan harga beras murah, orang nggak akan terlalu ngarepin uang serangan fajar lagi."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Pengaruhnya besar sekali buat saya. Saya jujur saja, saya pilih calon presiden yang kasih uangnya paling besar. Kalau ada yang kasih lima puluh ribu, terus yang satu lagi kasih seratus ribu, ya saya pilih yang seratus ribu. Logika saya, dia lebih modal dan lebih niat bantu warga."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Awalnya sempat mikir, tapi ya saya bismillah saja. Anggap saja ini rezeki yang datang lewat pemilu."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Biasa saja, malah saya tanya dapet berapa. Kita mah saling info saja di sini, jangan sampai ada yang ketinggalan 'berkatnya'."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Mendorong banget buat milih dia. Apalagi kalau jumlahnya lebih gede dari calon lain. Itu sudah jadi patokan saya di bilik suara nanti."

Pertanyaan Penutup

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Harapannya sih siapapun yang menang jangan lupa sama rakyat kecil. Jangan cuma pas mau milih saja bagi-bagi uang, tapi pas sudah menjabat tolong turunkan harga-harga biar kita nggak susah terus."

9. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl Masjid Darul Fallah, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 11/11/2025, Pukul 10.00 WIB

Nama (Opsional) : Kartono Condro (Inisial "KC")

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Saat Ini : Pengemudi Ojek Online,

Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimana pandangan umum anda mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Kalau saya lihat sih Pilpres 2024 kemarin di Petukangan Utara, khususnya disini, sangat 'basah' ya Mas. Maksudnya, perputaran bantuan di bawah itu kencang banget. Buat kami yang di lapangan, suasananya jadi lebih hidup

karena banyak dukungan nyata yang turun ke warga, bukan cuma sekadar spanduk doang."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Wah, antusias banget saya! Jujur saja, saya sampai bela-belain libur narik ojek pas hari-H. Pengalamannya seru karena tahun ini kerasa banget 'perhatian' dari para calon ke kita-kita yang milenial pekerja begini. Jadi semangat ke TPS karena merasa dihargai."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Motivasinya ya karena ini momen langka buat dapet tambahan buat keluarga. Saya nggak mau munafik, Mas. Pas ada timses yang datang bawa sembako atau amplop, itu jadi dorongan kuat buat saya. Namanya rezeki masa ditolak, lagipula kita juga butuh buat nutup setoran."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda?

"Paling sering lewat grup WhatsApp ojol atau obrolan pas lagi 'ngetem' sama temen-temen. Kita biasanya saling info siapa timses yang lagi 'royal' di lingkungan masing-masing. Itu yang lebih saya denger daripada iklan di TV."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Sebenarnya kalau isu di TV terlalu tinggi ya bahasanya. Tapi kalau mereka sudah kasih bantuan sembako atau uang ke rumah, buat saya itu sudah jadi bukti kalau mereka tahu apa yang milenial butuhin sekarang, yaitu bantuan ekonomi yang praktis dan langsung cair."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Langsung ngalamin, Mas. Disini kan padat, jadi timses gampang masuk. Saya terima ada paket sembako isinya lengkap sama uang bensin juga. Polanya biasanya lewat temen nongkrong atau orang yang emang pegang wilayah di sini, jadinya rapi kasihnya."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Sudah wajar sekali, malah dibilang 'musim panen'. Kita sesama ojol atau tetangga malah sering candain, 'Sudah dapet oli berapa liter dari si anu?'. Nggak ada yang ngerasa risih, malah kalau ada yang nggak dapet bantuan suka merasa rugi."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Karena cara ini yang paling ampuh buat orang yang kerjanya di jalanan kayak saya. Kita nggak butuh teori muluk-muluk, kita butuhnya bantuan yang keliatan di mata. Timses tahu betul milenial itu praktis, ada uang ada suara."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Mungkin kalau tarif ojol naik dan bensin murah, orang nggak akan terlalu nungguin amplop lagi. Tapi selama kenyataannya begini, ya kita pasti milih yang paling berkontribusi buat kita."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Sangat besar. Saya pilih calon yang kontribusinya paling nyata dan paling besar buat saya selama kampanye. Kalau dia berani kasih lebih banyak dari

yang lain, berarti dia lebih peduli sama nasib kita di bawah. Itu patokan utama saya di bilik suara."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Nggak ada sih, Mas. Sebagai orang beragama, saya anggap ini bantuan sosial saja. Kita kan nggak maksa mereka ngasih. Jadi kalau mereka ngasih ya saya syukuri, nggak ada beban moral apa-apa."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Malah saya dukung, saya suruh ambil saja. Kita kan senasib sepenanggungan, kalau ada yang bagi-bagi ya nikmati saja mumpung momennya ada."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Pasti mendorong banget. Malah makin semangat saya buat nyoblos dia. Buat saya, pemberian itu bentuk komitmen awal dia. Kalau pas belum jadi saja sudah berani ngasih banyak, harapannya nanti pas sudah jadi lebih perhatian lagi."

Pertanyaan Penutup

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Harapan saya sih, jangan cuma lima tahun sekali begini bantuannya. Dan buat peneliti, ya inilah realitas kami di bawah. Kami senang dengan adanya Pilpres karena hidup jadi agak ringan dikit gara-gara banyak sembako dan uang yang masuk."

10. NARASUMBER GENERASI MILENIAL

Lokasi : Jl. Ujung Aspal, RW.010 Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 5/11/2025, Pukul 15.11 WIB

Nama (Opsional) : TRI ARYANTO (inisial "TA")

Usia : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan Saat Ini : Penjaga malam di lingkungan

Pertanyaan Pembuka

1. Bagaimana pandangan umum anda mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Kalau buat saya pribadi sih, Pilpres 2024 kemarin itu benar-benar jadi rezeki tersendiri ya. Suasananya sangat hidup, apalagi buat orang lapangan kayak saya. Intinya sih pemilu kemarin itu jadi ladang rezeki tambahan yang lumayan banget buat nutupin kebutuhan sehari-hari."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Bagaimana pengalaman dan antusiasme Anda sebagai pemilih milenial dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024 kemarin?

"Antusias banget, Mas. Tapi antusiasnya saya beda, bukan cuma sekadar nyoblos, tapi saya juga ikut sibuk 'gerilya'. Pengalamannya seru karena saya dilibatkan langsung untuk bantu-bantu di lingkungan, jadi ngerasa punya peran penting di pesta demokrasi ini."

2. Apa motivasi utama yang membuat Anda memutuskan untuk berpartisipasi (mencoblos) dalam Pilpres 2024?

"Jujur saja, motivasinya karena ada tanggung jawab kerjaan tambahan dari timses. Saya diminta mendata warga, terus nyalurin amanah berupa amplop dan sembako. Karena saya sudah dipercaya buat pegang wilayah, ya otomatis saya juga harus ikut nyoblos calon yang saya pegang itu."

3. Platform media sosial atau sumber informasi apa yang paling memengaruhi keputusan Anda?

"Kalau media sosial saya nggak terlalu ambil pusing. Informasi yang paling berpengaruh ya langsung dari koordinasi sama tim lapangan. Instruksinya jelas, sasarannya jelas, dan 'operasionalnya' juga jelas. Itu yang jadi pegangan saya."

4. Menurut pandangan Anda, apakah isu-isu yang diangkat para kandidat sudah mewakili harapan generasi milenial?

"Harapan milenial kan simpel, Mas, yang penting ada duitnya. Isu ekonomi atau lapangan kerja itu terlalu jauh. Buat saya, dengan adanya momen bagi-bagi rezeki lima tahun sekali ini saja sudah menunjukkan mereka tahu rakyat lagi butuh bantuan nyata."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money politics*

1. Apakah Anda pernah mengalami secara langsung atau mendengar informasi tentang praktik pemberian uang/barang di wilayah Petukangan Utara?

"Bukan cuma mendengar, Mas, saya pelakunya yang jalanin di lapangan. Saya diminta timses buat door-to-door ke rumah warga di RW 10. Saya yang data siapa saja yang dapet, terus saya anterin amplop sama paket sembaknya supaya mereka milih calon tertentu. Jadi saya tahu banget polanya."

2. Di lingkungan pergaulan Anda, apakah praktik *Money politics* dianggap tabu atau sudah dipandang sebagai hal yang wajar?

"Wajar sekali. Malah warga sudah nanyain ke saya, 'Kapan nih turunnya?'. Jadi sudah kayak kewajiban buat para calon kalau mau dapet suara ya harus kasih kontribusi ke warga. Di sini nggak ada yang anggap itu aneh."

3. Mengapa Anda menilai tim sukses masih menggunakan praktik politik uang untuk memengaruhi milenial?

"Karena cara ini yang paling konkret. Timses tahu kalau cuma janji di spanduk mah nggak bakal dimakan. Tapi kalau saya datang bawa amplop, warga langsung nurut. Itu cara paling cepat buat ngamanin suara di tiap TPS."

4. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif agar milenial di Petukangan Utara tidak terjebak politik uang?

"Kayaknya bakal susah ya, soalnya ini sudah jadi budaya 'rejeku lima tahun sekali'. Selama masih ada yang butuh dan ada yang ngasih, ya bakal jalan terus."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money politics*

1. Seberapa besar pengaruh pemberian materi terhadap keputusan akhir Anda dalam memilih calon presiden?

"Besar sekali, apalagi saya ada target. Saya kan dijanjikan bonus tambahan kalau perolehan suara di TPS yang saya pegang sesuai target atau menang telak. Jadi, materi itu bukan cuma buat milih, tapi jadi motivasi saya buat kerja keras meyakinkan warga lain."

2. Apakah muncul dilema moral dalam diri Anda saat dihadapkan pada tawaran materi tersebut?

"Nggak ada dilema. Saya niatnya cuma bantu warga lewat bagi-bagi sembako dan uang itu, sekalian saya juga dapet rejeki buat keluarga. Saya anggap ini kerja profesional saja di musim pemilu."

3. Bagaimana respon atau sikap Anda ketika melihat teman atau tetangga menerima imbalan dari tim sukses?

"Ya saya senang, apalagi kalau saya yang kasih. Malah kita jadi makin akrab karena sering ngobrolin soal 'titipan' dari pusat ini."

4. Jika Anda menerima tawaran materi, apakah hal tersebut mendorong Anda memilih calon pemberi atau justru membuat Anda ragu?

"Sangat mendorong. Apalagi kalau ada bonus tambahan di akhir kalau target tercapai. Itu bikin saya makin totalitas milih dan menangin calon itu di lingkungan saya."

Pertanyaan Penutup

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Saya sih berharap pemilu ke depannya makin banyak bonusnya buat orang lapangan kayak saya. Momen ini benar-benar saya tunggu karena bisa nambah-nambah tabungan dari hasil kerja sampingan pas musim kampanye."

11. NARASUMBER AKADEMISI

Lokasi : Kampus STIPAN Jakarta, Jln Lenteng Agung, Jagakarsa

Tanggal : 15/12/2025, Pukul 14.11 WIB

Nama : Saudara ARLIS PRAYUGO, S.IP., M.Pd (inisil "AP")

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Kaprodi dan Dosen Ilmu Politik STIPAN Jakarta

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Secara umum, pelaksanaan Pilpres 2024 di Kelurahan Petukangan Utara berlangsung aman, tertib, dan partisipatif, meskipun terdapat dinamika khas kawasan urban yang kompleks. Dari segi penyelenggaraan teknis, partisipasi masyarakat cukup tinggi, namun tantangan tetap muncul seperti distribusi logistik, netralitas aparat, serta pengaruh kampanye di media sosial. Antusiasme warga, khususnya generasi muda, tampak meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, namun partisipasi mereka belum selalu dibarengi dengan literasi politik yang memadai."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Secara teoretis, bagaimana Anda menilai tingkat partisipasi politik generasi milenial di perkotaan seperti Jakarta, khususnya pada Pilpres 2024?

“Dalam kerangka teori partisipasi politik (Milbrath & Goel, 1977), milenial di perkotaan seperti Jakarta menunjukkan kecenderungan partisipasi yang bersifat "gladiator politics", aktif secara simbolik dan digital (posting, diskusi online), namun tidak selalu hadir secara langsung dalam pemungutan suara atau kegiatan kampanye konvensional. Mereka lebih menyukai bentuk partisipasi politik yang bersifat "expressive" daripada "instrumental".

2. Menurut Anda, apakah fenomena partisipasi politik milenial di Kelurahan Petukangan Utara ini konsisten dengan pola partisipasi politik generasi muda secara nasional?

“Secara garis besar ya, terdapat konsistensi. Milenial di Petukangan Utara juga cenderung menggunakan media sosial sebagai arena utama untuk berpartisipasi. Namun, ada juga variasi lokal: keterlibatan mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, tokoh lokal, dan kualitas pendidikan politik yang diterima.”

3. Apa saja karakteristik unik dari partisipasi politik milenial yang Anda amati selama Pilpres 2024, baik dari segi metode maupun motivasi?

Beberapa karakteristik unik:

Digital-driven activism: Banyak yang menggunakan TikTok, Instagram, dan Twitter untuk kampanye politik.

Isu-based voting: Mereka lebih tertarik pada isu-isu seperti lingkungan, korupsi, dan HAM dibanding partai politik itu sendiri.

Influencer effect: Preferensi politik banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh publik digital.

4. Berdasarkan teori partisipasi politik, bagaimana Anda menjelaskan kecenderungan partisipasi aktif atau pasif di kalangan milenial?

Menurut Teori Rasional dan Teori Partisipasi Kognitif, keputusan milenial untuk aktif dipengaruhi oleh:

- Persepsi manfaat vs. biaya partisipasi.
- Tingkat efikasi politik internal.
- Akses informasi yang tinggi tapi juga cepat jenuh karena informasi yang berlebihan (information overload).

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money politics*

1. Bagaimana bentuk praktik *Money politics* yang terjadi pada Pilpres 2024 berbeda dari pemilu sebelumnya, khususnya dengan adanya peran media sosial?

Praktik *Money politics* kini lebih tersembunyi dan digital, seperti:

1. Transfer via e-wallet atau pulsa.
 2. Endorsement terselubung oleh influencer berbayar.
 3. Penawaran giveaway untuk memengaruhi opini.
 4. Peran media sosial memperluas jangkauan praktik ini ke segmen yang sebelumnya sulit dijangkau secara langsung.
2. Menurut teori perilaku pemilih, apa yang menjelaskan mengapa generasi milenial yang dianggap melek informasi bisa menjadi sasaran atau bahkan terlibat dalam praktik *money politics*?

“Meskipun milenial dianggap melek informasi, Teori Disonansi Kognitif menunjukkan bahwa ketika nilai idealisme berbenturan dengan kebutuhan pragmatis (ekonomi, identitas kelompok), mereka bisa terlibat. Selain itu, narasi "semua politisi sama saja" membuat mereka sinis dan permisif terhadap praktik tersebut.”

3. Apa saja indikasi atau pola-pola baru dalam praktik politik uang yang Anda amati selama Pilpres 2024?

- Kontrak digital tak tertulis: Janji-janji uang jika mendukung kandidat tertentu secara daring.
- Politik kuis dan survei berbayar yang sesungguhnya bagian dari kampanye terselubung.
- Paket sembako berlabel QR-code kampanye, yang sulit dilacak secara hukum

4. Seberapa besar dampak *Money politics* terhadap hasil akhir pemilu dan legitimasi pemimpin yang terpilih?

“*Money politics* tetap menjadi faktor signifikan, terutama di segmen pemilih rentan. Namun di kalangan milenial urban, efeknya cenderung mengurangi legitimasi, karena mereka cenderung menolak praktik semacam ini secara moral, walau tidak semua aktif menolaknya secara langsung.”

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money politics*

1. Bagaimana teori perilaku pemilih, seperti Teori Pilihan Rasional, dapat digunakan untuk menganalisis respon dan keputusan politik generasi milenial terhadap *money politics*?

“Rational Choice Theory menyatakan bahwa milenial akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik bagi mereka dengan biaya seminimal mungkin. Jika mereka menilai uang yang diberikan tidak memengaruhi suara secara langsung, mereka mungkin tetap menerima namun memilih berdasarkan preferensi pribadi.”

2. Menurut Anda, apa saja faktor sosiologis dan psikologis yang membuat milenial cenderung menerima atau menolak praktik politik uang?

Sosiologis: Status ekonomi, komunitas, tekanan sosial, dan keanggotaan organisasi tertentu.

Psikologis: Efikasi politik, pengalaman sebelumnya, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem politik.

3. Seberapa besar dampak *Money politics* terhadap kualitas pemimpin yang terpilih, jika dibandingkan dengan faktor lain seperti visi-misi atau rekam jejak?

“*Money politics* berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan, karena kandidat yang menang belum tentu dipilih karena kualitas atau visi-misinya. Namun, di kalangan pemilih milenial yang idealis, faktor rekam jejak dan visi tetap memiliki pengaruh kuat, menyeimbangkan dampak tersebut.”

4. Apakah ada hubungan antara tingkat literasi politik generasi milenial dengan kerentanan mereka terhadap praktik politik uang?

“Literasi politik yang rendah berkorelasi positif dengan kerentanan terhadap money politics. Milenial dengan pemahaman politik yang baik cenderung memiliki “moral firewall” terhadap praktik semacam itu. Mereka juga lebih selektif dalam menyaring informasi politik dari media sosial.”

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

“Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju digitalisasi yang intens. Tantangan baru muncul — seperti disinformasi dan *Money politics* digital, namun partisipasi milenial yang meningkat juga menjadi tanda harapan. Tugas kita sebagai akademisi dan pendidik adalah memastikan literasi politik terus ditingkatkan agar demokrasi bukan hanya prosedural, tapi juga substantif.”

12. NARASUMBER PENGAWAS PEMILU

Lokasi : Rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang
 Tanggal : 15/12/2025, Pukul 19.00 WIB
 Nama : SUGIANTO (inisial “SG”)
 Usia : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Panwas Pemilu Tahun 2024 Kelurahan Petukangan Utara,
 Kecamatan Pesanggrahan

Pertanyaan Wawancara untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kelurahan

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

- i. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Secara keseluruhan, pandangan saya terhadap pelaksanaan Pilpres 2024 di Kelurahan Petukangan Utara adalah berjalan sangat kondusif dan menunjukkan kedewasaan politik yang meningkat. Dari kacamata pengawasan, saya melihat ada beberapa poin penting yang bisa saya garis bawahi:

1. Meskipun Petukangan Utara memiliki mobilitas warga yang sangat tinggi dan kepadatan penduduk yang luar biasa, gesekan antar pendukung paslon di lapangan hampir tidak ada. Warga kita tetap rukun meski berbeda pilihan, dan ini memudahkan tugas kami dalam melakukan pengawasan.
2. Sangat mengapresiasi tingkat kehadiran warga di TPS. Terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang di pemilu kali ini benar-benar tampak 'melek' prosedur; mereka tidak hanya datang, tapi juga aktif memantau jalannya penghitungan suara di setiap TPS.
3. Sinergi antara kami di tingkat Panwas dengan teman-teman PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS di lapangan berjalan sangat solid. Segala kendala teknis, seperti logistik atau perbedaan data, bisa diselesaikan

secara prosedural di tingkat bawah sehingga tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

4. Memang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masih ada riak-riak kecil seperti indikasi politik uang skala mikro atau ketidaktertiban pemasangan atribut kampanye. Namun, hal itu masih bisa kita tanggulangi dengan langkah-langkah preventif (pencegahan).

Jadi, saya bisa katakan pelaksanaan Pilpres di wilayah kita sukses secara prosedural maupun secara sosiologis. Ini adalah modal yang baik untuk masa depan demokrasi di Petukangan Utara dan Kecamatan Pesanggrahan pada umumnya."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan data lapangan dan pengawasan Anda di Kelurahan Petukangan Utara, bagaimana Anda menilai tingkat kehadiran (voter turnout) milenial di TPS?

"Secara umum, partisipasi milenial di Petukangan Utara pada Pilpres 2024 kemarin cukup signifikan. Kami memantau di 100 lebih TPS di wilayah ini, dan terlihat antrean di jam-jam pagi hingga siang didominasi wajah-wajah muda. Berdasarkan pantauan formulir C-Kehadiran, milenial bukan lagi kelompok yang pasif."

2. Apakah Panwas melihat adanya perbedaan cara partisipasi antara milenial dibandingkan kelompok usia yang lebih tua?

"Milenial cenderung lebih mandiri. Jika orang tua sering datang berkeluarga atau nunggu diajak tetangga, milenial banyak yang datang sendiri atau bareng komunitasnya. Mereka juga lebih teliti melihat surat suara sebelum masuk bilik. Mereka cenderung partisipatif karena rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hasil hitung cepat (quick count)."

3. Dari hasil pengawasan, apa faktor utama yang membuat sebagian kecil milenial di wilayah ini memilih untuk golput?

"Ada faktor administratif dan faktor jenuh. Beberapa milenial yang bekerja sebagai pekerja lepas atau driver daring sering terkendala waktu. Namun, ada juga yang merasa tidak ada kandidat yang sreg di hati. Kami sempat mendengar keluhan soal 'politik yang itu-itu saja', sehingga mereka merasa suaranya tidak akan merubah nasib secara instan."

4. Bagaimana efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Panwas terhadap pemilih milenial di tingkat kelurahan?

"Kami mencoba masuk lewat medsos dan forum warga. Cukup efektif untuk milenial yang 'melek' aturan. Mereka jadi berani bertanya soal teknis pindah memilih (DPTb). Namun, tantangannya adalah mengubah pola pikir mereka bahwa pengawasan bukan cuma tugas kami (Panwas), tapi juga tanggung jawab mereka sebagai pemilih muda."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Pola *Money politics* seperti apa yang paling sering terdeteksi oleh Panwas di wilayah Petukangan Utara selama masa tenang?

"Modusnya sudah sangat rapi. Pola yang kami temukan biasanya adalah 'pemberian jasa' atau barang yang nilainya disamarkan. Misalnya, paket sembako murah atau pembagian voucher. Untuk wilayah padat, pola pintu ke pintu (door-to-door) pada malam hari atau subuh masih menjadi tantangan terbesar bagi kami untuk menangkap tangan pelakunya."

2. Bagaimana Anda melihat pergeseran modus politik uang dari tunai ke bentuk bantuan sosial atau fasilitas lainnya?

"Pergeserannya sangat cerdas. Sekarang banyak yang menggunakan kedok 'bakti sosial' atau bantuan dari relawan tertentu. Mereka tidak lagi bilang 'ini uang untuk milih A', tapi 'ini bantuan dari Bapak A, mohon diingat'. Ini menyulitkan secara hukum karena seringkali tidak memenuhi unsur pelanggaran materiil yang eksplisit."

3. Apakah Panwas menemukan indikasi praktik politik uang digital (e-wallet/transfer) yang menasar pemilih milenial?

"Indikasi itu ada dalam laporan informasi dari warga, terutama yang menasar anak muda. Karena milenial kan pegang gadget terus. Namun, secara pembuktian formil di tingkat kelurahan, ini sangat sulit dilacak tanpa akses ke sistem keuangan. Ini menjadi fenomena baru yang sangat licin di Pilpres 2024 kemarin."

4. Sejauh mana regulasi saat ini mampu menjangkau "simpatisan lokal" yang menjadi penyalur politik uang di gang-gang sempit?

"Regulasi kita sebenarnya sudah tegas, tapi personil kami terbatas. Satu kelurahan diawasi sedikit orang, sementara gang di Petukangan Utara ini ribuan. Oknum lokal ini biasanya warga setempat, jadi mereka tahu kapan pengawas lewat. Kami lebih banyak mengandalkan laporan masyarakat, tapi warga sering takut atau enggan melapor karena alasan 'nggak enak sama tetangga'."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Dalam pandangan Anda sebagai pengawas, bagaimana politik uang merusak kredibilitas proses pemilu di mata milenial?

"Sangat merusak integritas proses. Milenial yang awalnya idealis bisa jadi sinis. Mereka jadi menganggap pemilu cuma formalitas belaka karena pemenangnya adalah yang paling banyak modal. Ini menciptakan ketidakpercayaan jangka panjang terhadap lembaga seperti kami atau bahkan kepada calon yang terpilih nantinya."

2. Bagaimana Panwas menyikapi fenomena milenial yang menerima materi tapi tetap memilih sesuai hati nurani?

"Secara aturan, menerima pun sudah salah. Tapi kami melihat ini sebagai fenomena 'perlawanan pragmatis'. Milenial merasa uang itu diambil sebagai

hak mereka kembali, tapi tidak mau digadaikan suaranya. Meskipun secara moral mereka tetap memilih secara bebas, praktik ini tetap menyuburkan ekosistem politik uang yang merusak."

3. Apakah ada koordinasi khusus dengan pemerintah kelurahan untuk membentengi warga dari politik uang melalui program ekonomi?

"Kami selalu berkoordinasi dalam forum pimpinan kelurahan. Kami mendorong agar bantuan pemerintah (bansos resmi) disalurkan sesuai jadwal dan tidak berdekatan dengan hari tenang guna menghindari kecurigaan. Kemandirian ekonomi warga memang benteng utama agar tidak mudah dibeli suaranya."

4. Bagaimana Anda melihat ancaman politik uang terhadap "kesetaraan suara" kandidat di wilayah Jakarta Selatan?

"Ini ancaman serius terhadap keadilan. Calon yang punya gagasan hebat tapi tidak punya 'logistik' untuk dibagi-bagi seringkali tenggelam suaranya di wilayah pemukiman padat. Jika milenial lebih memilih 'amplop' daripada 'gagasan', maka kita akan kehilangan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Tugas kita semua untuk memutus rantai ini."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman pengawasan Anda di Pilpres 2024?

"Saya ingin milenial di Petukangan Utara jangan cuma jadi penonton atau penerima materi. Jadilah pengawas mandiri. Laporkan kalau ada yang mencurigakan. Jangan takut, karena kualitas pemimpin kita lima tahun ke depan ditentukan dari bersihnya proses hari ini. Kami (Panwas) sudah berusaha maksimal, tinggal kesadaran warga yang perlu ditingkatkan."

13. NARASUMBER/RESPONDEN MASYARAKAT UMUM

Lokasi : Jalan Anggrek Rt.007/05, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 17/12/2025, Pukul 15.00 WIB
 Nama : Zimmy Purba (inisial "ZP")
 Usia : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Unsur : Masyarakat RW 05 Kelurahan Petukangan Utara

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

- i. Bagaimana pandangan umum Bapak mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Menurut hemat saya, pelaksanaan Pilpres kemarin di Petukangan Utara berjalan cukup baik dan damai. Meskipun kita tahu tensi politik di televisi sangat tinggi, tapi di tingkat RT dan RW di sini, warga tetap rukun. Saya melihat petugas KPPS juga bekerja keras sampai pagi, dan antrean di TPS tetap tertib. Sebagai warga, saya merasa aman menyalurkan hak pilih saya."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Berdasarkan pengamatan Anda sebagai warga yang sudah cukup lama tinggal di Petukangan Utara, bagaimana Anda melihat antusiasme kehadiran kaum milenial di TPS pada Pilpres 2024 kemarin?

"Kalau saya perhatikan di TPS sekitar rumah saya ya, antusiasmenya cukup tinggi. Saya melihat banyak wajah muda yang antre bahkan sejak pagi. Secara visual, komposisinya cukup berimbang dengan pemilih senior. Saya pikir milenial di Petukangan Utara sudah sadar bahwa suara mereka adalah instrumen perubahan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban."

2. Menurut analisis Anda sebagai lulusan pascasarjana, apa yang sebenarnya memotivasi milenial di wilayah urban ini untuk memilih berpartisipasi aktif daripada golput?

"Saya rasa ada pergeseran motivasi. Milenial sekarang sangat terpapar informasi digital. Mereka melihat kaitan langsung antara siapa yang memimpin dengan kebijakan yang menyentuh mereka, seperti lapangan kerja atau stabilitas harga. Jadi, partisipasi mereka didorong oleh kesadaran rasional atas kepentingan masa depan mereka sendiri."

3. Apakah Anda melihat adanya perbedaan cara partisipasi politik milenial di lingkungan ini dibandingkan dengan generasi di atasnya?

"Sangat berbeda. Generasi senior mungkin lebih karena mobilisasi tokoh lokal atau ikatan emosional lama. Tapi milenial di sini lebih ke 'platform-oriented'. Mereka mencoblos setelah melakukan riset mandiri di medsos. Mereka tidak bisa lagi disuruh-suruh tanpa alasan logis."

4. Jika ada milenial yang memilih tidak berpartisipasi (golput), menurut Anda apa alasan mendasar yang sering melatarbelakanginya?

"Biasanya karena skeptisisme terhadap sistem. Beberapa mungkin merasa jenuh dengan narasi politik yang itu-itu saja. Sebagai kaum intelektual, saya melihat ini sebagai bentuk 'silent protest' mereka karena merasa aspirasi anak muda belum terakomodasi secara konkret dalam visi-misi kandidat."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Selama masa tenang Pilpres 2024 di Petukangan Utara, pola pemberian materi seperti apa yang menurut Anda paling sering terjadi atau terdengar di masyarakat?

"Masih ada pola konvensional seperti pembagian paket sembako atau barang yang disamarkan sebagai bantuan sosial. Namun, yang menarik di lingkungan padat seperti kita, polanya lebih ke pendekatan personal melalui 'orang berpengaruh' di lingkungan terkecil (RT), sehingga penyalurannya terlihat seperti bantuan tetangga biasa."

2. Bagaimana Anda mengidentifikasi cara praktik politik uang ini menyasar kalangan pemilih milenial yang biasanya lebih melek informasi?

"Untuk milenial, polanya lebih subtil atau halus. Tidak selalu uang tunai langsung. Kadang dalam bentuk fasilitas kegiatan pemuda, janji-janji akses tertentu, atau bahkan voucher. Polanya mengikuti apa yang sedang 'tren' atau dibutuhkan oleh mereka di tingkat lokal."

3. Apakah Anda mencium adanya penggunaan teknologi digital, seperti transfer saldo e-wallet, dalam praktik politik uang di wilayah Pesanggrahan ini?

"Secara eksplisit saya tidak melihat bukti fisiknya, tapi kabar-kabar burung di lapangan memang mengarah ke sana. Mengingat milenial sangat akrab dengan dompet digital, metode ini jauh lebih aman dari pantauan pengawas pemilu karena tidak ada serah terima fisik di jalan."

4. Mengapa menurut Anda praktik politik uang ini masih terus ada dan polanya tetap bertahan di wilayah urban seperti Kelurahan Petukangan Utara?

"Ada faktor 'kebutuhan' dan 'kebiasaan'. Sebagian oknum masih menganggap ini cara tercepat untuk mengunci suara di wilayah padat. Sementara dari sisi pemilih, rendahnya literasi politik membuat pemberian itu dianggap sebagai keuntungan sesaat yang sayang untuk dilewatkan."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai dampak jangka panjang politik uang terhadap kredibilitas lembaga politik di mata generasi milenial?

"Ini merusak tatanan demokrasi kita. Milenial akan tumbuh dengan pemahaman bahwa kekuasaan bisa dibeli. Akibatnya, mereka kehilangan respek terhadap institusi seperti DPRD atau pemerintah, karena menganggap prosesnya sudah cacat sejak awal. Ini berbahaya bagi regenerasi kepemimpinan bangsa."

2. Bagaimana Anda menyikapi fenomena milenial yang 'pragmatis'—menerima uangnya namun tidak memilih calon tersebut sebagai bentuk perlawanan diam-diam?

"Itu fenomena unik ya. Di satu sisi, itu menunjukkan mereka tidak bisa disogok hatinya, tapi di sisi lain, menerima uangnya tetap memperkuat ekosistem korupsi. Secara moral, sebagai pemeluk agama Kristen, saya melihat ini tetap sebuah integritas yang terpecah. Kita tidak bisa membangun sesuatu yang benar dengan cara yang salah."

3. Menurut Anda, apakah tingkat pendidikan yang tinggi (seperti S2) menjamin seseorang lebih kebal terhadap godaan materi saat pemilu?

"Seharusnya iya, karena pendidikan memberi kita kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Kita tahu bahwa uang 100 ribu hari ini bisa dibayar dengan penderitaan kebijakan yang salah selama 5 tahun. Tapi integritas itu soal karakter, bukan cuma gelar. Meskipun saya yakin, literasi pendidikan sangat membantu orang untuk menolak."

4. Bagaimana Anda melihat ancaman politik uang ini terhadap 'kesetaraan suara' di mana calon berkualitas tapi kurang modal bisa tersisih di mata pemilih muda?

"Ini ancaman serius. Kita berisiko kehilangan calon pemimpin cerdas hanya karena mereka tidak punya 'logistik' untuk bagi-bagi. Jika milenial hanya melihat siapa yang memberi, maka kualitas kepemimpinan kita akan stagnan. Kita harus mendidik mereka bahwa memilih adalah investasi masa depan, bukan transaksi dagang."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Sebagai warga Petukangan Utara, saya berharap penelitian Anda ini bisa membuka mata bahwa kita butuh politik yang lebih bersih. Pendidikan dan integritas adalah kunci agar milenial tidak jadi korban politik uang."

14. NARASUMBER/RESPONDEN MASYARAKAT UMUM

Lokasi : Jl. H. Gaim, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Tanggal : 18/12/2025, Pukul 10.21 WIB

Nama : Yunia Farah (inisial "YF")

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Unsur : Masyarakat Kelurahan Petukangan Utara

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

"Kalau menurut saya sih alhamdulillah ya, aman-aman saja. Di lingkungan RW 07 sini pas hari H itu tertib, petugasnya juga ramah-ramah. Paling cuma masalah antrean saja yang agak panjang karena semangat warga mau nyoblos itu tinggi sekali. Tapi secara keseluruhan, saya lihat prosesnya lancar dan tidak ada keributan antar pendukung, biarpun pilihannya beda-beda."

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Sebagai warga Petukangan Utara, bagaimana Ibu melihat kehadiran anak-anak muda (milenial) di TPS saat Pilpres kemarin? Apakah mereka terlihat semangat atau biasa saja?

"Kalau saya lihat di lingkungan RT saya, anak-anak muda ya lumayan banyak yang datang ke TPS. Tapi jujur saja, kebanyakan mereka datangnya agak siang, mungkin nunggu disuruh orang tuanya dulu atau nunggu bareng teman-temannya. Semangatnya sih ada, tapi ya itu, seperti harus didorong-dorong sedikit baru mau jalan."

2. Menurut pandangan Ibu, apa yang membuat anak muda di sini mau meluangkan waktu untuk mencoblos daripada sekadar di rumah saja?

"Ya mungkin mereka juga pengen liat presiden yang baru siapa, kali aja bisa bikin lapangan kerja jadi gampang. Soalnya anak-anak muda sekarang kalau lulus sekolah susah cari kerja. Jadi motivasinya ya pengen nasibnya berubah, biar nggak nganggur terus di rumah."

3. Apakah Ibu melihat ada perbedaan cara anak muda di sini berpolitik dibandingkan dengan warga yang lebih senior atau orang tua?

"Beda sekali. Kalau orang tua kan biasanya ikut apa kata ketua lingkungan atau ikut tradisi lama. Kalau anak muda di sini lebih banyak main HP, liat-liat berita di TikTok atau IG. Mereka punya pilihan sendiri, nggak mau didikte. Tapi ya itu, kadang pilihannya gampang berubah kalau ada info baru yang masuk ke HP mereka."

4. Kalau ada anak muda yang tidak mau datang ke TPS (golput), biasanya apa yang Ibu dengar sebagai alasan mereka?

"Palingan mereka bilang males antre, atau ngerasa suaranya nggak bakal ngaruh apa-apa. Ada juga yang lebih milih narik ojek atau kerja serabutan hari itu daripada kehilangan penghasilan buat nyoblos. Buat mereka, waktu itu uang, mas."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Selama masa pemilu kemarin di Petukangan Utara, apakah Ibu pernah mendengar atau melihat sendiri adanya pembagian 'amplop' atau paket sembako di sekitar rumah?

"Namanya juga pemilu, ya pasti ada saja yang lewat, Mas. Entah itu amplop isinya uang transportasi atau paket sembako isinya beras sama minyak. Apalagi pas 'serangan fajar', itu sudah jadi rahasia umum di gang-gang sini. Biasanya lewat tangan ke tangan, pelan-pelan saja kasihnya pas lagi kumpul-kumpul atau pas mampir ke rumah."

2. Biasanya dalam bentuk apa saja 'bantuan' itu diberikan, dan apakah anak muda juga ikut diberikan hal yang sama?

"Macam-macam, Mas. Ada yang kasih uang tunai, ada yang kasih paket sembako. Kalau anak muda biasanya lewat vouchernya pulsa atau dibayarin makan bareng di warung. Intinya yang praktis-praktis saja buat mereka. Tapi kalau buat ibu-ibu seperti saya, sembako itu yang paling ditunggu."

3. Bagaimana cara penyaluran 'bantuan' tersebut agar tidak diketahui oleh petugas atau orang luar?

"Biasanya lewat orang yang kita kenal juga, jadi nggak curiga. Lewat tetangga dekat atau orang yang biasa urus lingkungan. Kasihnya juga nggak di jalan besar, tapi pas mampir ke rumah atau pas lagi arisan kecil-kecilan. Jadi kelihatannya seperti kasih santunan atau hadiah biasa saja."

4. Menurut Ibu, mengapa orang-orang yang bagi-bagi uang itu masih terus ada di setiap pemilu di wilayah kita?

"Ya karena mereka tahu warga di sini lagi susah, Mas. Kebutuhan pokok mahal, beras naik, telur naik. Mereka memanfaatkan kondisi kita yang memang lagi butuh bantuan. Buat mereka mungkin uang segitu nggak seberapa, tapi buat kami itu sangat membantu dapur tetap ngebul."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana perasaan Ibu ketika menerima 'pemberian' tersebut? Apakah Ibu merasa harus memilih orang yang memberi itu?

"Jujur saja ya, Mas, saya terima karena saya butuh. Di kondisi ekonomi yang lagi berat begini, ada yang kasih uang seratus ribu atau sembako ya alhamdulillah sekali. Soal milih atau tidak, ya itu kan di dalam bilik suara nggak ada yang tahu. Tapi biasanya kita jadi rasa 'nggak enak' kalau sudah terima tapi nggak milih."

2. Menurut Ibu, apakah anak muda (milenial) di sini juga punya sikap yang sama, yaitu tetap menerima uangnya karena alasan ekonomi?

"Anak muda sekarang lebih pragmatis, Mas. Mereka pikir, 'Daripada nggak dapet apa-apa, mending diambil saja uangnya'. Mereka juga butuh uang buat beli pulsa atau bensin. Jadi respon mereka ya terima-terima saja, toh uangnya halal-halal saja buat mereka karena dikasih secara sukarela."

3. Apakah Ibu setuju kalau ada yang bilang 'politik uang itu wajar karena warga lagi susah'?

"Ya mau gimana lagi, Mas? Sebenarnya tahu itu nggak boleh, tapi realitasnya perut nggak bisa nunggu. Kalau presiden terpilih belum tentu bisa kasih kita uang belanja langsung, tapi kalau amplop yang lewat depan mata kan jelas manfaatnya hari itu juga. Jadi buat kami yang ekonomi pas-pasan, ini seperti bantuan musiman."

4. Apa pesan Ibu untuk pemerintah agar praktik politik uang ini tidak terjadi lagi di masa depan?

"Pesannya cuma satu: stabilkan harga sembako dan kasih pekerjaan buat suami kami. Kalau ekonomi warga stabil dan nggak susah cari makan, orang nggak bakal sebegitunya nunggu amplop atau sembako dari tim sukses. Selama rakyat masih lapar, ya politik uang bakal terus laku di sini."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Saya cuma ingin pesan, biarpun Pilpres sudah lewat, kita semua warga Petukangan Utara harus tetap rukun. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kemarin malah jadi musuh sama tetangga sendiri. Mari kita doakan pemimpin yang terpilih amanah dan ingat sama rakyat kecil."

15. NARASUMBER/RESPONDEN TIM SUKSES CALON PRESIDEN

Lokasi : Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kec. Pesanggrahan,
 Tanggal : 22/12/2025, Pukul 17.00 WIB
 Nama : SUGIHARTO (inisial "SH")
 Usia : 57 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Unsur : Ketua Tim Sukses Kecamatan Pesanggrahan Pasangan Calon
 Ganjar – Mahfud MD pada Pilpres 2024

Pertanyaan untuk seluruh narasumber/responden

1. Bagaimana pandangan umum Ibu mengenai pelaksanaan Pilpres Tahun 2024 di Kelurahan Petukangan Utara secara keseluruhan?

“Kalau saya lihat, secara teknis di lapangan sudah cukup baik ya. Warga Petukangan Utara itu sangat antusias, apalagi wilayah kita ini kan basis massa yang cair. Meskipun tensi politik di tingkat nasional panas, di tingkat kelurahan alhamdulillah tetap kondusif. Sebagai Timses, kami merasa ruang untuk bergerak mensosialisasikan program paslon kami cukup terbuka, dan koordinasi dengan pihak keamanan maupun penyelenggara di kelurahan juga berjalan sebagaimana mestinya.”

Subfokus 1: Partisipasi Politik Generasi Milenial

1. Sebagai Ketua Timses di tingkat Kecamatan, bagaimana Bapak melihat keterlibatan milenial di Kelurahan Petukangan Utara dalam mendukung atau mengawal suara paslon Bapak?

"Milenial di Petukangan Utara itu luar biasa, Mas. Mereka itu penggerak di lapangan. Saya banyak melibatkan mereka bukan cuma buat nyoblos, tapi jadi relawan 'door-to-door'. Mereka ini punya energi lebih untuk muter ke gang-gang. Jadi kalau ditanya keterlibatannya, mereka sangat aktif, terutama

karena mereka merasa program Pak Ganjar soal lapangan kerja itu kena banget ke mereka."

2. Apa strategi khusus tim Bapak untuk memastikan milenial di wilayah ini tidak golput dan mau datang ke TPS?

"Kita pendekatannya lewat komunitas. Kita nggak kaku pakai rapat-rapat formal, tapi kita masuk ke tongkrongan mereka. Kita edukasi bahwa satu suara mereka itu menentukan masa depan pendidikan dan kerjaan mereka sendiri. Kita bikin kampanye yang asyik, nggak menggurui, supaya mereka merasa dihargai suaranya."

3. Menurut Bapak, apa alasan utama jika masih ada milenial di wilayah Pesangrahan yang memilih untuk tidak berpartisipasi (golput)?

"Biasanya karena mereka merasa politik itu kotor atau cuma buat orang tua saja. Ada juga yang lebih milih kerja cari uang harian daripada antre di TPS. Tapi tim kami terus kasih pengertian bahwa kalau mereka golput, mereka kehilangan hak untuk menagih janji pemerintah ke depannya."

4. Bagaimana Bapak menilai cara milenial mengambil keputusan politik? Apakah mereka lebih ikut arahan tokoh lokal atau punya pendirian sendiri?

"Milenial sekarang punya pendirian sendiri, Mas. Mereka liat di HP, liat debat, liat rekam jejak. Arahan tokoh lokal atau instruksi timses itu cuma tambahan saja. Mereka itu kritis, kalau kita nggak bisa kasih alasan logis kenapa harus pilih paslon kami, mereka nggak bakal mau."

Subfokus 2: Bentuk dan Pola *Money Politics*

1. Dalam persaingan di lapangan, pola *Money politics* seperti apa yang menurut Bapak paling sering muncul dan mengganggu strategi tim Bapak di Petukangan Utara?

"Jujur saja ya, di lapangan itu godaannya berat. Pola yang paling sering muncul itu biasanya 'titipan sembako' atau 'uang transportasi' yang dibagi-

bagi pas masa tenang. Ini tantangan buat kami, karena kami harus jaga suara supaya nggak goyang cuma gara-gara bantuan sesaat begitu."

2. Apakah ada pola khusus yang menurut Bapak digunakan pihak tertentu untuk menyasar milenial melalui materi?

"Kalau buat milenial, polanya lebih ke arah janji fasilitas atau hiburan. Kadang ada pemberian pulsa atau modal kegiatan yang dibungkus sumbangan relawan. Jadi nggak frontal kasih amplop di depan umum, tapi lewat jalur belakang atau komunitas mereka."

3. Bagaimana tim Bapak memantau penyaluran politik uang yang terjadi di gang-gang sempit di wilayah Pesanggrahan?

"Kami punya tim saksi dan relawan di tiap RW. Mereka lapor kalau ada pergerakan mencurigakan, misalnya ada mobil atau motor berhenti di jam-jam tertentu bagi-bagi barang. Tapi ya itu, mereka (penyurinya) pinter, mainnya rapi sekali, lewat orang lokal juga yang sudah dikenal warga."

4. Mengapa menurut pandangan Bapak praktik ini masih sangat efektif digunakan di wilayah urban yang padat penduduk?

"Karena faktor ekonomi, Mas. Nggak bisa dipungkiri, warga kita masih banyak yang butuh. Timses manapun pasti tahu celah itu. Wilayah padat seperti Petukangan Utara ini jadi sasaran empuk karena jangkauannya gampang, sekali turun di satu gang bisa kena ratusan suara."

Subfokus 3: Fenomena dan Respon terhadap *Money Politics*

1. Bagaimana Bapak menanggapi fenomena milenial yang menerima pemberian dari pihak lain tapi tetap menyatakan dukungan ke paslon Bapak?

"Saya sering bilang ke relawan muda saya, 'Kalau dikasih, ya itu rezeki warga, ambil saja tapi hati tetap di kita'. Itu respon paling umum. Mereka terima karena butuh, tapi mereka punya harga diri buat tetap pilih yang sesuai hati nurani. Ini fenomena yang menarik di 2024 kemarin."

2. Menurut Bapak, seberapa besar ancaman politik uang terhadap kredibilitas kemenangan seorang paslon di mata pemilih muda?

"Sangat mengancam. Milenial itu paling nggak suka kalau ngerasa dibodoh-bodohi. Kalau kemenangan diraih lewat cara-cara begitu, mereka bakal apatis kedepannya. Kami selalu tekankan, kita menang dengan cara yang bermartabat supaya dukungan milenial ini murni, bukan karena dibayar."

3. Apakah ada instruksi khusus dari Bapak kepada relawan untuk membentengi warga dari godaan politik uang?

"Instruksinya jelas: lawan dengan edukasi. Kita kasih tahu warga, uang 100-200 ribu itu habis dalam sehari, tapi dampaknya lima tahun. Kita ajak mereka jadi 'pemilih cerdas'. Kita kuatkan mental mereka supaya berani nolak atau minimal nggak terpengaruh pilihannya."

4. Bagaimana Bapak melihat masa depan politik kita jika milenial terus-menerus terpapar fenomena politik uang seperti di Pilpres 2024 ini?

"Bahaya, Mas. Bisa-bisa nanti nggak ada lagi orang hebat yang mau maju jadi pemimpin karena nggak punya uang. Harapan saya, milenial tetap jadi benteng terakhir yang nolak cara-cara transaksional. Kalau mereka ikut-ikutan rusak, hancur demokrasi kita."

Pertanyaan Penutup (untuk seluruh Narasumber)

1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dalam Pemilu Presiden 2024?

"Pengalaman Pilpres 2024 ini sangat luar biasa. Saya bangga melihat milenial di Pesanggrahan mulai sadar politik. Pesan saya, kita harus tetap jaga persatuan. Pemilu ini cuma alat, tujuannya adalah Indonesia yang lebih baik. Kami sebagai timses sudah berusaha maksimal memberikan edukasi politik yang sehat."

Lampiran 5, Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)

Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu. YY, di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, tanggal 26/10/2025. 14.06 WIB



Wawancara dengan Tokoh Agama Sdr. GW. di Jl H. Radin, RT.14/03, Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 10.42 WIB



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sdr. MNA. di RPH Unggas Dinas Peternakan, Kel. Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 2/11/2025, 15.15 WIB



Wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. F di Jl. H.Najih RT.08/01,
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 09.15 WIB



Wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. N, di Jl. Muhtar Raya, RT. 003/011.
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 12.57 WIB



Wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. RW, di Jl. Swadharma 4, RW.09,
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 20.05 WIB



wawancara dengan Generasi Milenial Sdri. S, di Jl. Swadharma Dalam III,
RT.003/9, Petukangan Utara, Pesanggrahan , tanggal 9/11/2025, 19.20 WIB



Wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. KC, di Jl Masjid Darul Fallah,
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 11/11/2025, 10.00 WIB



wawancara dengan Generasi Milenial Sdr. TA, di Jl. Ujung Aspal, RW.010
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB



Wawancara dengan Akademisi Sdr. AP, di Kampus STIPAN Jakarta, tanggal 5/11/2025, 15.11 WIB



Wawancara dengan Panitia Pengawas Pemilu Sdr. SG, di Rumah makan Ampera, Jl Ciledug Raya, Tangerang, tanggal 15/12/2025, Pukul 19.00 WIB



Wawancara dengan warga Masyarakat Sdr. ZP, di Jalan Anggrek Rt.007/05,
Petukangan Utara, Pesanggrahan, tanggal 17/12/2025, 15.00 WIB



Wawancara dengan Tim sukses calon presiden Sdr. SH, di Sekretariat PAC PDI
Perjuangan Kec. Pesanggrahan, Jl Kemajuan, Petukangan Selatan, 22/12/2025,
Pukul 17.00 WIB



Lampiran 6, Dokumen Ijin Penelitian



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id

Jakarta, 30 September 2025

No : 1365/STIPAN-A1/IX/2025
Lamp : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
Lurah Petukangan Utara
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Dengan Hormat

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut dibawah ini, diberikan izin untuk mengadakan penelitian.

Nama	: Budi Kurniawan
NPM	: 222070286
No Handphone	: 081287399003
Judul	: Money Politics Dan Respons Generasi Milenial, Studi Kasus Fenomena Money Politics Dan Respons Partisipasi Politik Generasi Milenial Dalam Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
Dosen Pembimbing	: Dr. Wahyudi Pramono, M.Si

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud. Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern kampus.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua

Dr. Rajanney P. Simarmata, M.Si
Nik. 34021184

Tembusan :

1. Ketua PPS Kelurahan Petukangan Utara
2. Ketua Panwas Kelurahan Petukangan Utara



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id

Jakarta, 2 Oktober 2025

No : 1373/STIPAN-A1/X/2025
Lamp : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
DPC PDI Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan Hormat

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut dibawah ini, diberikan izin untuk mengadakan penelitian.

Nama	: Budi Kurniawan
NPM	: 222070286
No Handphone	: 081287399003
Judul	: Money Politics Dan Respons Generasi Milenial, Studi Kasus Fenomena Money Politics Dan Respons Partisipasi Politik Generasi Milenial Dalam Pilpres Tahun 2024 Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
Dosen Pembimbing	: Dr. Wahyudi Pramono, M.Si

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud. Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern kampus.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua

Dr. Rajanner P. Simarmata, M.Si
Nik. 34021184



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC – PDI PERJUANGAN)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO :309/ST/EX/DPC-JS/XI/2025

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BUDI KURNIAWAN
NPM : 222070286
Program Studi : Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan melalui Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Kecamatan Pesanggrahan, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"MONEY POLITICS DAN RESPONS GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA MONEY POLITICS DAN RESPONS PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILENIAL DALAM PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA, KECAMATAN PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Dikeluarkan di : Jakarta Selatan
Tanggal : 29 November 2025

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Masa Bakti 2019 – 2025**

Ketua,

HJ. YUKE YURIKE, ST, MM

Sekretaris



SHIMON A.M. SITORUS, S.IP., M.IP

Tembusan:

1. DPP PDI Perjuangan
2. DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta
3. E-Arsip



**UNIT KERJA KARANG TARUNA
UKKT RW. 09**

**KELURAHAN PETUKANGAN UTARA
KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKARTA SELATAN**

Sekretariat: Pos RW. 09 Jalan Swadarma 1 dlm RT. 006 / RW. 09
Hp/ Wa : 0813 1810 5095 (Radit)



Kode Pos 12260

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 003/UKKTRW.09/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raditya Wresniwira
Jabatan : Ketua Karang Taruna RW. 09, Kel. Petukangan Utara,
Kec. Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BUDI KURNIAWAN
NPM : 222070286
Program Studi : Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

Telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian melalui wawancara diwilayah RW. 09 Kel. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"MONEY POLITICS DAN RESPONS GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS: FENOMENA MONEY POLITICS DAN RESPONS PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILENIAL DALAM PILPRES TAHUN 2024 DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA, KECAMATAN PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN)"

Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2025, yang bersangkutan selama melakukan penelitian telah menunjukkan sikap disiplin, kerjasama yang baik, dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 November 2025

Raditya Wresniwira
Ketua Karang Taruna RW. 09

Mengetahui

Casnoto
Ketua RW. 09

RIWAYAT HIDUP



Budi Kurniawan, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1973, merupakan Putra pertama dari 5 bersaudara pasangan Dr. Hari Suryono dan Suswati, S.IKom, yang sejak kecil tinggal dan dibesarkan di Kota Jakarta Selatan.

Pada Umur 7 tahun penulis masuk sekolah dasar SD Hang Tuah IV Jakarta tamat pada tahun 1986 kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 48 Jakarta Selatan dan selesai Pendidikan pada tahun 1989.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 29 Jakarta Selatan dan mengambil jurusan Fisika, penulis juga aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti Teater, Science dan Pencinta alam. Pada tahun 1995 penulis mendapatkan Sabuk Hitam Ee Dan (Dan 2) Taekwondo dan menjabat sebagai Kyo-Sa-Nim (Instruktur Muda/Asisten Pelatih) aliran WT (World Taekwondo). Penulis juga pernah menjuarai berbagai Lomba/Kejuaraan baik berupa kejuaraan resmi ataupun Eksebis. Selain Taekwondo penulis juga merupakan pelatih ilmu beladiri silat Betawi yaitu Beksi yang memang sudah ditekuni sejak penulis masih dibangku sekolah dasar. Pada tahun 1992 penulis masuk menjadi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer (STIMK) Budi Luhur jurusan Sistem Informatika. Pada tahun 1996 penulis terpilih mengikuti pendidikan khusus di Surabaya yaitu pendidikan arsitektur komputer yang memproses data radar secara real-time (Embedded Systems) yang 1 tahun kemudian terhenti karena adanya krisis ekonomi dan politik.

Penulis dalam pengalaman hidupnya pernah bekerja di beberapa Perusahaan pelayaran dengan posisi terakhir sebagai Freight Operations Manager dan perusahaan fabrikasi peralatan rumah sakit sebagai Radiation Protection Officer. Sejak tahun 1999 hingga saat ini penulis menekuni dunia politik sebagai pengurus partai PDI Perjuangan, jabatan terakhir pada saat ini sebagai wakil ketua bidang tenaga kerja dan jaminan sosial DPC PDI Perjuangan kota administrasi Jakarta Selatan dan juga menjabat sebagai kepala Database dan koordinator Satuan Tugas (Satgas) DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan.

Untuk lebih mendalami Ilmu Politik Saat ini penulis berstatus sebagai mahasiswa ilmu politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta jurusan Ilmu Politik.